



**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 7 TAHUN 2012**

**Tentang**

**RENCANA AKSI DAERAH  
PANGAN DAN GIZI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2011 - 2015**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2012**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Daftar Isi</b>	i
<b>Daftar Tabel</b>	iv
<b>Daftar Gambar</b>	v
<b>Daftar Singkatan</b>	vii
<b>I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	5
1.3 Landasan Hukum	5
1.4 Sistematika	6
<b>II KONDISI UMUM, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Kondisi Umum Pencapaian Pembangunan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah</b>	<b>7</b>
<b>2.1.1 Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>7</b>
2.1.1.1 Prevalensi Pendek/ <i>Stunting</i> pada Anak Balita di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Nasional dan Target MDGs	9
2.1.1.2 Prevalensi Pendek/ <i>Stunting</i> pada Anak Balita per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	9
2.1.1.3 Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk pada Anak Balita (Indeks BB/U) di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Nasional dan Target MDGs	11
2.1.1.4 Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk pada Anak Balita (Indeks BB/U) per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah	12
2.1.1.5 Status Gizi Balita berdasarkan Indikator BB/TB	13
<b>2.1.2 Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam</b>	<b>14</b>
2.1.2.1 Pengembangan Ketersediaan Pangan	19
2.1.2.2 Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan serta Stabilitas Harga Pangan	27
2.1.2.3 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	33
2.1.2.4 Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutan	35
<b>2.1.3 Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan</b>	<b>36</b>

2.1.3.1	Pengawasan Pangan yang beredar di Jawa Tengah	38
2.1.3.2	Pengawasan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	42
2.1.3.3	Kondisi Industri Rumah Tangga Pangan	43
2.1.3.4	Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Tenaga <i>District Food Inspector (DFI)</i> di Daerah	44
2.1.3.5	Fasilitas Kantin Sehat di SD/MI dan SMP/MTS	45
2.1.3.6	Agroindustri dan Kelompok Tani yang menerapkan GHP	46
2.1.3.7	Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	46
<b>2.1.4</b>	<b>Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</b>	<b>47</b>
2.1.4.1	Perilaku Cuci Tangan	50
2.1.4.2	Rendahnya Pemberian ASI Eksklusif	50
2.1.4.3	Jumlah Rumah Tangga Memanfaatkan Posyandu dan Penyediaan Makanan Tambahan	51
2.1.4.4	Aktivitas Fisik (Olah Raga)	52
2.1.4.5	Akses Terhadap Sanitasi Layak	53
2.1.4.6	Keluarga dengan kepemilikan persediaan air bersih	53
2.1.4.7	Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan	54
2.1.4.8	Rumah Tangga Sehat	55
<b>2.1.5</b>	<b>Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi</b>	<b>56</b>
2.1.5.1	Kelembagaan yang Terkait Pangan dan Gizi di Jawa Tengah	58
2.1.5.2	Sumber Daya Manusia di Bidang Pangan dan Gizi di Jawa Tengah	60
<b>2.2</b>	<b>Permasalahan Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah</b>	<b>61</b>
2.2.1	Perbaikan Gizi Masyarakat	61
2.2.2	Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam	61
2.2.3	Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	62
2.2.4	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	64
2.2.5	Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi	65
<b>2.3</b>	<b>Tantangan Dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah</b>	<b>66</b>
2.3.1	Perbaikan Gizi Masyarakat	66
2.3.2	Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam	66
2.3.3	Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	68

2.3.4	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	69
2.3.5	Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi	70
<b>III</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI</b>	<b>71</b>
3.1	Strata 1 : Kabupaten/Kota dengan Persentase Balita BBR $\leq$ 12,13 % dengan Persentase Pendek pada Anak Balita $\leq$ 29,79 %;	74
3.2	Strata 2 : Kabupaten/Kota dengan Persentase Balita BBR $>$ 12,13 % dengan Persentase Pendek pada Anak Balita $\leq$ 29,79 %;	75
3.3	Strata 3 : Kabupaten/Kota dengan Persentase Balita BBR $\leq$ 12,13% dengan Persentase Pendek pada Anak Balita $>$ 29,79 %;	76
3.4	Strata 4 : Kabupaten/Kota dengan Persentase Balita BBR $>$ 12,13 % dengan Persentase Pendek pada Anak Balita $>$ 29,79 %;	77
<b>IV</b>	<b>RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI</b>	<b>79</b>
4.1	Perbaikan Gizi Masyarakat	82
4.2	Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam	84
4.3	Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	101
4.4	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	112
4.5	Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi	115
<b>V</b>	<b>PEMANTAUAN DAN EVALUASI</b>	<b>120</b>
5.1	Tujuan	120
5.2	Ruang Lingkup	120
5.3	Prinsip Pelaksanaan	121
5.4	Tim Pelaksana	121
5.5	Metode	122
5.6	Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	122
5.7	Biaya Pemantauan dan Evaluasi	123
5.8	Instrumen Pemantauan dan Evaluasi	124
<b>VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>127</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
I	Matrik Rencana Aksi Perbaikan Gizi Masyarakat	I-1
II	Matrik Rencana Aksi Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam	II-1
III	Matrik Rencana Aksi Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	III-1
IV	Matrik Rencana Aksi Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	IV-1
V	Matrik Rencana Aksi Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi	V-1
VI	Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Anggaran RAD-PG	V-1

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Status Pencapaian Pembangunan Pilar Gizi Masyarakat	7
Tabel 2. Status Pencapaian Pembangunan Pilar Aksesibilitas Pangan Beragam	15
Tabel 3. Konsumsi Energi dan Protein di Jawa Tengah Tahun 2008-2010	34
Tabel 4. Status Capaian Pembangunan Pilar Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	36
Tabel 5. Hasil Pengujian Mutu Pangan yang dilakukan Bidang Keamanan Pangan BKP Provinsi Jawa Tengah	40
Tabel 6. Status Pencapaian Pembangunan Pilar Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	48
Tabel 7. Status Pencapaian Pembangunan Pilar Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi	57
Tabel 8. Target Pembangunan Pangan dan Gizi Jawa Tengah Tahun 2011-2015	71
Tabel 9. Intervensi Strategi 5 Pilar dengan Stratifikasi Kabupaten/Kota	73
Tabel 10. Rencana Aksi Pilar Perbaikan Gizi Masyarakat	83
Tabel 11. Rencana Aksi Pilar Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam	94
Tabel 12. Rencana Aksi Pilar Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	108
Tabel 13. Rencana Aksi Pilar Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	113
Tabel 14. Rencana Aksi Pilar Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi	117
Tabel 15. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RAD-PG Tahun 2011-2015	126

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Perbandingan prevalensi <i>stunting</i> di Jawa Tengah dengan Indonesia Tahun 2010	9
Gambar 2. Prevalensi <i>stunting</i> anak balita per Kabupaten/Kota dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Target <i>MDGs</i>	10
Gambar 3. Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk anak Balita (Indeks BB/U) di Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Target <i>MDGs</i>	11
Gambar 4. Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk anak Balita (Indeks BB/U) per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dibandingkan dengan Target <i>MDGs</i>	12
Gambar 5. Perkembangan jumlah kasus balita buruk di Jawa Tengah Tahun 2008-2011	14
Gambar 6. Capaian ketersediaan energi dan protein di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2010	19
Gambar 7. Jumlah Desa Mandiri Pangan di Jawa Tengah	20
Gambar 8. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010	21
Gambar 9. Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010	22
Gambar 10. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan untuk Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010	23
Gambar 11. Perkembangan Produksi Hasil Ternak di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010	25
Gambar 12. Perkembangan Produksi Perikanan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010	26
Gambar 13. Peta Komposit Kerawanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (FIA) Tahun 2008	28
Gambar 14. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (FSVA) Tahun 2009	29
Gambar 15. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (FSVA) Tahun 2010	30
Gambar 16. Perkembangan RTS penerima Raskin Tahun 2008-2010	31
Gambar 17. Skor Pola Pangan Harapan Jawa Tengah 2010	33
Gambar 18. Asupan Kalori Penduduk Jawa Tengah Tahun 2010	35
Gambar 19. Profil Persentase Hasil Uji Pangan Tidak Memenuhi Syarat berdasar Asal Sampel	38
Gambar 20. Profil jumlah Pangan Tidak Memenuhi Syarat Berdasar Parameter Uji	39
Gambar 21. Profil Hasil Uji Sampel PJAS Tahun 2008, 2009 dan 2010	43
Gambar 22. Jumlah Tenaga PKP dan DFI Jawa Tengah	45
Gambar 23. Persentase Perilaku cuci tangan di Kabupaten/Kota Tahun 2010	50
Gambar 24. Persentase pemberian ASI Eksklusif pada Kabupaten/Kota Tahun 2010	51
Gambar 25. Jumlah Rumah Tangga memanfaatkan Posyandu Tahun 2010	52
Gambar 26. Rumah Tangga yang melakukan Aktifitas Fisik Tahun 2010	52
Gambar 27. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan jamban sehat Tahun 2010	53
Gambar 28. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih	54

	<b>Halaman</b>
Gambar 29. Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	55
Gambar 30. Rumah Tangga Sehat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2010	56
Gambar 31. Kerangka Konsep Implementasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah 2011-2015	81

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ASI	: Air Susu Ibu
ASUH	: Aman, Sehat, Utuh dan Halal
B2SA	: Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
BAH	: Bahan Asal Hewan
BB/TB	: Berat Badan dibagi Tinggi Badan
BB/U	: Berat Badan dibagi Umur
BBR	: Berat Badan Rendah
BIB	: Balai Inseminasi Buatan
Bimtek	: Bimbingan Teknis
BKP	: Badan Ketahanan Pangan
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BMR	: Batas Minimal Residu
BPBTNR	: Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia
BPBTR	: Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia
BPSDMNak	: Balai Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Peternakan
BTP	: Bahan Tambahan Pangan
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
<i>CBF</i>	: <i>Culture Bases Fisheries</i>
CBIB	: Cara Budidaya Ikan yang Baik
CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CPPB	: Cara Produksi Pangan yang Baik
CPPB-IRT	: Cara Produksi Pangan yang Baik Industri Rumah Tangga
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
<i>DFI</i>	: <i>District Food Inspector</i>
D/S	: Balita Ditimbang/Jumlah Balita Seluruhnya
DS3	: Desa Siaga Sehat Sejahtera
<i>FIA</i>	: <i>Food Insecurity Atlas</i>
FKD	: Forum Kesehatan Desa
<i>FSVA</i>	: <i>Food Security and Vulnerabilty Atlas</i>
GAKI	: Gangguan Akibat Kekurangan Iodium
<i>GAP</i>	: <i>Good Agricultural Practices</i>
GEMARIKAN	: Gerakan Masyarakat Makan Ikan
<i>GHP</i>	: <i>Good Handling Practices</i>
GKG	: Gabah Kering Giling
<i>GMP</i>	: <i>Good Manufacturing Practices</i>
<i>GT</i>	: <i>Gross Ton</i>
HABAH	: Hasil Bahan Asal Hewan
<i>HACCP</i>	: <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i>
IB	: Inseminasi Buatan
IMD	: Inisiasi Menyusui Dini
INKA	: Inseminasi Kawin Alam
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRTP	: Industri Rumah Tangga Pangan
JPK	: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
KIE	: Komunikasi Informasi dan Edukasi
KK	: Kepala Keluarga



KN	: Kunjungan Neonatal
KKPE	: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
KTT	: Kelompok Tani Ternak
KUPS	: Kredit Usaha Pembibitan Sapi
K4	: Kunjungan Kehamilan ke 4
LDPM	: Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
LM3	: Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat
LPM	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MCK	: Mandi, Cuci dan Kakus
MDGs	: <i>Millennium Development Goals</i>
Movnas	: <i>Moving Nasional</i>
MP-ASI	: Makanan Pendamping Air Susu Ibu
Nakes	: Tenaga Kesehatan
NBM	: Neraca Bahan Makanan
NKV	: Nomor Kontrol Veteriner
OKKP-D	: Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
P2BN	: Peningkatan Produksi Beras Nasional
P2HP	: Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
P2KP	: Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
PBB	: Persatuan Bangsa Bangsa
PG	: Pabrik Gula
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PIRT	: Produk Industri Rumah Tangga
PJAS	: Pangan Jajanan Anak Sekolah
PKD	: Poliklinik Kesehatan Desa
PKG	: Pemantauan Konsumsi Gizi
PKP	: Penyuluh Keamanan Pangan
PM	: Penerima Manfaat
PMI	: Peningkatan Mutu Intensifikasi
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMT-AS	: Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
POM	: Pengawasan Obat dan Makanan
PPG	: Pusat Pemulihan Gizi
PPH	: Pola Pangan Harapan
PPL	: Petugas Penyuluh Lapangan
PPSAT	: Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
PPSKI	: Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia
PSDSK	: Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau
PSG	: Penentuan Status Gizi
PSN	: Pemberantasan Sarang Nyamuk
RAD-PG	: Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
RAN-PG	: Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RSJD	: Rumah Sakit Jiwa Daerah
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RTS	: Rumah Tangga Sasaran
RTS-PM	: Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat
SD	: Standar Deviasi
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKP	: Sertifikat Kelayaan Pengelolaan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SL	: Sekolah Lapang

SL-PTT	:	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
SMD	:	Sarjana Membangun Desa
SOP	:	<i>Standard Operational Procedure</i>
SPKD	:	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
SSOP	:	<i>Standard Sanitation Operating Procedure</i>
TB/U	:	Tinggi Badan dibagi Umur
TKPKD	:	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TP PKK	:	Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
TPI	:	Tempat Pelelangan Ikan
TRC	:	Tim Reaksi Cepat
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNDIP	:	Universitas Diponegoro
UNDP	:	<i>United Nation Development Programme</i>
UNIKA	:	Universitas Katholik
UNNES	:	Universitas Negeri Semarang
UNS	:	Universitas Sebelas Maret
UNSOED	:	Universitas Soedirman
UPGI	:	Upaya Perbaikan Gizi Institusi
UPGK	:	Upaya Perbaikan Gizi Keluarga
UPI	:	Unit Pengolahan Ikan
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
USM	:	Universitas Semarang
WHO	:	<i>World Health Organization</i>
WKNPG	:	Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi hak asasi manusia bagi seluruh rakyat, sebagaimana tertuang dalam *Universal Declaration of Human Right* (1948) dan *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1966). Pernyataan pangan sebagai hak asasi manusia juga menjadi kesepakatan *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* tahun 1996 yang ditandatangani sebanyak 112 kepala negara atau pejabat tinggi dari 186 negara peserta, termasuk Indonesia. Deklarasi tersebut berisi tentang pemberian tekanan pada *human right to adequate food* (hak atas pemenuhan kebutuhan pangan secara cukup), dan perlunya aksi bersama antar negara untuk mengurangi kelaparan.

Pada bulan September tahun 2000 diadakan *World Summits* yang menghasilkan *Millennium Declaration* yang ditandatangani oleh 189 negara anggota PBB. *Millennium Declaration* tersebut kemudian disahkan oleh Majelis Umum PBB ke dalam Resolusi Nomor 55/2 tanggal 18 September 2000 tentang Deklarasi Millennium PBB atau lebih dikenal *Millennium Development Goals (MDGs)*. *MDGs* menegaskan bahwa setiap negara, termasuk Indonesia bersepakat untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan hingga separuhnya pada tahun 2015. Dua dari lima indikator sebagai penjabaran tujuan pertama *MDGs* adalah menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita, dan menurunnya jumlah penduduk dengan defisit energi (mengkonsumsi energi kurang dari 70 % kebutuhan untuk hidup sehat).

Di Indonesia, pangan juga menjadi hak asasi manusia bagi setiap rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002

tentang Ketahanan Pangan yang menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan persediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Hal ini menegaskan perlunya mengarahkan pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ketahanan pangan juga telah ditetapkan menjadi urusan wajib bagi pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota yang menegaskan semakin pentingnya pembangunan ketahanan pangan.

Sejalan dengan motto “**Bali Ndeso Mbangun Deso**” yang implementasinya dirumuskan dalam Visi, Misi dan RPJMD) Jawa Tengah tahun 2008-2013, ketahanan pangan dijadikan prioritas pembangunan Pemerintah Jawa Tengah. Peningkatan ketahanan pangan tercermin dengan tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, merata dan terjangkau. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Jawa Tengah dalam **Pembangunan Ketahanan Pangan** adalah dengan: 1) memantapkan ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; 2) meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan; 3) memperlancar pasokan dan fasilitas tunda jual serta stabilitas harga; 4) mengembangkan kelembagaan dan sarana pengolahan serta pemasaran di pedesaan; 5) memantapkan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat; 6) mempercepat proses diversifikasi konsumsi pangan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal; 7) meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang bermutu, aman dan bergizi; 8) tercukupinya ketersediaan pangan yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masyarakat; 9) pengembangan komoditas pangan dengan menggunakan varietas unggul baru, penyediaan dan penggunaan sarana produksi;

10) peningkatan Kemampuan dan ketrampilan petani; 11) peningkatan dukungan terhadap pengelolaan lahan kering dan air tanah untuk pengembangan tanaman pangan.

Strategi **pembangunan ketahanan pangan** Provinsi Jawa Tengah adalah : 1) pengembangan cadangan pangan pemerintah dan lumbung pangan masyarakat; 2) pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui pengembangan Desa Mandiri Pangan; 3) pengembangan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala; 4) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga; 5) pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan melalui pemberian penghargaan, promosi, kampanye dan pendampingan; 6) penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan; 7) peningkatan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen; 8) pengembangan komoditas pangan alternatif; 9) melaksanakan intensifikasi pertanian dengan menggunakan varietas unggul baru; 10) peningkatan kemampuan dan ketrampilan petani; 11) peningkatan dukungan terhadap pengelolaan lahan kering dan air tanah untuk pengembangan komoditas pangan.

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa. SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta tangkas dan cerdas sangat ditentukan oleh status gizi yang baik. Status gizi sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas asupan pangan yang dikonsumsi. Masalah gizi dipengaruhi secara langsung oleh konsumsi makanan dan penyakit infeksi. Secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan dan konsumsi pangan beragam, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik. Dampak buruk kekurangan gizi berakibat pada hilangnya kesempatan sekolah dan hilangnya sumber daya karena biaya kesehatan yang tinggi serta

rendahnya produktivitas kerja. Oleh karena itu investasi di bidang gizi sangat penting dalam upaya memutuskan lingkaran setan kemiskinan dan kurang gizi dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2008-2013 ditegaskan **kebijakan peningkatan status gizi masyarakat** dengan: 1) peningkatan kualitas akses pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa/PKD) dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Tengah; 2) peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka perilaku hidup sehat, perbaikan gizi masyarakat dan perbaikan sanitasi lingkungan; 3) pengawasan di bidang farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan; 4) peningkatan kemampuan dan kualitas rumah sakit; 5) upaya peningkatan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sosial dan spiritual; 6) peningkatan pelayanan RSUD dan RSJD Provinsi. **Strategi peningkatan status gizi masyarakat** yang ditempuh adalah : 1) meningkatkan kader kesehatan dan desa siaga dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular; 2) meningkatkan kemitraan dalam pengawasan peredaran obat dan makanan; 3) memanfaatkan penggunaan obat tradisional dalam mengeliminir penggunaan obat berbahaya; 4) meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat; 5) meningkatkan suplemen makanan (makanan tambahan) dengan melibatkan kader kesehatan; 6) diversifikasi makanan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat; 7) meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan lingkungan sehat; 8) sertifikasi puskesmas dan rumah sakit; 9) meningkatkan pendidikan dan ketrampilan tenaga kesehatan yang dimiliki; 10) sertifikasi tenaga kesehatan terutama tenaga medis; 11) meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di bidang farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan yang berkualitas; 12) rumah sakit diarahkan ke BLUD; 13) meningkatkan

upaya kesehatan jiwa, sosial dan spiritual melalui pengaktifan Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat dan integrasi pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas.

## **1.2 Tujuan**

RAD-PG Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 menjadi bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan status gizi masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan yang terkait dengan Rencana Tindak Upaya Pencapaian *MDGs*, ditegaskan perlunya penyusunan RAD-PG pada tingkat Provinsi. Penyusunan RAD-PG Provinsi Jawa Tengah 2011-2015 ditujukan untuk menjadi panduan dan arahan serta acuan bagi institusi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan lain pada tataran Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di Jawa Tengah.

## **1.3 Landasan Hukum**

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
3. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)* Provinsi Jawa Tengah 2011-2015;
4. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0154/M.PPN/05/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

#### **1.4 Sistematika**

RAD-PG Provinsi Jawa Tengah disusun berdasarkan buku Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (Bappenas, 2011), terdiri dari lima bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, memberikan gambaran mengenai latar belakang, tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan RAD-PG; Bab II Kondisi Umum, Permasalahan dan Tantangan menggambarkan kondisi pencapaian pembangunan pangan dan gizi di Jawa Tengah, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing pilar pembangunan pangan dan gizi; Bab III Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Pembangunan Pangan dan Gizi, mendeskripsikan tentang arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran masing-masing pilar pembangunan pangan dan gizi di Jawa Tengah; Bab IV Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, mendeskripsikan berbagai program dan kegiatan masing-masing pilar pembangunan pangan dan gizi; Bab V Pemantauan dan Evaluasi, mendeskripsikan tentang mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi pada masing-masing pilar pembangunan pangan dan gizi; dan Bab VI Penutup.

Uraian masing-masing sub bab dalam RAD Pangan dan Gizi ini dikelompokkan dalam lima pilar pembangunan pangan, yaitu: (1) perbaikan gizi masyarakat; (2) peningkatan aksesibilitas pangan beragam; (3) peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan; (4) peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan (5) penguatan kelembagaan pangan dan gizi.



## BAB II

### KONDISI UMUM, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN


#### 2.1 Kondisi Umum Pencapaian Pembangunan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah



















##### 2.1.1. Perbaikan Gizi Masyarakat

Ditinjau dari kondisi tingkat kecukupan gizi masyarakat di Jawa Tengah masih terdapat anak balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang (balita dengan BB rendah) sebesar 12,13%, terutama pada kelompok masyarakat miskin di perdesaan. Tingkat kecukupan gizi masyarakat juga nampak dari prevalensi anak balita yang pendek dan sangat pendek (*stunting*), yaitu sebesar 29,79 %.

Kecukupan gizi masyarakat dipengaruhi oleh konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta dapat memenuhi kecukupan gizi individu untuk tumbuh dan berkembang. Kekurangan gizi pada masa kehamilan dan anak usia dini menyebabkan keterlambatan dalam pertumbuhan fisik, perkembangan motorik atau kemampuan gerak dan gangguan perkembangan kognitif yang pada jangka panjang berakibat pada rendahnya kemampuan belajar. Status pencapaian pembangunan pilar gizi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Status Pencapaian Pembangunan Pilar Gizi Masyarakat**

No	Indikator	Acuan Dasar (2010)	Saat ini (2011)	Target RAD-PG s/d 2015	Status Capaian	Sumber Data
<b>Target Keluaran : Menurunnya prevalensi balita dengan BB rendah dan balita <i>stunting</i></b>						
1	<b>Perbaikan Gizi Masyarakat</b>					
a.	Jumlah puskesmas perawatan dan RSUD memiliki tenaga yang dilatih tata laksana gizi buruk.	182	259	332		Dinkes

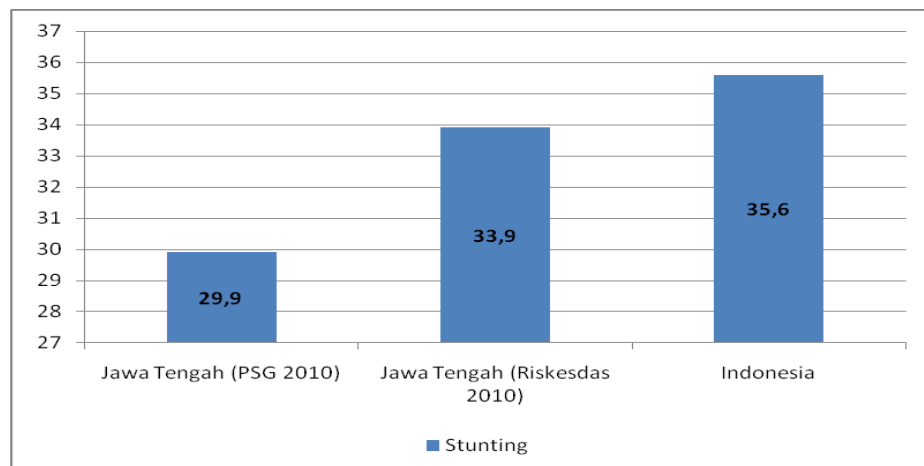
No	Indikator	Acuan Dasar (2010)	Saat ini (2011)	Target RAD-PG s/d 2015	Status Capaian	Sumber Data
b.	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan sesuai standar	100%	100%	100%		Dinkes
c.	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S).	75,41%	78%	90%		Baper-Masdes
d.	Jumlah puskesmas non perawatan memiliki tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk.	35	150	576 (100%)		Dinkes
e.	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Surveillance Gizi Khusus	0	3	35		Dinkes
f.	Jumlah puskesmas yang telah dilatih dengan pemantauan pertumbuhan balita.	52	300	901 (100%)		Dinkes
g.	Persentase kader Posyandu aktif di Posyandu.	88%	90%	94%		Bapermas-des
h.	Persentase posyandu yang memiliki sarana dan prasarana pemantauan pertumbuhan	10%	25%	80%		Dinkes
i.	Jumlah Perkembangan Posyandu Model.	2.500	5.500	13.000		Bapermas-des
j.	Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A.	95%	95%	95%		Dinkes
k.	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif.	60%	65%	80%		Dinkes
l.	Persentase Kab/Kota yang mempunyai peraturan tentang ASI Eksklusif	3%	10%	60%		Dinkes
m.	Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium	70%	75%	90%		Dinkes
n.	Cakupan Ibu Hamil mendapatkan Tablet tambah darah (Fe) 90%	71%	74%	85%		Dinkes
o.	Cakupan Kunjungan Pertama Neonatus (KN 1)	95%	86%	90%		Dinkes
p.	Cakupan Kunjungan Ke 4 Ibu Hamil (K4)	92%	96%	100%		Dinkes
Keterangan :  Sudah tercapai  Akan tercapai  Perlu perhatian khusus						

Gambaran tentang kondisi umum masalah gizi masyarakat meliputi :

#### **2.1.1.1 Prevalensi Pendek/*stunting* pada Anak Balita di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Nasional.**

Kondisi prevalensi *stunting* pada anak balita di Jawa Tengah berdasarkan data Riskesdas 2010 adalah 33,9%. Sedangkan hasil PSG Dinkes Provinsi Jawa Tengah sebesar 29,79%. Perbedaan angka ini disebabkan data Riskesdas tahun 2010 merupakan hasil survai untuk menggambarkan status gizi pada tingkat provinsi namun tidak menggambarkan kondisi di tingkat kabupaten/kota seperti yang dilakukan oleh survai PSG. Kondisi ini menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan rata-rata Nasional tahun 2010 sebesar 35,6% posisi *stunting* di Jawa Tengah lebih baik.

**Gambar 1. Perbandingan Prevalensi *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah dengan Indonesia tahun 2010**



Sumber : Riskesdas 2010; PSG Kadarzi Jateng 2010

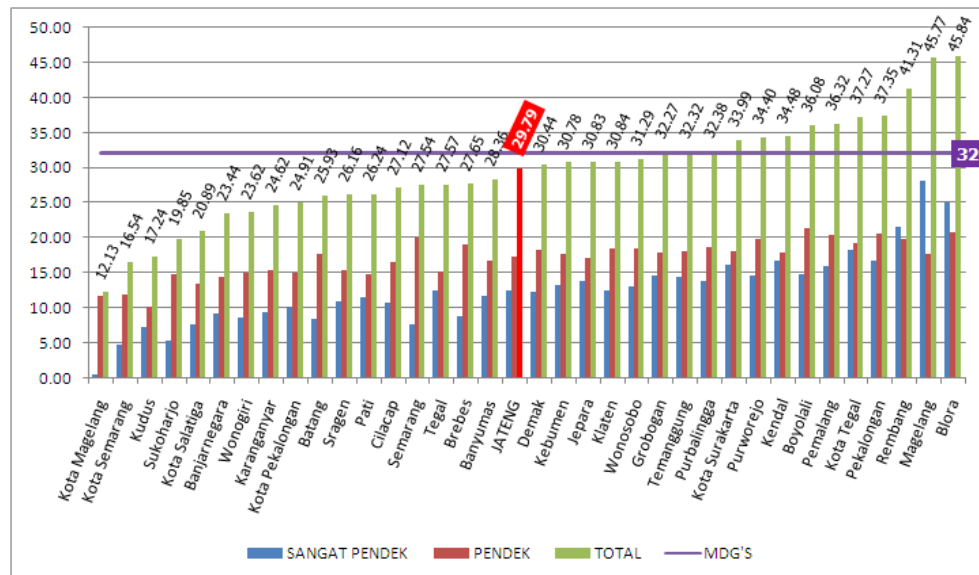
#### **2.1.1.2 Prevalensi Pendek/*stunting* pada Anak Balita Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah**

Secara keseluruhan prevalensi *stunting*/pendek balita di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data PSG Dinkes Provinsi Jateng 2010 sebesar 29,79% sudah di bawah target MDGs sebesar 32% (Gambar 2).

Kabupaten/Kota dengan kondisi kurang baik atau tertinggi angka prevalensi pendek dan sangat pendek yaitu di Kabupaten Blora sebesar 45,84% dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat dan aman yang antara lain ditunjukkan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi. Sedangkan prevalensi pendek dan sangat pendek terendah di Kota Magelang sebesar 12,13%. Upaya penanggulangan masalah balita *stunting* terintegrasi dalam kegiatan perbaikan gizi pada masa kehamilan, penerapan ASI Eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI pada balita.

Tiga belas Kabupaten/Kota dengan prevalensi kependekan total di atas target MDGs meliputi : Blora, Magelang, Rembang, Pekalongan, Kota Tegal, Pemalang, Boyolali, Kendal, Purworejo, Kota Surakarta, Purbalingga, Temanggung, dan Grobogan.

**Gambar 2. Prevalensi *stunting* Anak Balita per Kabupaten/Kota Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Target MDGs**



Sumber : PSG Kadarzi Jateng 2010

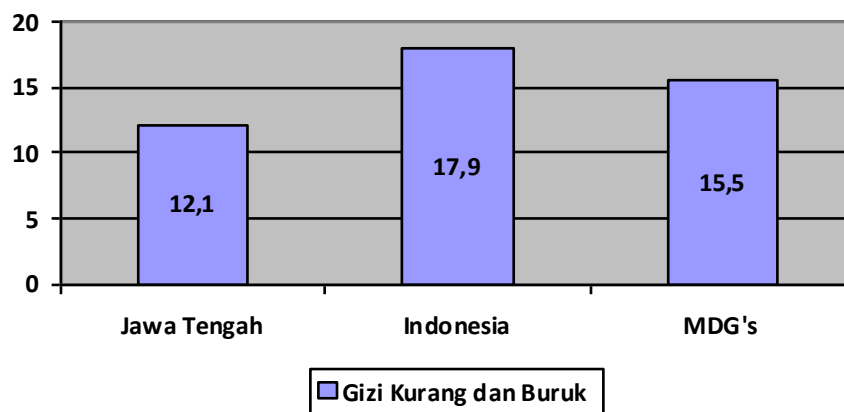
Indikator Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) menggambarkan status gizi yang sifatnya kronis, artinya muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama,

seperti : kemiskinan, rendahnya asupan pada ibu hamil, pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena higiene dan sanitasi yang kurang baik. Kategori status gizi anak balita berdasarkan TB/U adalah Normal, Pendek, dan Sangat Pendek. Status gizi Pendek dan Sangat Pendek dikelompokkan lagi menjadi satu kategori yang disebut **stunting/pendek**.

### 2.1.1.3 Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk pada Anak Balita (Indeks BB/U) di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Nasional dan target MDGs.

Upaya yang telah dilakukan dalam perbaikan gizi masyarakat, utamanya penurunan gizi kurang dan buruk pada anak balita melalui usaha perbaikan gizi keluarga, penentuan status gizi oleh bidan desa, pelatihan kader dan masyarakat secara intensif serta penanganan responsif terhadap balita penderita gizi buruk. Hal tersebut ditunjukkan dari data/angka prevalensi gizi kurang dan buruk pada anak balita berdasarkan indeks BB/U di Provinsi Jawa Tengah (12,13%). Data tersebut berarti berada dalam kondisi baik karena lebih rendah dari rata-rata nasional (17,9%) dan target MDGs tahun 2015 (15,5%) seperti terlihat pada Gambar 3.

**Gambar 3. Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk Anak Balita (Indeks BB/U) di Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Target MDGs**

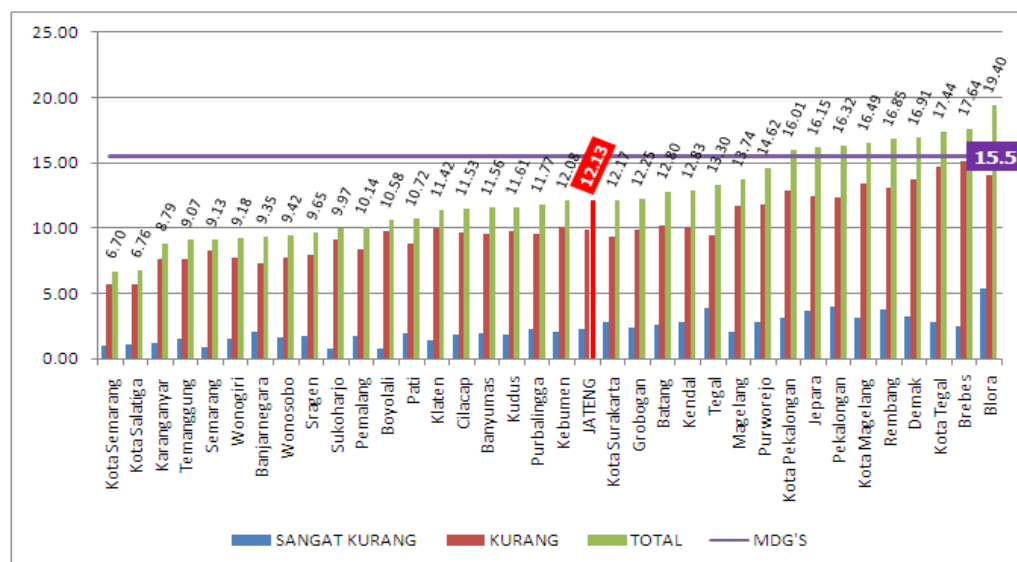


Sumber : PSG Kadarzi Jateng 2010, Riskesdas 2010

#### 2.1.1.4 Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk pada Anak Balita (Indeks BB/U) Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan target MDGs.

Terdapat sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada pada kondisi kurang baik karena memiliki prevalensi anak balita dengan gizi kurang dan buruk di atas rata-rata prevalensi gizi kurang dan buruk pada anak balita yang ditetapkan oleh target MDGs tahun 2015 (15,5%) meliputi : Blora, Brebes, Kota Tegal, Demak, Rembang, Kota Magelang, Pekalongan, Jepara, dan Kota Pekalongan, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.

**Gambar 4. Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk Anak Balita (Indeks BB/U) Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng dibandingkan dengan Target MDGs**



Sumber : PSG Kadarzi Jateng 2010

Indikator berat badan menurut umur (BB/U) memberikan gambaran tentang status gizi yang sifatnya umum dan tidak spesifik. Tinggi rendahnya prevalensi anak balita dengan berat badan rendah (*gizi buruk dan gizi kurang*) mengindikasikan ada-tidaknya masalah gizi pada balita, tetapi tidak memberikan gambaran apakah masalah gizi tersebut bersifat kronis atau akut.

#### **2.1.1.5 Status Gizi Balita berdasarkan Indikator BB/TB**

Indikator Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) menggambarkan status gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung dalam waktu pendek karena diare atau sakit lainnya. Dalam keadaan demikian berat badan anak akan cepat turun sehingga tidak proporsional lagi dengan tinggi badan dan anak menjadi kurus.

Penemuan kasus gizi buruk berdasarkan indikator BB/TB dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

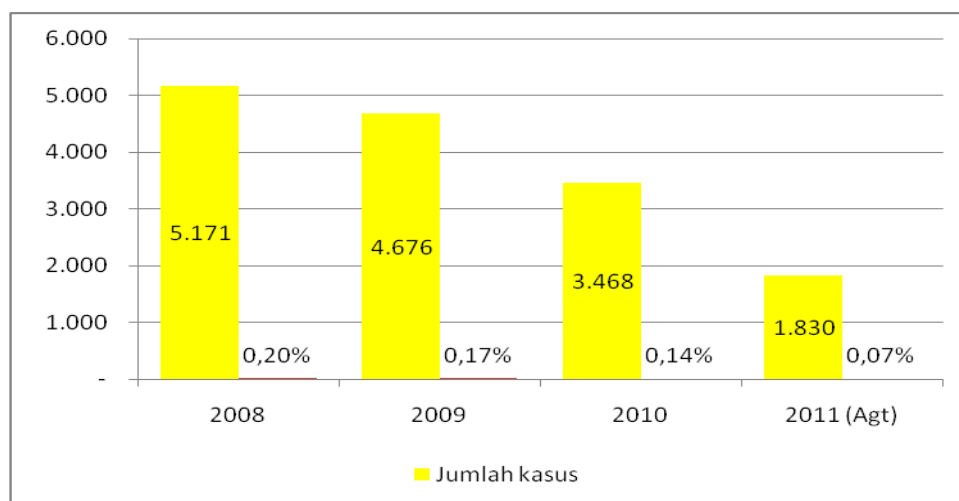
##### **1) Pemantauan Kasus Gizi Buruk.**

Pelaksanaan pemantauan kasus gizi buruk terintegrasi dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan di Posyandu. Pemantauan gizi buruk menghasilkan jumlah kasus gizi buruk sebagaimana terlihat pada Gambar 5. Persentase posyandu yang memiliki sarana dan prasarana pemantauan pertumbuhan hingga tahun 2011 sebanyak 25% dari 48.399 posyandu dan akan ditingkatkan menjadi 80% pada tahun 2015. Selain itu juga melalui peran aktif kader dengan dukungan teknis petugas kesehatan di Puskesmas dan PKD. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) tahun 2011 mencapai 78% dan ditargetkan pada tahun 2015 dapat mencapai 90%. Anak balita yang dalam penimbangan di Posyandu plot BB-nya pada KMS berada di bawah garis merah, dilakukan pengukuran kembali BB dan TB-nya dan dibandingkan dengan Baku Standar WHO, 2006. Apabila hasil perhitungan berada di bawah -3 Standar Baku maka balita tersebut termasuk kategori berstatus Gizi Buruk. Pengukuran juga dilakukan pada anak balita yang ditemukan tampak kurus sekali di luar pelaksanaan Posyandu. Anak balita dengan tanda klinis *marasmus* dan *kwashiorkor* juga termasuk kategori berstatus Gizi Buruk.

## 2) Penanganan Kasus Gizi Buruk.

Posyandu sebagai pos pelayanan kesehatan yang terdepan menjadi ujung tombak dalam penjarangan masalah kekurangan gizi pada balita. Kasus anak balita yang ditemukan menderita gizi buruk dirujuk ke Puskesmas dan/atau ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Hingga tahun 2011, seluruh kasus balita gizi buruk di Jawa Tengah telah mendapat perawatan yang memadai sudah mencapai 100%. Nampak dari Gambar 5 terjadi penurunan jumlah kasus balita gizi buruk pada kurun waktu 2008-2011. Pada tahun 2008 kasus balita gizi buruk mencapai 5.171 kasus (0,20%). Pada tahun 2011 jumlah kasus menurun hingga menjadi 1.830 kasus (0,07%).

**Gambar 5. Perkembangan jumlah kasus balita gizi buruk Jawa Tengah Tahun 2008-2011**



Sumber: Dinas Kesehatan Jawa Tengah (2008-2011)

### 2.1.2. Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam

Aksesibilitas pangan berkaitan dengan kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya. Aksesibilitas pangan ini mencakup ketersediaan pangan, distribusi pangan, akses pangan dan stabilitas harga pangan, serta konsumsi



pangan. Adapun status pencapaian pembangunan pilar aksesibilitas pangan beragam disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Status Pencapaian Pembangunan Pilar Aksesibilitas Pangan Beragam**

No	Indikator	Acuan Dasar (2010)	Saat ini (2011)	Target RAD-PG s/d (2015)	Status Capaian	Sumber Data
<b>Target Keluaran : Meningkatnya tingkat keragaman konsumsi dan skor PPH</b>						
<b>2</b>	<b>Peningkatan Aksesibilitas Pangan</b>					
a.	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan	144 Desa	222 Desa	422 Desa		BKP
b.	Jumlah lumbung pangan yang direvitalisasi	186 Lumbung	236 Lumbung	516 Lumbung		BKP
c.	Jumlah wilayah rawan pangan yang tertangani oleh PDRP	31 Desa	34 Desa	50 Desa		BKP
d.	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA)	29 Kabupaten	537 Kecamatan	8.577 Desa/Kelurahan		BKP
e.	Persentase Kab./Kota yang melaksanakan Surveilans Pangan dan Gizi/SKPG	50 %	70 %	100 %		BKP
f.	Jumlah LDPM di daerah produsen pangan	24 Gapoktan	108 Gapoktan	228 Gapoktan		BKP
g.	Jumlah Kab/Kota yang memiliki data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota		BKP
h.	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota		BKP
i.	Skor PPH	86,02	88,70	95,00		BKP
j.	Jumlah desa P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan)	250 Desa	380 Desa	900 Desa		BKP
k.	Jumlah Kab dan Kota yang melaksanakan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	21 Kabupaten	31 Kab/Kota	35 Kab/Kota		BKP

No	Indikator	Acuan Dasar (2010)	Saat ini (2011)	Target RAD-PG s/d (2015)	Status Capaian	Sumber Data
l.	Jumlah tenaga / petugas lapangan seperti penyuluh (Pendampingan P2KP)	241 Petugas	330 Petugas	457 Petugas		BKP
m.	Jumlah Kab/Kota yg melakukan pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (termasuk skor PPH & tingkat konsumsi energi rata2 penddk)	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota		BKP
n.	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai data dan informasi tentang pola konsumsi penganekaragaman dan keamanan pangan	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota		BKP
o.	Luas areal penerapan budidaya serealial yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati (Ha )					
	• SL-PTT padi non hibrida	158.750 Ha	333.750 Ha	1.035.550 Ha		Dinpertan TPH
	• SL-PTT padi hibrida	24.350 Ha	42.320 Ha	66.110 Ha		Dinpertan TPH
	• SL-PTT padi lahan kering	20.000 Ha	47.100 Ha	156.350 Ha		Dinpertan TPH
	• SL-PTT Jagung hibrida	18.780 Ha	52.905 Ha	315.420 Ha		Dinpertan TPH
p.	Luas areal Peningkatan Produksi & Produktivitas Tanaman Pangan					
	• Pengembangan Padi non hibrida	2.500 Ha	9.153 Ha	72.653 Ha		Dinpertan TPH
	• Pengembangan Jagung Hibrida	1.100 Ha	2.400 Ha	14.300 Ha		Dinpertan TPH
	• Pengembangan Jagung Komposit	0	520 Ha	2.600 Ha		Dinpertan TPH
q.	Luas areal penerapan budidaya tanaman aneka kacang dan umbi yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha )					

No	Indikator	Acuan Dasar (2010)	Saat ini (2011)	Target RAD-PG s/d (2015)	Status Capaian	Sumber Data
	• SL-PTT Kedelai	38.200 Ha	83.200 Ha	267.280 Ha		Dinpartan TPH
r.	Luas areal peningkatan Produksi dan Produktivitas Aneka Kacang dan Umbi					
	• PMI Kedelai	1.600 Ha	3.300 Ha	9.500 Ha		Dinpartan TPH
	• PMI Kacang Tanah	150 Ha	300 Ha	750 Ha		Dinpartan TPH
	• PMI Kacang Hijau	480 Ha	980 Ha	2.700 Ha		Dinpartan TPH
	• Pengembangan Ubi Kayu	0	75 Ha	430 Ha		Dinpartan TPH
s.	Luas areal perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah	215 Ha	503 Ha	2.540 Ha		Dinpartan TPH
t.	Luas areal perbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman buah	1.456 Ha	3.162 Ha	12.030 Ha		Dinpartan TPH
u.	Luas areal pengembangan kawasan Tanaman sayuran dan tanaman obat	70 Ha	184 Ha	670 Ha		Dinpartan TPH
v.	Luas areal pengembangan registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat	70 Ha	184 Ha	670 Ha		Dinpartan TPH
w.	Luas pengembangan areal produksi tebu (Ha)	55.652 Ha	64.501 Ha	71.000 Ha		Dinbun
x.	Jumlah akseptor pada optimalisasi IB dan INKA	347.000 Akseptor	707.000 Akseptor	1.910.000 Akseptor		Dinnak Keswan
y.	Jumlah LM3 (Kelompok) & Sarjana Membangun Desa (SMD) dalam pengembangan agribisnis	90 Kelp & 70 Orang	147 Kelp & 120 Orang	285 Kelp & 250 Orang		Dinnak Keswan
z.	Jumlah kelompok Pengembangan budidaya ternak Perah	4 Kelompok	9 Kelompok	45 Kelompok		Dinnak Keswan

No	Indikator	Acuan Dasar (2010)	Saat ini (2011)	Target RAD-PG s/d (2015)	Status Capaian	Sumber Data
aa.	Jumlah kelompok Pengembangan budidaya ternak sapi potong/kerbau	15 Kelompok	88 Kelompok	403 Kelompok		Dinnak Keswan
bb.	Jumlah kelompok Pengembangan budidaya kambing / domba	29 Kelompok	55 Kelompok	166 Kelompok		Dinnak Keswan
cc.	Jumlah kelompok Pengembangan budidaya perunggasan	9 Kelompok	32 Kelompok	135 Kelompok		Dinnak Keswan
dd.	Jumlah kelompok Pengembangan budidaya aneka ternak (kelompok)	2 Kelompok	6 Kelompok	30 Kelompok		Dinnak Keswan
ee.	Jumlah produksi semen beku melalui optimalisasi BIB utk sapi & kambing	197.919 Straw	477.919 Straw	1.870.000 Straw		Dinnak Keswan
ff.	Jumlah produksi perikanan tangkap untuk laut dan darat	231.119 Ton	435.322 Ton	1.052.514 Ton		Dinlutkan
gg.	Volume produksi perikanan budidaya	189.949 Ton	392.473 Ton	1.152.659 Ton		Dinlutkan
hh.	Rata-rata konsumsi ikan per kapita provinsi	12,93 kg/kap/th	13,24 kg/kap/th	14,54 kg/kap/th		Dinlutkan
ii.	Jumlah lokasi pelaksanaan GEMARIKAN	7 Lokasi	8 Lokasi	16 lokasi		Dinlutkan
jj.	Jumlah penyuluh pertanian, perikanan & kehutanan	3.254 Penyuluh	3.254 Penyuluh	4.419 Penyuluh		Set Bakorluh
Keterangan : Sudah tercapai       Akan tercapai       Perlu perhatian khusus						

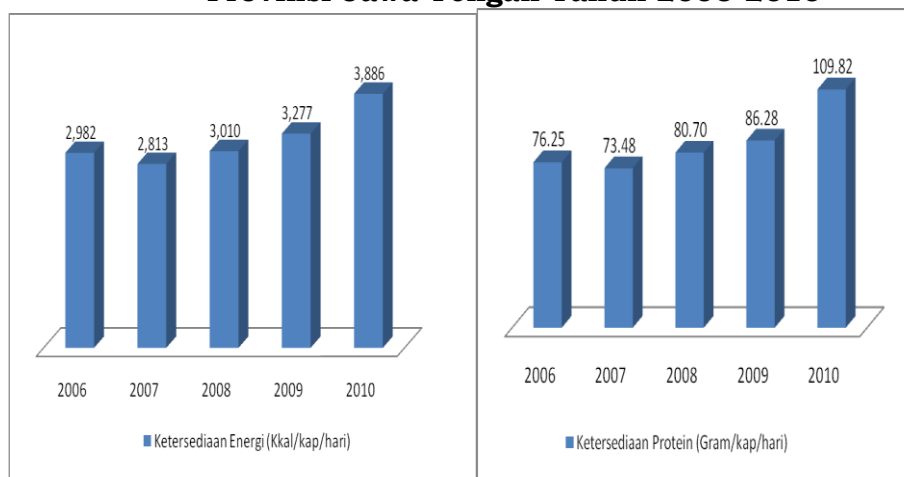
Kondisi Aksesibilitas Pangan di Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut :

### 2.1.2.1 Pengembangan Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan sebagai salah satu subsistem ketahanan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan mencerminkan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat yang merupakan produksi daerah dengan mempertimbangkan penggunaan untuk bibit/benih, industri, kehilangan/susut, ekspor dan stock ditambah impor.

Ketersediaan pangan wilayah disajikan dalam Neraca Bahan Makanan (NBM), menggambarkan secara menyeluruh tentang situasi pengadaan/penyediaan pangan (*food supply*) dan penggunaan pangan (*food utilization*) hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah (Negara/Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam suatu kurun waktu tertentu (satu tahun). Berdasarkan analisis NBM tahun 2006 - 2010, angka ketersediaan energi dan protein di Provinsi Jawa Tengah tercantum pada Gambar 6.

**Gambar 6. Capaian Ketersediaan Energi dan Protein Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2010**

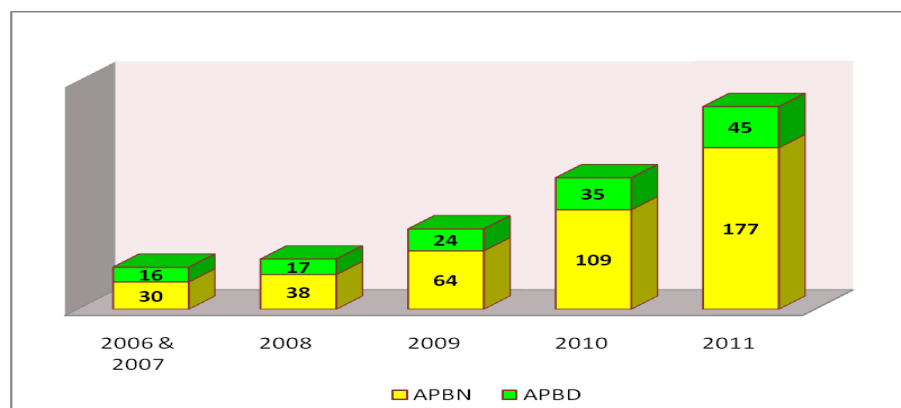


Sumber : BKP Provinsi Jawa Tengah

Tren ketersediaan energi dan protein di Jawa Tengah dari tahun 2006-2010 mengalami peningkatan. Rata-rata ketersediaan energi sebesar 3.194 kkal/kap/hari dan protein 85,31 gr/kap/hari dengan pertumbuhan ketersediaan energi 7,20% per tahun dan protein 10,10% per tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan standar yang ditetapkan pada WKNPG VIII tahun 2004 (ketersediaan energi 2.200 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 57 gr/kap/hari).

Untuk meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat Jawa Tengah dikembangkan program aksi Desa Mandiri Pangan yang dilaksanakan sejak tahun 2006 yang didanai APBN dan APBD Provinsi. Sampai saat ini sudah tergarap 222 desa di 31 Kabupaten/Kota (Gambar 7). Tujuan program ini untuk memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan potensi yang ada guna memenuhi kebutuhan pangan mereka secara mandiri. Sampai tahun 2011, pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan telah memberikan dampak yang cukup signifikan seperti: peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dengan mengembangkan usaha ekonomi produktif kelompok sebanyak 59 kelompok, pemberian stimulan ternak dan alat paska panen pada kelompok afinitas.

**Gambar 7. Jumlah Desa Mandiri Pangan di Jawa Tengah Tahun 2006-2010.**



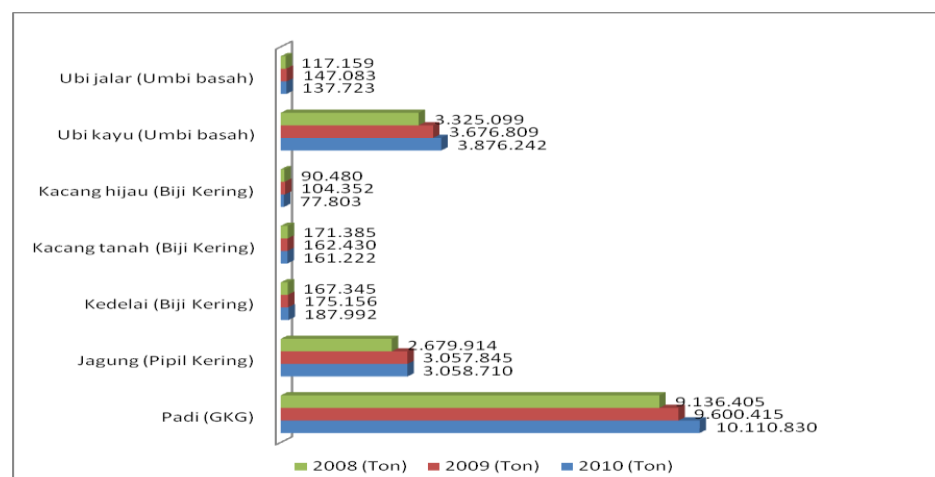
Sumber : BKP Provinsi Jawa Tengah

Ketersediaan pangan di Jawa Tengah dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi bahan pangan di Jawa Tengah; (2) pasokan pangan dari luar Jawa Tengah, dan (3) cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. Sebagai provinsi yang memiliki lahan pertanian yang subur, Jawa Tengah mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduknya. Produksi bahan pangan di Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut :

### 1) Produksi tanaman pangan

Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu penyangga pangan nasional (tahun 2010 kontribusi beras sebesar 15,22 %). Perkembangan produksi tanaman pangan Jawa Tengah tahun 2008–2010 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,34% per tahun (Gambar 8). Penurunan produksi kacang tanah dan kacang hijau disebabkan adanya anomali iklim yang terjadi di Jawa Tengah (tahun 2009 – 2010 terjadi hujan sepanjang tahun) sehingga lahan yang biasanya ditanami palawija/kacang-kacangan menjadi ditanami padi.

**Gambar 8. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010**

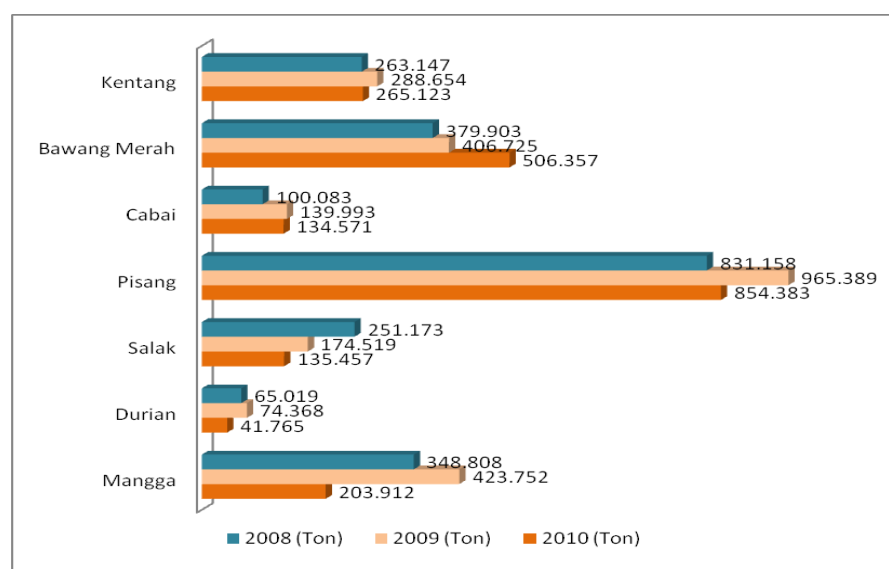


Sumber : *Dinpertan TPH Jateng (2008-2010)*

## 2) Produksi Tanaman Hortikultura

Jawa Tengah sangat potensial untuk pengembangan tanaman hortikultura, kondisi ini didukung dengan agroklimat dan agroekosistem yang sesuai. Dalam rangka meningkatkan kualitas produksi tanaman hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasar, hingga tahun 2011 telah dilakukan berbagai upaya seperti: penggunaan bibit unggul, penerapan *GAP* dan *SOP*, juga pemanfaatan teknologi pertanian sederhana. Perkembangan produksi tanaman hortikultura di Jawa Tengah Tahun 2008–2010 dapat dilihat pada Gambar 9.

**Gambar 9 . Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010**



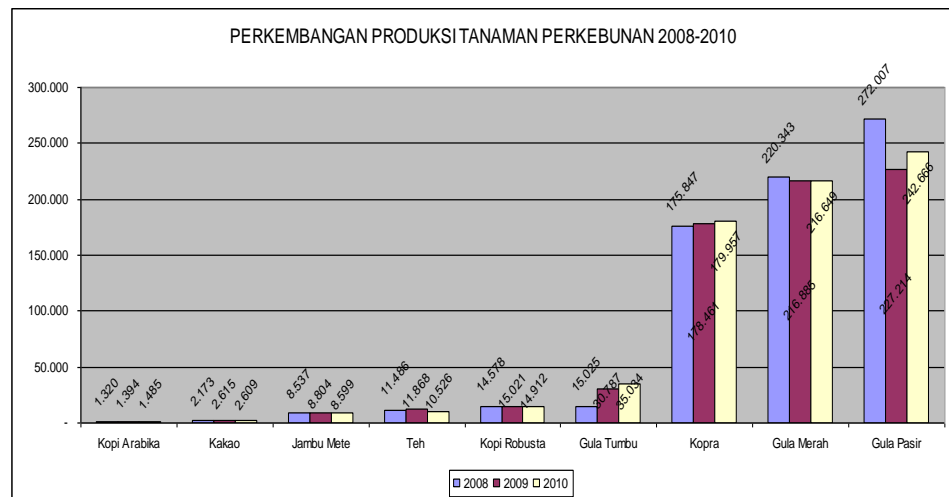
Sumber : *Dinpertan TPH Jateng (2008-2010)*

## 3) Produksi Hasil Perkebunan

Produksi perkebunan komoditas utama tanaman pangan Jawa Tengah tahun 2008-2010 yang terdiri dari tebu, kelapa, kopi, kakao, teh dan jambu mete, disajikan dalam Gambar 10.



**Gambar 10. Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan untuk Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010**



Sumber : Statistik Perkebunan tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa komoditas tebu dalam bentuk olahan gula pasir pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 15.452 ton dibandingkan tahun 2009, sedangkan dalam bentuk gula tumbu mengalami kenaikan 4.247 ton dibandingkan tahun 2009. Produksi tanaman kelapa dalam bentuk olahan gula merah pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 36 ton dibandingkan tahun 2009, sedangkan dalam bentuk kopra meningkat 496 ton dibandingkan tahun 2009.

Dalam rangka mendukung tercapainya swasembada gula baik nasional maupun provinsi, dilakukan upaya-upaya antara lain revitalisasi pabrik gula, perluasan areal tanam tebu dan perbaikan di bidang *on farm* dan *off farm*. Saat ini pabrik gula yang ada di Jawa Tengah sebanyak 13 pabrik yang beroperasi. Dari jumlah tersebut, 8 pabrik beroperasi tetapi produksinya kurang optimal sehingga perlu dilakukan revitalisasi sarana produksi yaitu dengan mengganti mesin baru agar proses produksinya lebih cepat, sehingga kuantitas dan kualitas produksinya meningkat; sedangkan 5 (lima) pabrik gula yang produksinya optimal adalah PG Trangkil (Pati), PG Pakis Baru (Pati), PG Cepiring

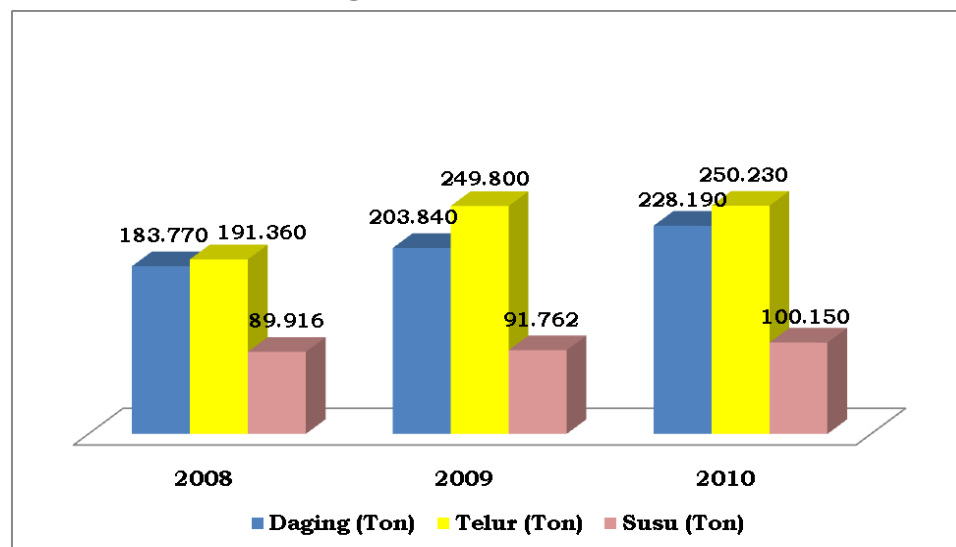
(Kendal), PG Mojo (Sragen) dan PG Sumber Harjo (Pemalang).

Areal tanaman tebu di Jawa Tengah seluas 60.400 ha sehingga masih perlu perluasan untuk tanaman seluas 6.600 ha. Untuk mendorong percepatan peningkatan produksi gula tebu berbagai upaya telah dilakukan, yakni: di bidang *on farm*, berupa penataan varietas unggul baru, pola usaha tani tebu sesuai baku teknis dengan mengoptimalkan pemanfaatan fasilitasi yang diberikan pemerintah; bidang *off farm*, bersama PG dalam rangka efisiensi mesin pabrik gula dengan meminimalisasi jam berhenti giling, meningkatkan kapasitas giling, revitalisasi pabrik dan meningkatkan kualitas serta kapabilitas SDM dan kelembagaan. Selain itu, membangun kemitraan antara pabrik gula dengan petani tebu yang menghasilkan *win-win solution*; mendukung pendirian dua pabrik gula baru, yakni di Blora dan Purbalingga oleh investor.

#### **4) Produksi Peternakan**

Produksi hasil ternak di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2008–2010 mengalami peningkatan. Produksi daging meningkat rata-rata 11,43% per tahun, telur 15,36% per tahun, dan susu 5,60% per tahun. Perkembangan produksi hasil ternak di Jawa Tengah tahun 2008–2010 dapat dilihat pada Gambar 11.

**Gambar 11. Perkembangan Produksi Hasil Ternak di Jawa Tengah Tahun 2008-2010**



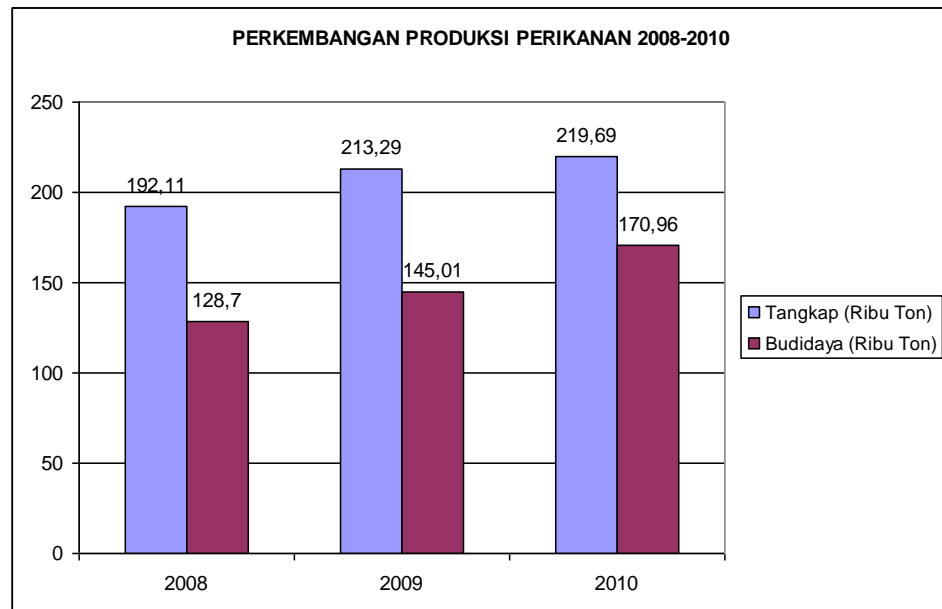
Sumber : Statistik Peternakan Jateng 2011.

Guna mengoptimalkan pencapaian 2 (dua) tujuan pembangunan peternakan yaitu peningkatan penyediaan pangan hewani yang ASUH dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melengkapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dengan 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (UPTD)/Balai, yaitu BIB yang berfungsi menghasilkan benih (semen beku) untuk keperluan inseminasi buatan (kawin suntik), BPBTR yang berfungsi menghasilkan bibit dan bakalan ternak sapi potong, sapi perah, kambing dan BAH berupa susu sapi dan kambing, BPBTNR yang berfungsi menghasilkan bibit ternak ayam, itik, kelinci serta produk hasil ternak berupa ayam siap potong dan telur (ayam dan itik), Bapel Keswan yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan hewan melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, Bapel Kesmavet yang berfungsi melakukan pengujian BAH dan HABAH agar aman dikonsumsi masyarakat, BPSDMNak yang berfungsi menyelenggarakan kursus dan pelatihan bagi masyarakat guna peningkatan kualitas SDM peternak.

## 5) Produksi Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Jawa Tengah pada tahun 2010, sebesar 219.695,20 ton, meningkat 7,01% dari tahun 2008 sebesar 192.117,80 ton. Produksi perikanan budidaya meningkat 15,28 % dari 128.705,80 ton pada tahun 2008 menjadi 170.963,05 ton pada tahun 2010. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat nelayan melalui Pemerintah Pusat telah diberikan bantuan kapal penangkap ikan dengan kapasitas diatas 30 GT sebanyak 100 unit, telah terealisasi 6 unit pada tahun 2010 dan 27 unit pada tahun 2011. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan karena dapat beroperasi pada *fishing ground* dengan potensi ikan yang masih melimpah.

**Gambar 12. Perkembangan Produksi Perikanan di Jawa Tengah Tahun 2008-2010**



Sumber: Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah

### 2.1.2.2 Pengembangan Sistem Distribusi dan Akses Pangan serta Stabilitas Harga Pangan

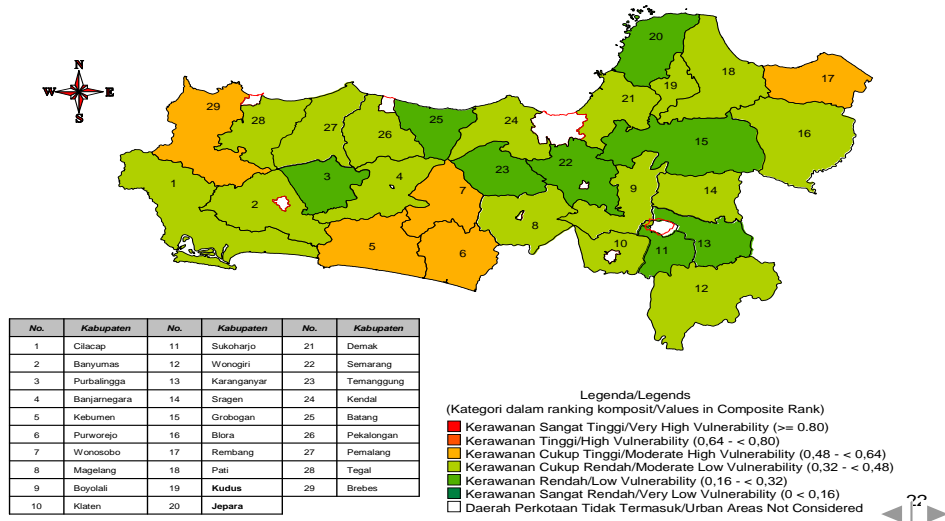
Berdasarkan data base *Food Insecurity Atlas (FIA)* tahun 2008 (Gambar 13) dan database *FSVA* tahun 2009 (Gambar 14) dan tahun 2010 (Gambar 15), dapat dilihat perkembangan

peningkatan ketahanan pangan di Jawa Tengah. Pada tahun 2010 (Gambar 15) sebagian besar kabupaten di Jawa Tengah dalam kondisi sangat tahan pangan. Perkembangan ketahanan pangan dalam kurun waktu 2008-2010 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari hasil pemetaan kerawanan pangan secara komposit di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 terdapat 5 (lima) kabupaten dengan kerawanan pangan cukup tinggi yaitu di Kabupaten Brebes, Rembang, Wonosobo, Purworejo dan Kebumen. Kerawanan pangan cukup rendah terjadi di 16 kabupaten (Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Magelang, Klaten, Boyolali, Sragen, Wonogiri, Demak, Kudus, Pati, dan Blora), sedang tingkat kerawanan pangan rendah terdapat di 8 kabupaten (Jepara, Grobogan, Karanganyar, Sukoharjo, Semarang, Temanggung, Batang dan Purbalingga). Penyebab utama terjadinya kerawanan pangan di Jawa Tengah diindikasikan dengan masih banyaknya penduduk miskin dan rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik. Dengan demikian kerawanan pangan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah bukan disebabkan ketersediaan pangan yang tidak memadai.

Kerawanan pangan wilayah adalah kondisi dimana pada wilayah tersebut sebagian rumah tangga penduduknya tidak dapat memenuhi 70 % kecukupan energi dan protein untuk pertumbuhan fisiologis normal. Dengan demikian wilayah berkecukupan pangan masih mempunyai potensi rumah tangga yang penduduknya rawan pangan. Istilah kerawanan pangan *tidak berarti terjadi kekurangan pangan* dalam wilayah itu.

**Gambar 13. Peta Komposit Kerawanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008**



Sumber : BKP Provinsi Jawa Tengah

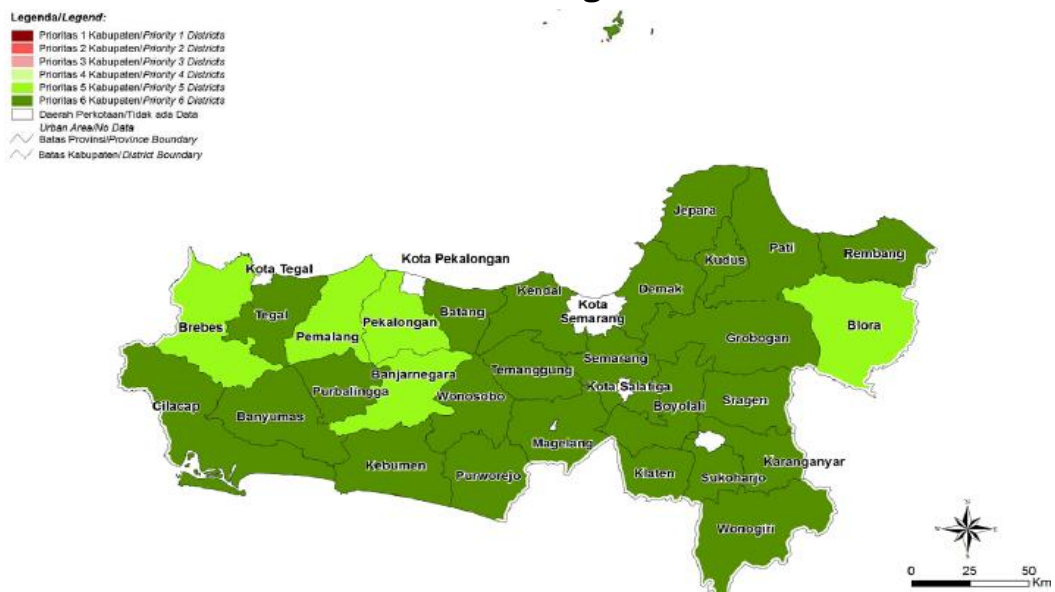
Pemetaan kerawanan pangan Tahun 2009 menggunakan 13 indikator yaitu: rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih per kapita, penduduk dibawah garis kemiskinan, rumah tanpa akses listrik, desa tanpa akses jalan, perempuan buta huruf, Angka Harapan Hidup, berat badan balita, akses rumah tangga dengan fasilitas kesehatan, akses air bersih pada rumah tangga, deforestasi hutan, persentase daerah puso, kejadian bencana alam dan fluktuasi curah hujan.

Berdasar hasil analisis peta *FSVA* tahun 2009 pada Gambar 14, terlihat bahwa faktor ketahanan pangan di 5 kabupaten adalah :

- 1) Kabupaten Banjarnegara terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai yaitu: kurangnya akses listrik dan kurangnya akses jalan.
- 2) Kabupaten Blora beberapa hal yang perlu diwaspadai yaitu: kurangnya akses listrik dan banyaknya perempuan buta huruf.

- 3) Kabupaten Pekalongan beberapa hal yang perlu diwaspadai yaitu: kurangnya akses listrik, banyaknya perempuan buta huruf dan kurangnya berat badan balita.
- 4) Kabupaten Pemalang beberapa hal yang perlu diwaspadai yaitu: kurangnya akses listrik, dan kurangnya berat badan balita.
- 5) Kabupaten Brebes beberapa hal yang perlu diwaspadai yaitu: kurangnya akses listrik, banyaknya perempuan buta huruf dan kurangnya berat badan balita.

**Gambar 14. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009**



Sumber : BKP Provinsi Jawa Tengah

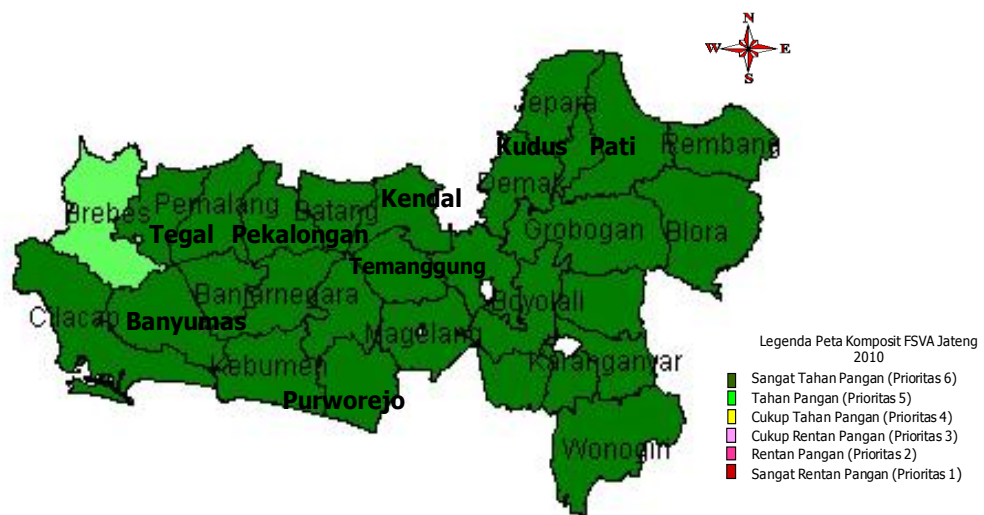
Berdasarkan analisis FSVA 2010 (Gambar 15), diketahui bahwa secara makro di Jawa Tengah telah terjadi peningkatan ketahanan pangan hal ini terlihat bahwa 28 Kabupaten dalam kondisi *sangat tahan pangan* (hijau tua). Kabupaten Brebes masih dalam kondisi *tahan pangan* (hijau muda) yang disebabkan oleh :

- 1) Persentase perempuan buta huruf (sebagian besar perempuan lanjut usia) masih tinggi, yaitu sebesar 21,78%, lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi (5,75%).

2) Angka harapan hidup yang masih rendah yaitu 67,08 tahun, dibawah angka rata-rata harapan hidup Provinsi (72,12 tahun).

Meskipun Kabupaten Brebes mendasarkan peta FSVA tahun 2008–2010 telah mengalami kemajuan, namun demikian masih perlu mendapatkan perhatian terutama pada indikator perempuan buta huruf dan angka harapan hidup.

**Gambar 15. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010**



Sumber : BKP Provinsi Jawa Tengah

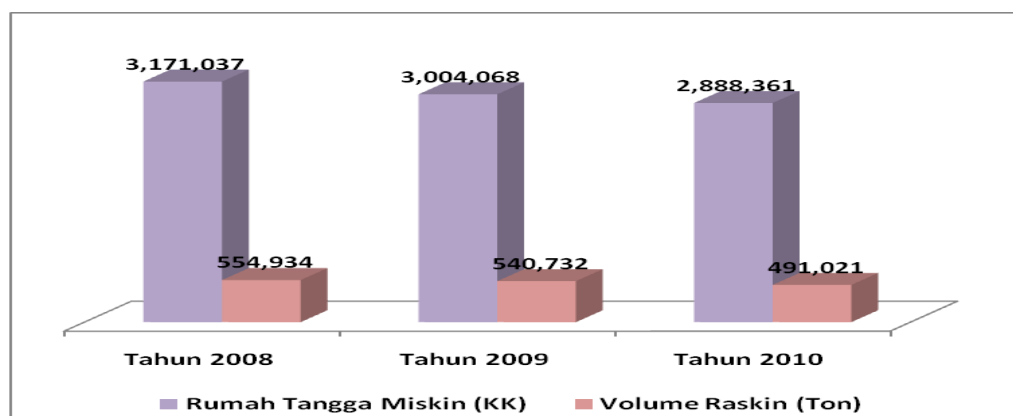
Kelancaran pasokan pangan antar wilayah, antar waktu menjadi fokus dalam kebijakan Jawa Tengah untuk mengembangkan sistem distribusi pangan dan menjaga stabilitas harga pangan agar terjangkau bagi masyarakat. Selama tahun 2008-2010 dari total produksi beras Jawa Tengah, jumlah beras yang terdistribusikan ke luar Jawa Tengah tahun 2008 sebanyak 292.236 ton; tahun 2009 sebanyak 411.579 ton dan tahun 2010 sebanyak 414.575 ton.

Harga pangan utama/strategis di Jawa Tengah kurun waktu 2008-2010 relatif stabil sepanjang waktu. Kenaikan harga pangan sebesar 10-15% yang masih dalam batas kewajaran, terjadi hanya pada saat-saat tertentu, seperti pada saat hari-hari besar keagamaan, hari-hari besar nasional dan pada musim hajatan masyarakat.



Peningkatan akses pangan bagi rumah tangga miskin telah dilakukan melalui berbagai program di antaranya : Padat karya pangan dan subsidi/bantuan pangan dari pemerintah berupa Beras Bersubsidi (Raskin) untuk rumah tangga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan. Penyediaan dan penyaluran Raskin untuk RTS dilakukan oleh BULOG. Perkembangan jumlah RTS penerima raskin (Gambar 16), mengindikasikan bahwa RTS penerima Raskin setiap tahun telah mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,56 %.

**Gambar 16. Perkembangan RTS penerima Raskin Tahun 2008-2010**



Sumber data: BULOG Divre Jawa Tengah

Kebijakan lain untuk stabilisasi harga adalah pengembangan cadangan pangan yang dimiliki pemerintah. Selain digunakan untuk operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga, CBP juga digunakan untuk mengatasi kekurangan pangan yang terjadi sebagai akibat bencana alam.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008, Pengembangan cadangan pangan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan membentuk Balai Pengembangan Cadangan Pangan dibawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan. Sampai saat ini cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih berupa beras. Jumlah cadangan pangan pada tahun 2010 sebesar 110 ton GKG setara dengan 70,196 ton beras, meningkat 8,38% dari tahun 2009 sebesar 102 ton GKG setara 64.770 ton beras. Cadangan

pangan tersebut disimpan pada gudang LDPM yang telah terpilih di 3 wilayah, yaitu Magelang 32 ton GKG, Purbalingga 38 ton GKG, dan untuk cadangan pangan masyarakat Karimunjawa dan wilayah di sekitar Jepara sebanyak 40 ton GKG. Kondisi cadangan pangan Pemerintah Jawa Tengah tahun 2010 ini masih jauh di bawah standar cadangan pangan pemerintah provinsi sebesar 200 ton. Sedangkan cadangan pangan yang telah dikelola oleh Perum BULOG Divre Jawa Tengah yaitu dengan pengadaan pangan (beras) pada tahun 2008 sebesar 531.644 ton, tahun 2009 sebesar 649.532 ton dan tahun 2010 sebesar 305.384 ton.

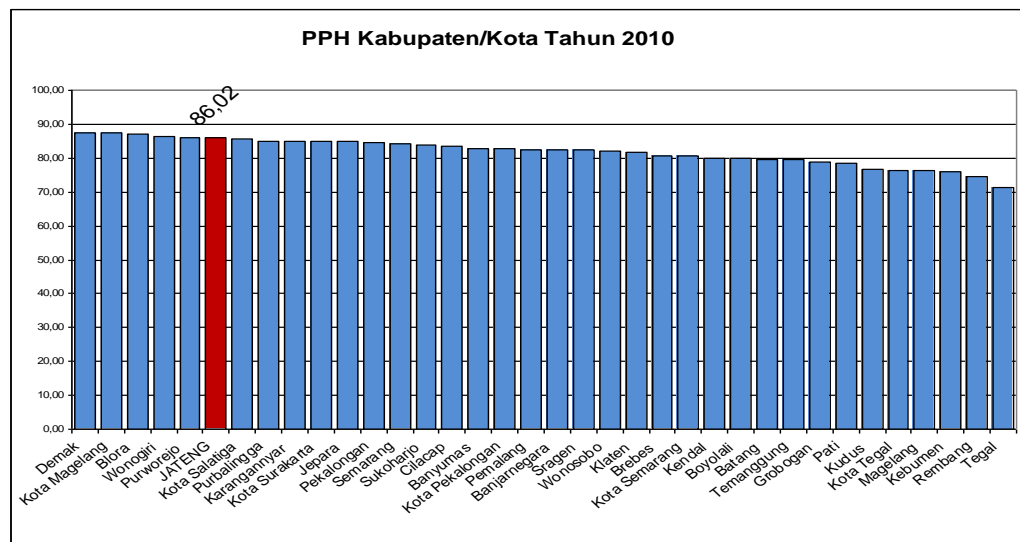
Untuk meningkatkan cadangan pangan dan menjamin stabilitas harga pangan di masyarakat telah dikembangkan lumbung pangan. Fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan fisik lumbung, lantai jemur, peralatan, pengisian cadangan pangan dan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan. Lumbung pangan di Jawa Tengah setiap tahun telah direvitalisasi, sampai dengan tahun 2009 yang telah direvitalisasi sejumlah 151 lumbung dan sampai dengan tahun 2010 sejumlah 186 lumbung pangan. Secara keseluruhan sampai dengan tahun 2011 jumlah lumbung pangan di 29 Kabupaten dan 1 Kota (Kota Semarang) sebanyak 1.220 lumbung, dengan anggota per kelompok sebanyak 40 orang. Rata-rata stok cadangan pangan beras di setiap lumbung pangan sebanyak 3 ton, sehingga dapat mendukung ketersediaan cadangan pangan beras yang ada di lumbung pangan masyarakat sebesar 3.360 ton yang dimanfaatkan pada musim paceklik.

### 2.1.2.3 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif yang dapat dilihat melalui skor PPH.

Skor PPH penduduk Jawa Tengah menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2008 mencapai skor 80,9 meningkat pada tahun 2009 menjadi 82,08 dan pada tahun 2010 skor PPH telah mencapai 86,02 (Gambar 17). Di antara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, skor PPH tertinggi dicapai Kabupaten Demak, sedangkan skor PPH terendah di Kabupaten Tegal.

**Gambar 17. Skor Pola Pangan Harapan Jawa Tengah Tahun 2010**



Sumber : BKP Provinsi Jawa Tengah

Konsumsi energi dan protein penduduk Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 telah melebihi standart WNPG 2004 (Tabel 3).

**Tabel 3. Konsumsi Energi dan Protein di Jawa Tengah  
Tahun 2008-2010**

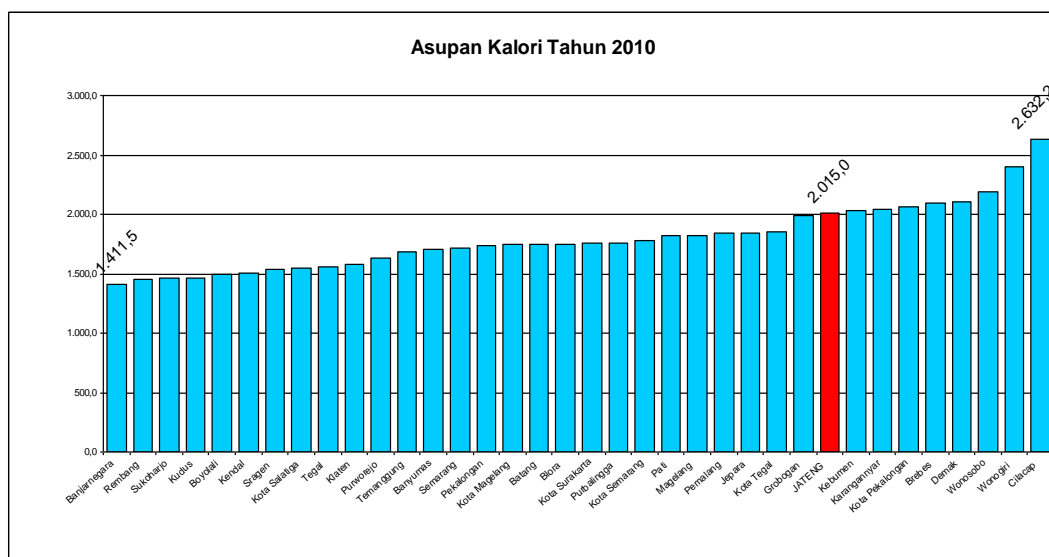
No	Kelompok Pangan	Standar Energi (kkal/kap/hr)	Capaian Energi (kkal/kap/hr)		
			2008	2009	2010
1	Padi-padian	1.000	1.694,90	1.550,30	1.228,82
2	Umbi-umbian	120	78,00	90,70	98,75
3	Pangan hewani	240	158,00	184,00	121,87
4	Minyak dan lemak	200	205,10	210,10	200,00
5	Buah/biji berminyak	60	40,00	45,00	40,00
6	Kacang-kacangan	100	75,00	93,00	99,80
7	Gula	100	99,00	95,00	97,60
8	Sayur dan buah	120	101,00	115,00	113,59
9	Lain-lain	60	13,10	13,60	14,50
	<b>Konsumsi Energi</b> (kkal/kap/hr)	2.000	2.464,10	2.396,70	2.014,93
	<b>Konsumsi Protein</b> (gram/kap/hr)	54,00	55,80	56,12	57,81

Sumber : BKP Provinsi Jawa Tengah

Pada tahun 2010 konsumsi energi penduduk sebesar 2.015 kkal/kap/hari dan konsumsi protein sebesar 57,81 gr/kap/hari dengan kelompok pangan yang perlu ditingkatkan adalah umbi-umbian, buah, sayur serta pangan hewani. Mendasarkan hasil Susenas Tahun 2011, gandum tidak termasuk bahan makanan penting yang dikonsumsi oleh penduduk di Indonesia sehingga belum termasuk dalam perhitungan konsumsi energi dan protein.

Angka rata-rata asupan kalori penduduk tertinggi dicapai Kabupaten Cilacap, sedangkan terendah Kabupaten Banjarnegara. Rata-rata konsumsi energi penduduk kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 18.

**Gambar 18. Asupan Kalori Penduduk Jawa Tengah Tahun 2010**



Sumber: BKP Provinsi Jawa Tengah

Untuk mendorong P2KP berbasis sumber daya lokal, di Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, sebagai penjabaran dan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009. Di tingkat Kabupaten/Kota juga telah dijabarkan dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati/Walikota. Di samping itu dikembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan akademisi di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan pangan lokal di antaranya dengan UNDIP, UNSOED, UNS, UNNES, UNIKA, USM dan AKS. Sebagai upaya promosi percepatan penganekaragaman pangan, telah dilaksanakan berbagai lomba Cipta Menu maupun Festival Pangan berbahan dasar komoditas lokal baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

#### 2.1.2.4 Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Penyuluhan merupakan salah satu bagian dalam proses pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang menjadi acuan dalam penyusunan program di tingkat Kabupaten/Kota agar terintegrasi dan terfokus. Tahun 2010 Jawa Tengah memiliki

Balai Penyuluh sebanyak 447 Unit, dengan total tenaga penyuluh sejumlah 3.254 orang terdiri dari penyuluh pertanian sebanyak 2.352 orang, penyuluh perikanan 227 orang dan penyuluh kehutanan sebanyak 675 orang.

### 2.1.3. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Status pencapaian peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dalam rangka meningkatkan cakupan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat dan produk P-IRT tersertifikasi seperti terlihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Status Capaian Pembangunan Pilar Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan**

No	Indikator	Acuan Dasar (2010)	Saat ini (2011)	Target RAD-PG s/d 2015	Status Capaian	Sumber Data
<b>Target Keluaran : Meningkatnya cakupan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat dan produk P-IRT tersertifikasi</b>						
<b>3</b>	<b>Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan</b>					
a.	Jumlah sampel makanan yang mengandung bahan berbahaya (uji AB, pestisida dan formalin)	10 % dari 3.750 sampel	10% dari 4000 Sampel	10 % dari 6000 sampel		Dinnak-Keswan
b.	Persentase makanan yg mengandung cemaran bahan berbahaya/ dila-rang	15,74%	10.0%	6.0%		Balai Besar POM
c.	Jumlah sarana distribusi yang diawasi, dalam rangka pengawasan produk & bahan berbahaya	13 Sarana	22 Sarana	50 sarana		Dinperindag
d.	Jumlah produsen bahan pangan asal hewan yang mempunyai ijin operasional	22 unit	27 unit	53 unit		Dinnak-Keswan
e.	Jumlah tenaga PKP dan DFI	PKP :85 DFI 66	-	295 276		Pemda Kab/Kota
f.	Persentase sampel pangan yang menggunakan bahan tambahan pangan yang melebihi dosis	12.70%	9.90%	8.00%		Balai Besar POM

No	Indikator	Acuan Dasar (2010)	Saat ini (2011)	Target RAD-PGs/d 2015	Status Capaian	Sumber Data
g.	Jumlah industri rumah tangga yang mendapatkan penyuluhan	1.050 IRTP	1.290 IRTP	1.590 IRTP		Balai Besar POM
h.	Jumlah Industri Rumah Tangga dimonitoring dan diverifikasi penerapan CPPB	350 IRTP	430 IRTP	730 IRTP		Balai Besar POM
i.	Jumlah kantin sekolah yang sudah mendapatkan pembinaan keamanan pangan	0	22 sekolah	93 sekolah		Balai Besar POM
j.	Jumlah kantin sekolah yang dilatih dan difasilitasi penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan di kantin sekolah	6 SD/MI	10 SD/MI	60 SD/MI		BKP
k.	Persentase PJAS yang tidak memenuhi syarat	19,02%	30%	20%		Balai Besar POM
l.	Jumlah SD/MI dan SMP/MTs yang mendapat bantuan kantin sehat	0	0	520 sekolah		Dinas Pendidikan
m.	Jumlah agroindustri yang menerapkan GAP	0	0	6		Dinas Pertanian dan TPH
n.	Jumlah kelompok tani yang menerapkan GAP	0	0	10		Dinas Pertanian dan TPH
o.	Jumlah usaha pembudidaya ikan tersertifikasi	40	115	415		Dinas Kelautan dan Perikanan
p.	Jumlah UPI yang mempunyai SKP	27	47	115		Dinas Kelautan dan Perikanan
<p>Keterangan:</p> <p> Sudah tercapai       Akan tercapai       Perlu perhatian khusus</p>						

Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dilaksanakan melalui upaya peningkatan keamanan pangan yang terdiri atas pengawasan pangan yang beredar, pengawasan PJAS, pembinaan IRTP, peningkatan jumlah tenaga PKP dan tenaga DFI

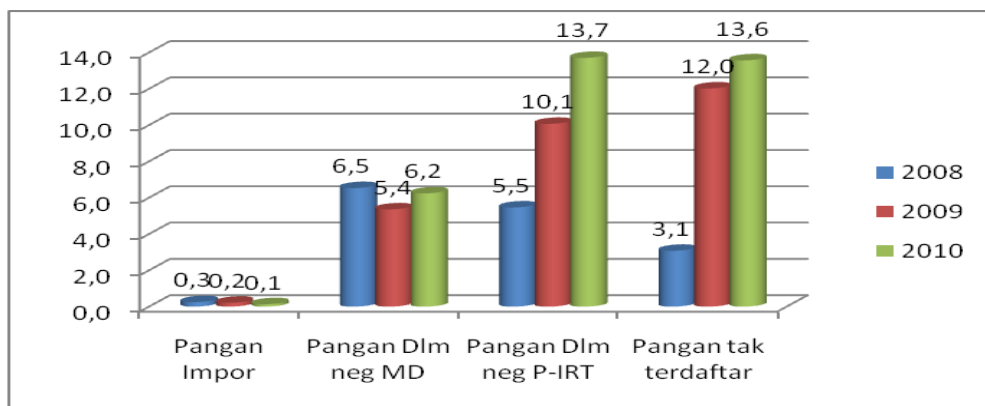
di daerah. Kondisi umum pengawasan mutu dan keamanan pangan di Jawa Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 2.1.3.1 Pengawasan pangan yang beredar di Jawa Tengah

Pengawasan keamanan dan mutu pangan dilaksanakan oleh Balai Besar POM yang mencakup pengawasan terhadap pangan olahan dalam negeri maupun pangan impor yang beredar di pasaran. Jenis sampel pangan dapat dikategorikan sebagai pangan olahan impor dengan kode Registrasi ML, pangan olahan dalam negeri dengan kode Registrasi MD, pangan olahan dalam negeri dengan kode Registrasi P-IRT, dan pangan olahan yang tidak memiliki kode Registrasi.

Dari pengawasan produk pangan yang beredar di masyarakat tahun 2008, 2009 dan 2010 berupa sampling dan pengujian di laboratorium, diperoleh hasil uji seperti tampak pada Gambar 19.

**Gambar 19. Profil Persentase Hasil Uji Pangan Tidak Memenuhi Syarat Berdasar Asal Sampel**



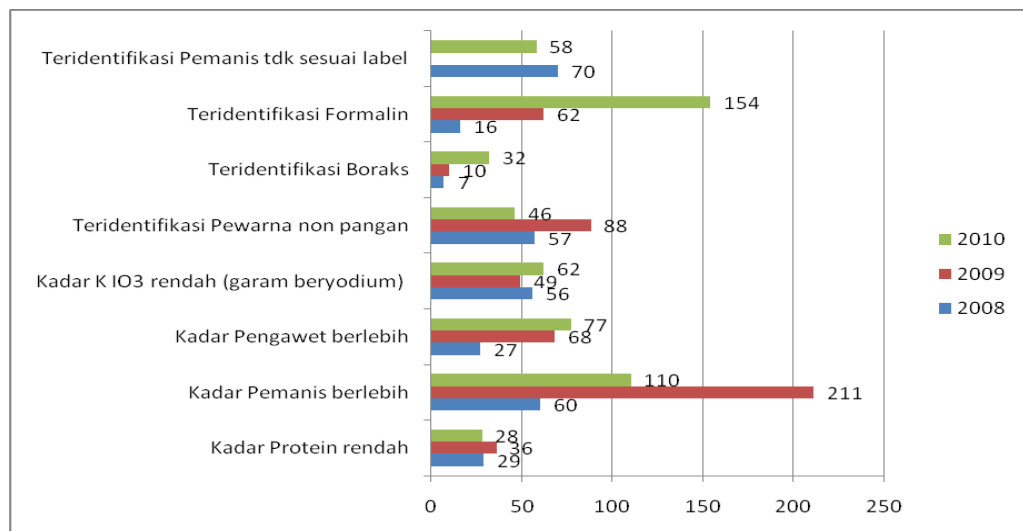
Sumber: Balai Besar POM Provinsi Jawa Tengah

Gambar 19 menunjukkan bahwa jumlah pangan yang tidak memenuhi syarat kategori P-IRT serta pangan yang tak terdaftar mengalami peningkatan. Hal ini perlu mendapat perhatian karena peredaran produk tersebut jumlahnya makin meningkat serta lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat di hampir semua strata ekonomi.



Dari pengujian sampel pangan yang dilakukan di laboratorium tersebut, terdapat parameter uji yang cenderung meningkat jumlahnya. Parameter uji yang mengalami peningkatan antara lain penyalahgunaan formalin, penyalahgunaan boraks serta penggunaan pemanis dan pengawet yang melebihi batas maksimal yang diijinkan seperti yang terlihat pada gambar 20. Kondisi ini cukup memprihatinkan karena dimungkinkan kurangnya kepedulian dan kesadaran pelaku usaha atau produsen serta kurangnya pembinaan dan pengawasan dari petugas pengawas pangan di kabupaten/kota setempat. Mendasarkan hal tersebut, kedepan akan dilakukan kegiatan pengawasan produk pangan dan bahan berbahaya.

**Gambar 20. Profil Jumlah Pangan Tidak Memenuhi Syarat Berdasar Parameter Uji**



Sumber : Balai Besar POM Provinsi Jawa Tengah

Di samping itu Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah juga telah melakukan pengambilan sampel dan pengujian mutu pangan terhadap komoditas beras *movnas*, beras cadangan pangan, beras BULOG Wonosobo, karak, ketela pohon, minyak goreng Bogamas, susu dari peternak di Boyolali, jagung dalam bentuk: H1 panen, sekelan putih, sekelan kuning, jagung para-para dengan hasil pada Tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Pengujian Mutu Pangan yang dilakukan Bidang Keamanan Pangan BKP Prov Jateng**

No	Komoditas yang Diuji	Hasil	Ket
1	Beras Movnas dari gudang Wonosobo	Terdeteksi clorin 0,029 ppm	Tidak berbahaya
2	Beras cadangan pangan BKP Prov Jateng	Terdeteksi clorin 0,070 ppm	Tidak berbahaya
3	Beras Bulog Wonosobo	Terdeteksi: Klorin (Cl) 0,045 ppm Timbal (pb) 0,17 ppm	Tidak berbahaya
4	Karak	Terdeteksi : Timbal (pb) = 1,0 mg/kg Tembaga (Cu) = 2,0 mg/kg Raksa (Hg) = 0,007 mg/kg Arsen (As) = < 0,3 mg/kg Kapang = 4,0 koloni/g	Tidak berbahaya
5	Ketela pohon	Terdeteksi: Timbal (Pb) = < 0,1 mg/kg	Tidak berbahaya
6	Minyak goreng Bogamas	Terdeteksi cemaran: Tembaga 0,22 mg/kg	Tidak berbahaya
7	Susu dari Peternak di Boyolali	Hasil analisa: Berat jenis <sup>**</sup> : 1,027 Total Solid <sup>**</sup> : 10,25 – 10,80 % Kadar Lemak: 3,9 % Kadar Protein: 3,48 % Angka kuman: 61,67 X 10 <sup>3</sup> /ml	<b>**</b> ) = Tidak memenuhi SNI No. 01-3141-1998 tentang Mutu Susu Segar
8	Jagung dalam bentuk: - H1 panen - Sekelan putih - Sekelan kuning - Jagung para-para - Jagung H5	Tidak terdeteksi aflatoksin	Tidak berbahaya

Sumber: BKP Provinsi Jawa Tengah

Terkait dengan pengawasan bahan pangan asal hewan dilakukan pengawasan pada bahan pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya melalui pengambilan sampel produk hewani oleh Bapel Kesmavet. Selain melakukan pengambilan sampel secara aktif, Bapel Kesmavet juga menerima pemeriksaan sampel secara pasif yang diajukan oleh pemilik unit usaha produk hewani yang ingin memeriksakan produknya. Pengujian yang dilakukan adalah uji cemaran mikroba, residu antibiotik, residu pestisida, cemaran logam berat, formalin dan sebagainya.

Pada tahun 2010 telah diperiksa sebanyak 3.750 sampel dari berbagai jenis produk pangan hewani dengan berbagai jenis

pengujian. Hampir semua sampel yang diperiksa menunjukkan hasil negatif. Pada tahun-tahun selanjutnya jumlah sampel yang diperiksa akan meningkat, mengingat jumlah dan jenis pangan hewani semakin meningkat dan beragam.

Sehubungan dengan semakin merebaknya peredaran produk pangan di pasaran dengan berbagai jenis diperlukan sebuah fungsi pengawasan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produk pangan pada pasar tradisional dan pasar modern yang memenuhi unsur keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi pemakai atau pengguna.

Fungsi pengawasan ini sangat diperlukan karena kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan atau hal-hal lain yang merugikan.

Sejalan dengan tujuan pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen maka ditetapkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya pemberdayaan konsumen di antaranya melalui peningkatan kesadaran dan ketrampilan untuk melakukan pengawasan barang-jasa beredar terutama barang-barang yang tidak memenuhi standar. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan pada sarana atau tempat penjualan baik pada pasar tradisional, pasar modern maupun tempat-tempat lain yang dianggap perlu. Dalam kaitannya dengan peredaran produk pangan, pengawasan distributor pangan ditujukan pada sarana penjualan dan produk pangan yang menggunakan bahan berbahaya atau yang dilarang.

### **2.1.3.2 Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah**

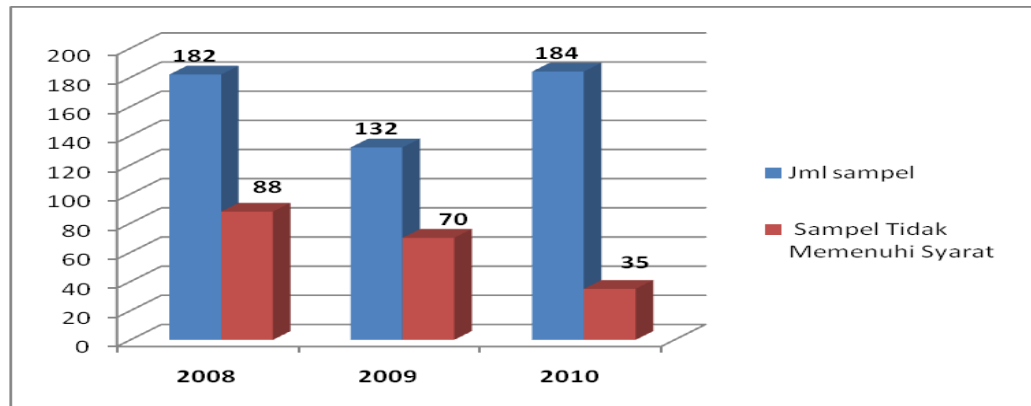
Pada program pengawasan PJAS yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM telah diuji sejumlah sampel dari beberapa sekolah dasar di Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui beberapa sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat. Gambaran kualitas PJAS tahun 2008-2010 pada Gambar 21 menunjukkan jumlah sampel PJAS yang tidak memenuhi syarat label dan mutu pangan. Kategori pangan yang tidak memenuhi syarat mutu meliputi kimia dan mikrobiologi.

Penurunan jumlah sampel PJAS yang tidak memenuhi syarat tahun 2010 dibandingkan tahun 2008 dan 2009 belum bisa disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kualitas PJAS karena sampling dan pengujian yang dilakukan Balai Besar POM tidak dilakukan di semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Dalam rangka meningkatkan keamanan, mutu, gizi pangan jajanan anak sekolah dilaksanakan pula oleh BKP melalui dana APBD berupa pembinaan PJAS untuk sekolah dasar serta pembinaan terhadap petugas yang menangani kantin sekolah. Sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan pembinaan di 12 sekolah dasar sebagai daya ungkit dan rintisan pengawasan PJAS dan kantin sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh BKP berkoordinasi dengan Balai Besar POM.

Selain hal tersebut dilakukan pula kegiatan bimbingan teknis dan monitoring pada kantin sekolah, sehingga akan menghasilkan kantin sekolah yang meningkat mutu dan keamanan pangannya. Sampai dengan tahun 2010 terdapat 3 sekolah (2 SD dan 1 SMP) yang telah mendapatkan piagam bintang keamanan pangan dan 6 SD/MI yang telah mendapat fasilitasi penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan di kantin sekolah.

**Gambar 21. Profil Hasil Uji Sampel PJAS  
Tahun 2008, 2009, dan 2010**



Sumber : Balai Besar POM Provinsi Jawa Tengah

### **2.1.3.3 Kondisi Industri Rumah Tangga Pangan**

Berdasarkan data Balai Besar POM, jumlah IRTP yang telah tersertifikasi di Jawa Tengah tahun 2010 sebanyak 8.810 IRTP tersebar di 35 Kabupaten/Kota dengan 19 jenis produk diantaranya makanan basah/ringan, kecap dan carica. Jenis dan jumlahnya fluktuatif tergantung iklim perekonomian rakyat serta belum terinventarisasi di Kabupaten/Kota. Peran yang dilakukan oleh tenaga PKP dari Dinas Kesehatan dalam pembinaan dan penyuluhan cukup besar, sehingga peran IRTP cukup besar dalam rangka memberikan kontribusi pemenuhan ketersediaan pangan yang aman di daerah.

Dari hasil pengawasan sarana pada IRTP sebagian besar ditemukan sarana yang kurang dalam hal hygiene dan sanitasi, serta masih dijumpai produk IRTP yang belum mempunyai ijin edar, label pangan tidak memenuhi syarat, sarana IRTP belum ada ijin, serta terdapat IRTP yang memproduksi produk merek perusahaan lain. Terhadap temuan tersebut IRTP diperintahkan untuk mengurus ijin serta dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait.

Salah satu usaha pemerintah dalam pengawasan IRTP dilakukan pada sektor peternakan dengan melakukan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang merupakan persyaratan

bagi unit usaha pangan hewani antara lain tempat penampungan susu, kios daging, cold storage dan rumah pemotongan hewan.

Sampai tahun 2010 telah tersertifikasi 22 unit usaha pangan hewani berupa rumah pemotongan hewan, rumah pemotongan unggas, unit usaha pengolahan telur asin, unit usaha retailer/kios daging dan unit usaha pengolahan susu. Pada tahun 2011 telah tersertifikasi sebanyak 5 unit usaha. Target untuk ke depan meningkat sedikit demi sedikit, mengingat banyak unit usaha yang mengajukan, namun hanya sedikit yang mampu memenuhi persyaratan terendah untuk memperoleh sertifikat NKV.

Disamping itu pada Tahun 2010 telah dilakukan penyuluhan keamanan pangan pada 1.050 IRTP, pelatihan design dan implementasi cara produksi produk pangan yang baik bagi 350 IRTP serta monitoring dan verifikasi penerapan CPPB pada 350 IRTP.

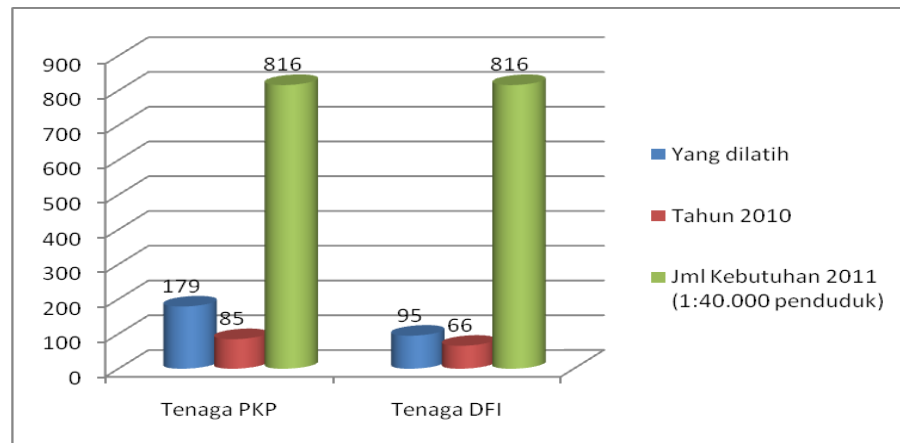
#### **2.1.3.4 Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan dan Tenaga *District Food Inspector* di Daerah.**

Balai Besar POM telah melatih tenaga PKP dan DFI dengan anggaran APBN sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Jumlah tenaga PKP yang dilatih dengan APBN sebanyak 163 orang, sedang tenaga DFI sejumlah 62 orang. Sejak 2007 hingga sekarang kegiatan pelatihan tersebut sudah tidak dialokasikan dari APBN, tetapi dari APBD Kab/kota. Pelatihan PKP dan DFI diselenggarakan bekerja sama dengan Undip dan Lembaga Pengkajian Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 dan 2010 dengan anggaran swadana dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Jumlah tenaga DFI yang dilatih dengan dana swadana sejumlah 33 orang dan PKP 16 orang.

Meningkatnya kebutuhan tenaga PKP dan DFI di Kabupaten/Kota dikarenakan berkurangnya tenaga PKP dan

DFI terlatih akibat pindah tugas atau purnatugas. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengalokasikan anggaran untuk pelatihan PKP dan DFI secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan tenaga PKP dan DFI sesuai dengan proporsi jumlah penduduk 1:40.000. Jumlah tenaga PKP dan DFI Jawa Tengah tampak pada gambar 22.

**Gambar 22. Jumlah Tenaga PKP dan DFI Jawa Tengah**



Sumber: Balai Besar POM Provinsi Jawa Tengah

### 2.1.3.5 Fasilitasi Kantin sehat di SD/MI dan SMP/MTs

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mengurangi bahaya jajanan berbahaya yang beredar bebas di pasaran adalah pemberian advokasi. Kegiatan tersebut menjalankan program nasional, yakni memberikan makanan tambahan sekolah dan menggiatkan usaha kesehatan sekolah. PJAS memegang peranan penting, mengingat dari makanan tersebut anak akan mendapatkan asupan gizi selama sekolah. Untuk itu, perlu gerakan untuk mengamankan generasi muda dari ancaman makanan yang mengandung unsur obat berbahaya akan dilakukan gerakan bersama yang melibatkan stakeholder, konsultan, lembaga donor, serta pihak swasta

Terkait hal di atas diperlukan system jaringan informasi dan komunikasi di lapangan, mengingat data per bulan Desember 2011, Jumlah SD/MI sebanyak 23.526 buah dan SMP/MTs sebanyak 4.296 buah yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota se

Jawa Tengah. Selain itu pembenahan perilaku untuk hidup bersih dan sehat di sekolah harus ditanamkan sejak dini. Data tersebut dibutuhkan untukantisipasi dan menekan angka murid sekolah keracunan jajanan, ke depan akan dilakukan pencaanangan kantin sehat dan gerakan siswa minum susu.

#### **2.1.3.6 Agroindustri dan kelompok tani yang menerapkan *Good Handling Practise***

Penerapan *GHP* dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan dilakukan dikarenakan saat ini produk pertanian semakin banyak dan beragam. Penerapan *GHP* pada proses produksi pertanian sudah mulai dilakukan namun penggunaan alsintan yang mendukung *GHP* baru akan dilakukan mulai tahun 2012, dengan fokus sasaran pada kelompok tani. Sedangkan pada industri pertanian skala besar *GHP* sudah diterapkan secara menyeluruh dari *on farm* sampai *off farm*.

#### **2.1.3.7 Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan**

Untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di Jawa Tengah telah dilakukan upaya-upaya antara lain: penerapan CBIB sejak pemilihan lokasi sampai panen dan mendorong para pelaku usaha memperoleh sertifikat CBIB untuk meningkatkan produktivitas dan jaminan keamanan pangan. Hingga tahun 2011 jumlah usaha pembudidaya ikan yang tersertifikasi baru mencapai 115 unit usaha, yang akan ditargetkan pada tahun 2015 mencapai 415 unit. Selain itu juga diupayakan penerapan *GMP*, *SSOP* dan *HACCP* pada UPI tradisional secara sempurna melalui pendampingan pemerintah sehingga jumlah UPI ekspor dapat meningkat. Sampai tahun 2011 jumlah UPI yang mendapatkan SKP mencapai 47 UPI dan akan terus ditingkatkan. Kegiatan lain yang telah dilakukan adalah pelatihan ketrampilan dalam rangka penganekaragaman





produk olahan hasil perikanan. Hingga tahun 2011 jumlah pengolah ikan skala kecil yang mendapatkan pelatihan ketrampilan pengolahan hasil perikanan baru mencapai 6 unit usaha yang ditargetkan sampai tahun 2015 mencapai 60 unit usaha.

#### 2.1.4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Kondisi masyarakat terkait dengan permasalahan gizi dan penyakit berhubungan erat dengan faktor sosial dan budaya di masyarakat, di antaranya adalah kesadaran masyarakat (individu dan keluarga) untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, termasuk sadar gizi.

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran guna : 1) mencegah timbulnya penyakit dan masalah-masalah kesehatan lain, (2) menanggulangi penyakit dan masalah-masalah kesehatan lain, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, (3) memanfaatkan pelayanan kesehatan, serta (4) mengembangkan dan menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Status pencapaian pembangunan pilar PHBS dapat dilihat pada tabel 6.

**Tabel 6. Status Pencapaian Pembangunan Pilar Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**

No	Indikator	Acuan Dasar (2010)	Saat ini (2011)	Target RAD-PG s/d 2015	Status Capaian	Sumber data
<b>Target Keluaran : Meningkatnya keluarga yang ber-PHBS</b>						
<b>4.</b>	<b>Pilar Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</b>					
a.	Persentase kab kota yang mencapai Rumah Tangga sehat 70%	72,64%	77%	100%		Dinkes
b.	Persentase kab kota yang mempunyai desa siaga aktif (Strata Purnama dan Mandiri) > 30%	70%	100%	100%		Dinkes

No	Indikator	Acuan Dasar (2010)	Saat ini (2011)	Target RAD-PG s/d 2015	Status Capaian	Sumber data
c.	Persentase Kab Kota yang telah mencapai posyandu mandiri 10%	51%	69%	100%		Dinkes
d.	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan PMT-AS	na	5 TP PKK Kec.	97 sekolah di 29 Kab		Dindik
e.	Jumlah sekolah yang peduli terhadap budaya bersih dan sehat	5 sekolah	5 sekolah	40 sekolah		Dindik
f.	Jumlah kaum perempuan dalam penanganan daur ulang sampah, pembuatan kompos dan pemanfaatan pekarangan	100 orang	250 orang	1150 orang		BLH
g.	Jumlah warga masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan penataan lingkungan permukiman	150 orang	200 orang	1650 orang		BLH
h.	Jumlah Anak SD/MI di Desa/Kel miskin/ tertinggal yang mendapat bantuan pemberian makanan tambahan anak sekolah	na	1.440 anak	16.000 anak		Bapermasdes
i.	Jumlah Koordinator Tim PMTAS Kab/Kota, Kec, Desa/Kel dan Kelompok Masyarakat Pengelola PMTAS yang mendapat sosialisasi PMT-AS.	na	0	1.610 orang di 35 Kab/Kota		Bapermasdes
j.	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengelola PMT-AS, TP PKK Kab/Kota dan TP PKK Kec yang mendapat pelatihan Pengolahan Kudapan PMT-AS.	na	0	1.380 orang di 35 Kab/Kota		Bapermasdes
k.	Jumlah PM yang mendapatkan SOSH (25 Balai Rehabilitasi Sosial + 27 Unit Rehabilitasi Sosial)	4.092 orang	4.092 orang	24.752 orang		Dinsos
l.	Jumlah Penjaringan melalui TRC pada PMKS	326 orang	430 orang	2.546 orang		Dinsos
Keterangan : Sudah tercapai       Akan tercapai       Perlu perhatian khusus						

Rumah tangga sehat adalah proporsi rumah tangga yang memenuhi minimal 11 indikator dari 16 indikator PHBS tatanan rumah tangga. Adapun 16 indikator PHBS tatanan rumah tangga Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

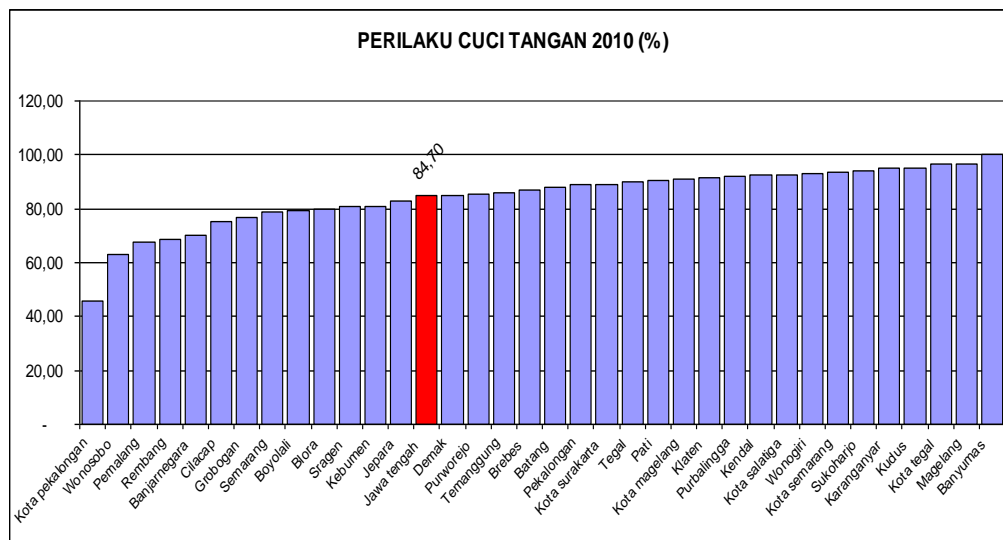
- a. Variabel Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan GIZI : Persalinan Nakes; ASI Eksklusif; Penimbangan Balita; Gizi seimbang.
- b. Variabel Kesehatan Lingkungan : Air Bersih; Jamban; Sampah; Kepadatan Hunian; Lantai Rumah.
- c. Variabel Gaya Hidup : Aktifitas fisik (Olah Raga); Tidak merokok; Cuci tangan; Kesehatan gigi dan mulut; Miras/Narkoba.
- d. Variabel Upaya Kesehatan Masyarakat : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Pemberantasan Sarang Nyamuk

Berdasarkan hasil pemetaan PHBS Tatanan Rumah Tangga Kabupaten/Kota tahun 2010, kondisi rumah tangga di Jawa Tengah berdasarkan indikator di atas adalah sebagai berikut:

#### **2.1.4.1 Perilaku cuci tangan**

Kondisi perilaku cuci tangan Jawa Tengah tahun 2010 dapat dilihat pada Gambar 23, yaitu 84,7%. Kondisi tertinggi di Kabupaten Banyumas (100%) dan terendah di Kota Pekalongan (45,9%). Beberapa hal yang menyebabkan tingginya angka perilaku cuci tangan di Kabupaten Banyumas, diantaranya keberhasilan dalam mensosialisasikan Gerakan Cuci Tangan menggunakan sabun yang difasilitasi oleh beberapa LSM.

**Gambar 23. Persentase Perilaku Cuci Tangan di Kabupaten/Kota Tahun 2010**

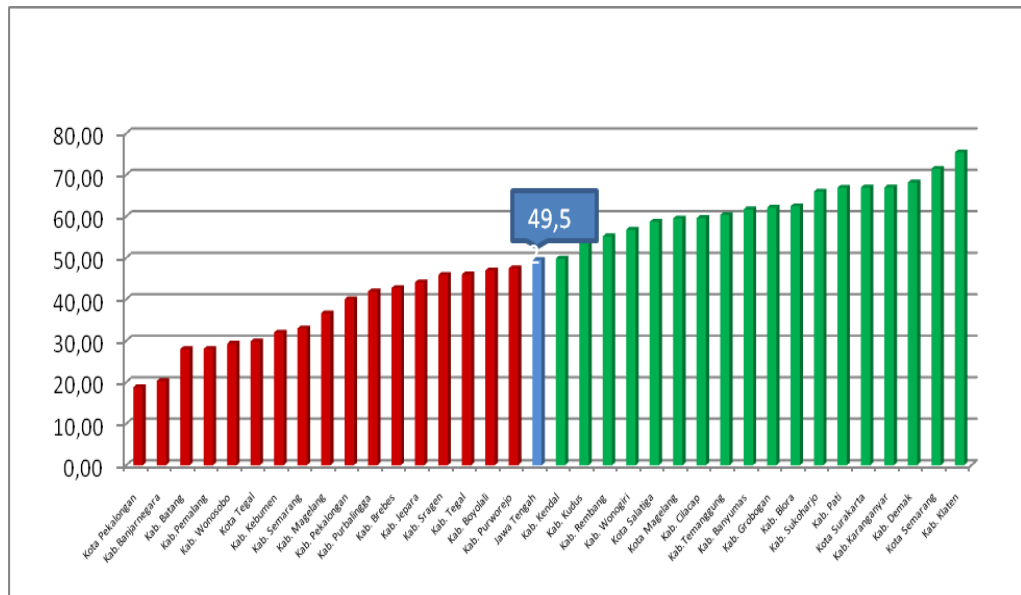


Sumber : Dinas Kesehatan, 2010 (diolah)

#### 2.1.4.2 Rendahnya pemberian ASI Eksklusif

Merupakan kondisi penyebab masalah kekurangan gizi pada anak balita. 15,70% keluarga yang memiliki perilaku dalam pemberian ASI eksklusif. Walaupun telah dikeluarkan peraturan mengenai pemberian ASI yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa ASI adalah hak asasi bayi dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif, namun kondisi cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai 6 bulan di Jawa Tengah masih sangat rendah, yakni 43,37% (tahun 2009) dan 49,50% (tahun 2010). Sebaran masing-masing Kabupaten/kota pada tahun 2010 (Gambar 24), tertinggi di Kabupaten Klaten (75,4%) dan terendah di Kota Pekalongan (18,8%). Tingginya pemberian ASI eksklusif antara lain disebabkan tingginya komitmen para pemangku kepentingan. Hal tersebut diwujudkan oleh Kabupaten Klaten melalui pemberlakuan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif.

**Gambar 24. Persentase pemberian ASI eksklusif pada Kabupaten/Kota Tahun 2010**

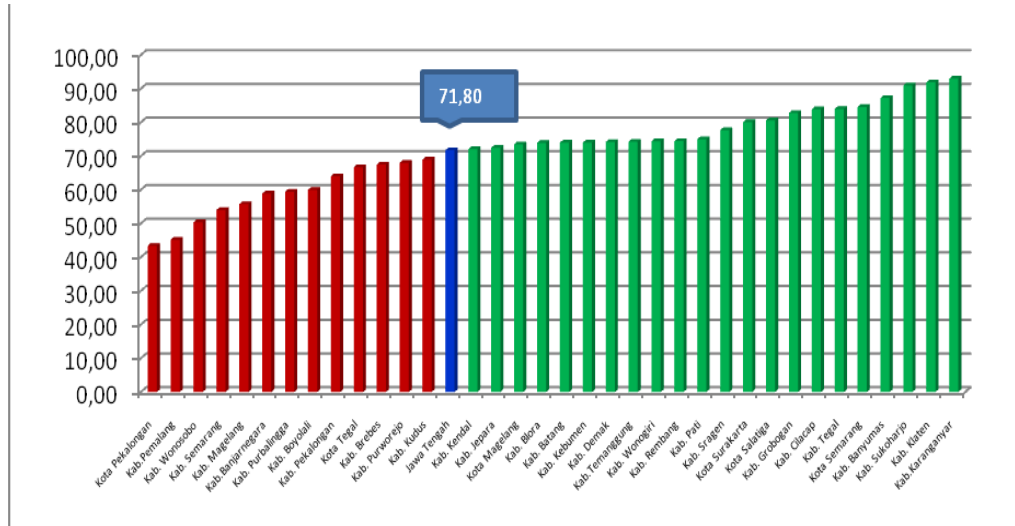


Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Jateng Th.2010 (diolah).

### 2.1.4.3 Jumlah rumah tangga memanfaatkan Posyandu

Indikator yang digunakan adalah Timbang Balita dengan capaian pada tahun 2010 sebesar 71,8%, tertinggi di Kabupaten Karanganyar (93%) dan terendah di Kota Pekalongan (43,4%). Optimalisasi peran pemberdayaan masyarakat terhadap penggunaan Posyandu dan Desa Siaga (berawal dari Kabupaten Karanganyar dengan nama Desa Siaga Sehat Sejahtera/DS3) memiliki peran yang penting terhadap pencapaian tingginya pemanfaatan Posyandu di Kabupaten Karanganyar. Sebaran masing-masing kabupaten/kota sebagaimana Gambar 25.

**Gambar 25. Jumlah Rumah Tangga Memanfaatkan Posyandu (Timbang Balita) Tahun 2010**

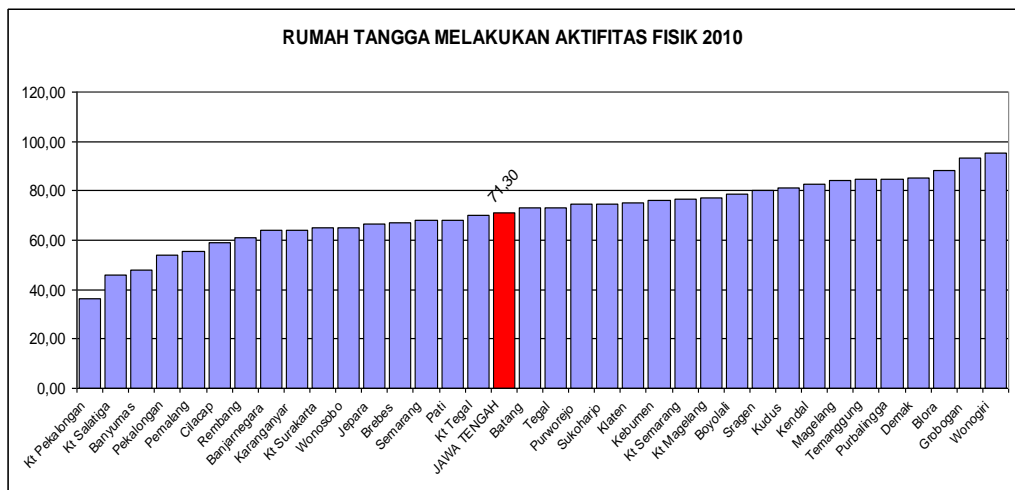


Sumber : Dinas Kesehatan, 2010 (diolah)

#### 2.1.4.4 Aktivitas fisik (Olah Raga)

Capaian Provinsi Jawa Tengah untuk rumah tangga yang melakukan aktifitas fisik (melakukan olah raga) pada tahun 2010 sebesar 71,3%, tertinggi di Kabupaten Wonogiri (95,4%) dan terendah di Kota Pekalongan (36,30%). Sebaran masing-masing kabupaten/kota sebagaimana Gambar 26.

**Gambar 26. Rumah Tangga yang melakukan aktivitas fisik Tahun 2010**

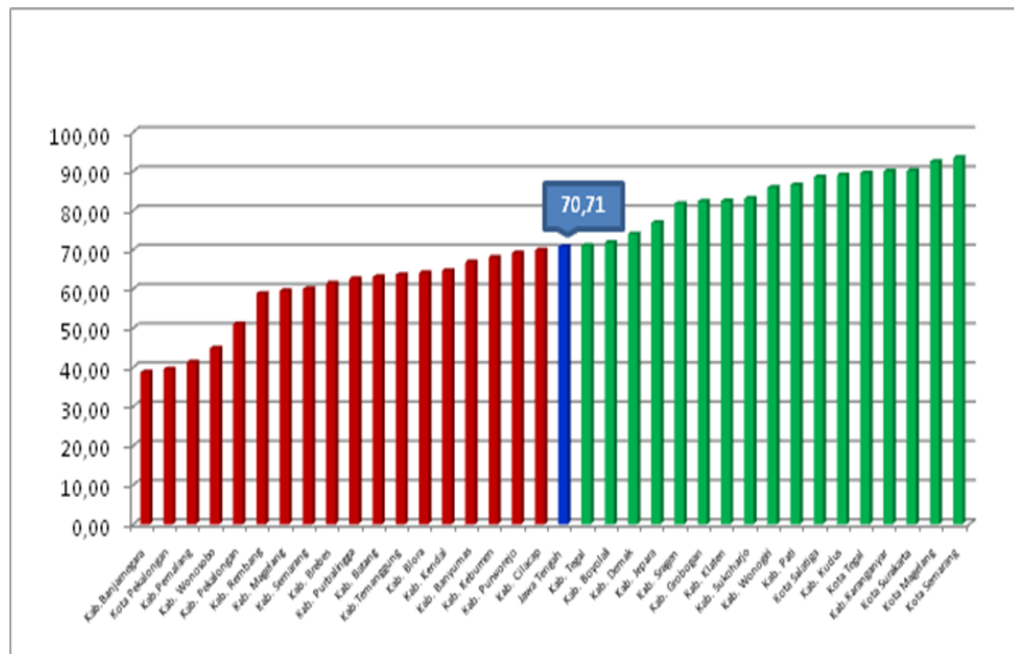


Sumber : Dinas Kesehatan, 2009-2010 (diolah)

#### 2.1.4.5 Akses terhadap sanitasi layak

Kondisi rumah tangga (keluarga) di masyarakat yang memiliki sarana jamban untuk mandi, cuci dan kakus, capaian kinerja pada tahun 2010 di Jawa Tengah sebesar 70,71% dengan capaian tertinggi di Kota Semarang sebesar 93,4% dan terendah di Kabupaten Banjarnegara sebesar 38,7%. Kota Semarang memiliki capaian yang tinggi dikarenakan masyarakatnya sebagian besar sudah berpendidikan dan berpengetahuan yang memadai tentang arti pentingnya penggunaan jamban bersih dan sehat.

**Gambar 27. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan jamban sehat tahun 2010**



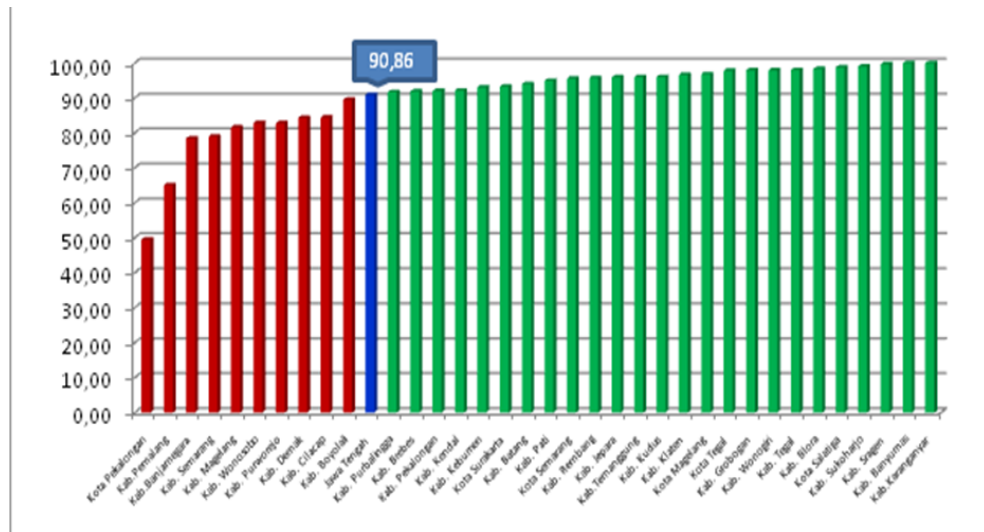
Sumber : Dinas Kesehatan, 2010 (diolah)

#### 2.1.4.6 Keluarga dengan kepemilikan persediaan air bersih

Kondisi capaian tahun 2010 sebesar 90,86% dengan capaian sebesar 100% di Kabupaten Banyumas dan Karanganyar, sedangkan terendah di Kota Pekalongan sebesar 49,5%. Tingginya rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Karanganyar antara lain dikarenakan tersedianya sumber mata air yang melimpah

dan peran LSM dan CSR dalam menggalakkan pola hidup bersih dan sehat cukup intens sehingga kesadaran masyarakat meningkat.

**Gambar 28. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih tahun 2010**



Sumber : Dinas Kesehatan 2010 (diolah)

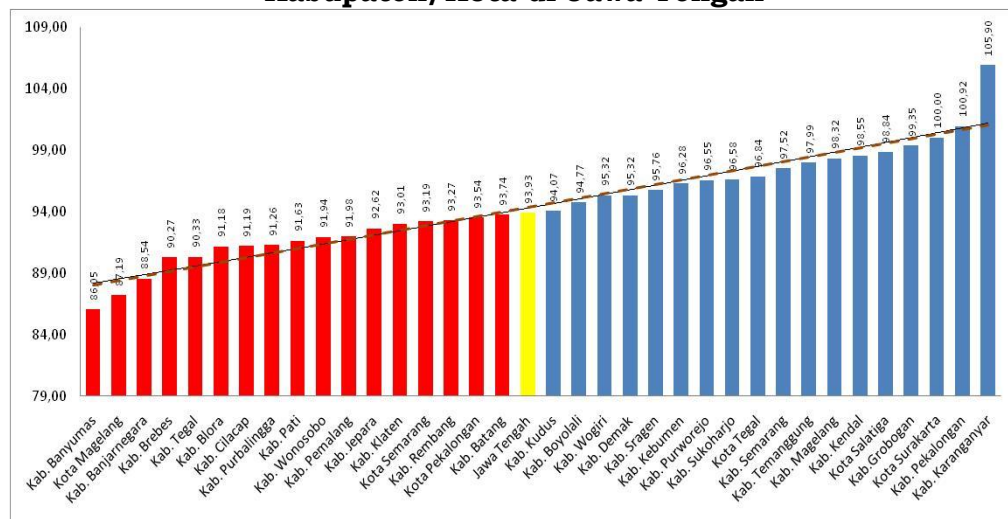
#### 2.1.4.7 Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

Upaya menurunkan angka kematian ibu, utamanya saat kelahiran, dilakukan melalui peningkatan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat / K4) dan peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan. Sampai dengan tahun 2010 cakupan K4 sebesar 92,04% dan kelahiran hidup dengan proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih sebesar 93,93%. Kondisi ini belum sesuai dengan target MDGs sebesar 100%. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tertinggi di Kabupaten Karanganyar (93%) dan terendah di Kota Pekalongan (43%). Tingginya persentase di Kabupaten Karanganyar disebabkan antara lain oleh tingginya kesadaran masyarakat karena Kabupaten Karanganyar sebagai pencetus lahirnya Desa Siaga yang pada awalnya menggunakan istilah DS3. Pada Gambar 29 dapat dilihat bahwa sampai dengan



tahun 2010 cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di kabupaten/kota yang masih dibawah rata-rata Jawa Tengah sebanyak 17 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Banyumas, , Banjarnegara, Brebes, Tegal, Blora, Cilacap, Purbalingga, Pati, Wonosobo, Pemalang, Jebara, Klaten, Batang, Rembang, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Magelang.

**Gambar 29. Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2010

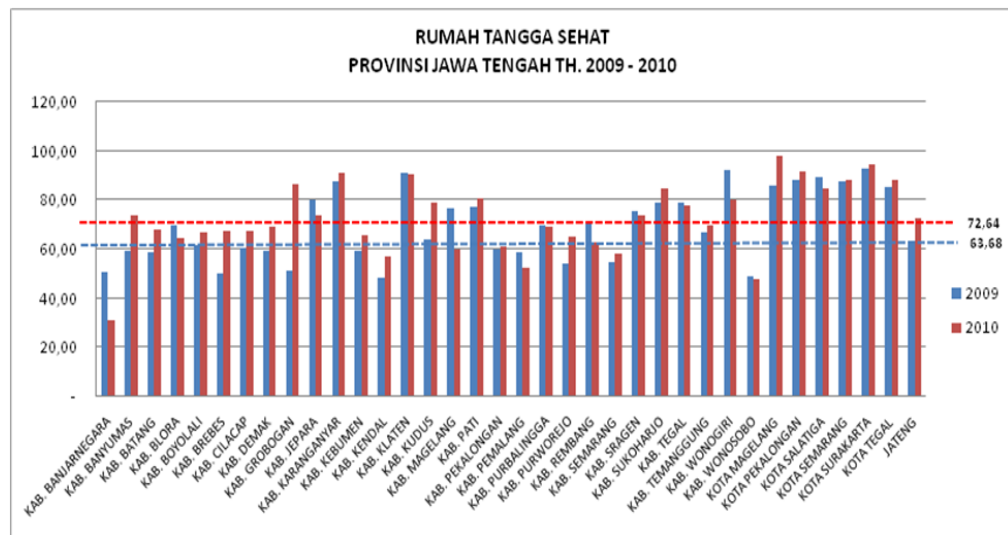
#### 2.1.4.8 Rumah Tangga Sehat

Berdasarkan data hasil pengkajian PHBS Tatanan Rumah Tangga dari 35 kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, pada tahun 2009 baru tercatat 2.085.999 rumah tangga dari 8.885.675 rumah tangga (sekitar 23%). Pada tahun 2010 dari 35 kabupaten/Kota se-Jawa Tengah berhasil didata sebanyak 2.399.155 rumah tangga. Rendahnya hasil pendataan tersebut disebabkan belum semua kabupaten/kota secara rutin mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PHBS.

Seperti terlihat pada Gambar 30, kondisi tahun 2009, dari 2.085.999 jumlah rumah tangga tersebut, proporsi rumah tangga yang berperilaku bersih dan sehat dengan baik sebanyak 1.328.435 rumah (63,68%). Dari data tersebut, tercatat tertinggi di Kota Surakarta (92,77%) dan terendah di

Kabupaten Kendal (48,69%). Pada tahun 2010, dari keseluruhan rumah tangga terdata sebanyak 2.399.155 rumah tangga, proporsi rumah tangga yang berperilaku bersih dan sehat dengan baik sebanyak 1.742.746 rumah (72,64%). Dari data tersebut, tercatat tertinggi di Kota Magelang (97,9%) dan terendah di Kabupaten Banjarnegara (31,0%).

**Gambar 30. Rumah Tangga Sehat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2010**



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

### 2.1.5. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi

Kelembagaan ketahanan pangan adalah unit yang melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Penanganan masalah pangan dan gizi memerlukan dukungan dari masyarakat, LSM dan swasta. Selain itu diperlukan upaya peningkatan peran kelembagaan terkait pangan dan gizi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dibidang pangan dan gizi. Adapun status pencapaian pembangunan pilar kelembagaan pangan dan gizi dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 7. Status Pencapaian Pembangunan Pilar Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi**

No	Indikator	Acuan dasar (2010)	Saat ini (2011)	Target RAD-PG s/d 2015	Status Capaian	Sumber Data
<b>Target Keluaran : Meningkatnya Kelembagaan Pangan dan Gizi</b>						
a.	Jumlah tenaga kesehatan gizi di Puskesmas Penempatan Tenaga Gizi (POLTEKES Gizi)	814 orang /864 Puskesmas	839 orang /864 Puskesmas	939 orang /864 Puskesmas		Dinkes
b.	Jumlah Kecamatan yang mempunyai tenaga PPL Pertanian yang mengikuti pelatihan pangan dan gizi	0	0	3 Kecamatan (90 PPL)		Set. Bakorluh
c.	Optimalisasi Peran TKPKD dalam mendukung pangan dan gizi	Provinsi dan 35 Kab /Kota	Provinsi dan 35 Kab. /Kota	Provinsi dan 35 Kab. /Kota		Bappeda
d.	Jumlah Kab./Kota yg menyusun PPH	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota		BKP
e.	Intervensi Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA pada SD/MI dan Ponpes	4 Kab	8 Kab	35 Kab/ Kota		BKP
f.	Optimalisasi Peran DKP dalam mendukung pangan dan gizi	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota		BKP
g.	Jumlah kab/kota yang sudah memasukkan program pangan dan gizi pada RPJMD	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota		Bappeda
h.	Jumlah Kab/kota yang mempunyai data tingkat konsumsi energi	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota		BKP
i.	Persentase kab/kota yang melaksanakan Surveilans pangan dan gizi	100%	100%	100%		Dinkes
j.	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan Surveilans pangan dan gizi/SKPG	50%	70%	100%		BKP
	Keterangan : Sudah tercapai       Akan tercapai       Perlu perhatian khusus					

Perkembangan kelembagaan pangan dan gizi di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain :

#### **2.1.5.1 Kelembagaan yang Terkait Pangan dan Gizi di Jawa Tengah**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Nomor 414.2/131/2010 tanggal 31 Agustus 2010, dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan tugas antara lain, melalui : a) Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang sensitif terhadap upaya peningkatan ketahanan pangan dalam skala regional dan lokal; b) Penguatan institusi percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mengawal pelaksanaan SPKD yang menjadi komitmen lintas sektor di daerah, c) Pelaksanaan gerakan nasional keberpihakan dan kepedulian pada masyarakat miskin melalui PNPM, dan d) Pola kemitraan dalam sistem ketahanan pangan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil harus dibangun dan dikembangkan di semua daerah, agar tersusunnya strategi ketahanan pangan yang baik dan berbasis pada proses dialog, saling pengertian, apresiasi dan *mutual respect*.

Pembentukan BUMDES dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa/kelurahan. Selain itu juga untuk mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa/kelurahan, termasuk usaha bidang pangan sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa guna menjamin akses sumber pendapatan keluarga dan mendukung pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu perlindungan dan pengembangan warung desa sebagai unit distribusi pangan saat ini sedang dalam pemikiran untuk dikembangkan, seiring dengan mengguritanya waralaba dengan mega kapital ke perdesaan.

Mendasarkan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan, di Jawa Tengah telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai oleh Gubernur dengan Surat Keputusan Nomor 147 tahun 2008 dengan tugas utama mengevaluasi ketahanan pangan dan memformulasikan kebijakan peningkatan ketahanan pangan ditinjau dari sisi ekonomi, politik, geografis, dan gizi. Dari perspektif sosial budaya, peran kelembagaan yang relevan dalam pengembangan sistem ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan dalam memperjuangkan strategi penjaminan akses kecukupan pangan bagi masyarakat. Permasalahan kelembagaan yang masih memerlukan perhatian adalah koordinasi antara institusi di tingkat Provinsi, koordinasi antar institusi Provinsi dengan Kabupaten, serta perlunya tenaga profesional terutama ditingkat kecamatan dan desa. Di samping itu, pengembangan pola ketahanan pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal belum optimal dikembangkan, baik melalui kajian IPTEK dan sosial ekonomi mengingat masih beragamnya sumberdaya pangan yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Melalui Kepmendagri dan Otda Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan, telah mendorong proses pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi untuk berkembangnya kelembagaan ketahanan pangan asli dan lokal dalam bentuk

lumbung pangan masyarakat. Keberadaan kelembagaan ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat di bidang pangan sesuai dengan potensi modal sosial yang selama ini telah terbentuk ditingkat lokal.

Dalam rangka peningkatan keamanan pangan segar di Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Nomor 20 tanggal 10 Maret 2010 (Penyempurnaan Peraturan Gubernur Nomor 97 tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009) tentang Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D), dibentuk Tim OKPP-D Provinsi Jawa Tengah. Tim OKPP-D memiliki tugas untuk melakukan sertifikasi mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, serta melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian di Jawa Tengah.

Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dilaksanakan melalui peningkatan pengawasan keamanan pangan yang difokuskan pada makanan jajanan yang memenuhi syarat dan PIRT tersertifikasi. Dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Keamanan Pangan tindak lanjut dari Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.

#### **2.1.5.2 Sumber Daya Manusia di Bidang Pangan dan Gizi Di Jawa Tengah**

Jumlah petugas penyuluh lapangan di Jawa Tengah sebanyak 3.254 orang yang terdiri dari PPL pertanian 2.352 orang, PPL perikanan 227 orang, PPL kehutanan 675 orang belum semuanya mengikuti pelatihan bidang pangan dan gizi. Di samping itu jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah desa di Jawa Tengah sebanyak 7.810 desa. Masih adanya puskesmas yang tidak memiliki petugas gizi karena keterbatasan jumlah lulusan Peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat, S1 Gizi, dan Diploma III Gizi atau yang lebih tinggi yang ditempatkan di wilayah Jawa

Tengah. Perlu diperhatikan dan ditingkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pangan dan gizi oleh Perguruan Tinggi yang mengelola dan meluluskan alumni bidang pangan, gizi/gizi kesehatan masyarakat.

## **2.2 Permasalahan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah**

Mendasarkan kondisi dan status capaian pada kelima pilar, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

### **2.2.1. Perbaikan Gizi Masyarakat**

Masih terbatasnya jumlah tenaga khusus gizi di Puskesmas menjadi faktor kurang optimalnya upaya KIE yang berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola gizi seimbang. Selain itu, keterbatasan tenaga Puskesmas yang telah dilatih tata laksana gizi buruk dan Posyandu yang belum memiliki sarana prasarana pemantauan pertumbuhan balita masih menjadi kendala dalam upaya perbaikan gizi masyarakat.

Kurangnya kesadaran ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, kunjungan kehamilan secara teratur akan berpengaruh pada pertumbuhan bayi yang dilahirkan. Masih rendahnya bayi yang mendapat ASI eksklusif juga merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kecukupan gizi balita.

### **2.2.2. Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam**

Permasalahan yang masih dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana distribusi pangan sehingga belum mampu menjangkau seluruh wilayah, utamanya desa terpencil, yang pada akhirnya akan menghambat penduduk di desa terpencil tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sesuai dengan gizi seimbang dan skor PPH ideal. Selain itu, distribusi pangan juga masih menghadapi kendala terbatasnya prasarana dan sarana pemasaran, seperti jalan, pasar desa dan fasilitas pergudangan atau penyimpanan pangan.

Permasalahan yang berhubungan dengan faktor ekonomi yaitu rendahnya pendapatan masyarakat (tingginya angka kemiskinan) yang menyebabkan daya beli terhadap komoditas pangan juga rendah, dan pada akhirnya menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap pangan jauh dari angka ideal untuk menunjang kehidupan yang sehat. Masalah akses penduduk miskin terhadap pangan ini masih banyak dihadapi penduduk Jawa Tengah, walaupun dalam kurun waktu tiga tahun (2008–2010) jumlah penduduk miskin semakin menurun. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2010 sebanyak 5,37 juta jiwa, menurun 356,5 ribu orang (6,23%) dari tahun 2009, walaupun persentase masih cukup tinggi (16,56%). Kemiskinan tersebut menyebabkan ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam jumlah, kualitas dan keragaman pangan yang baik. Hal ini berakibat pada kekurangan gizi, baik zat gizi makro maupun mikro, yang dapat diindikasikan dari status gizi kurang dan gizi buruk anak balita dan wanita hamil.

Permasalahan yang dihadapi yang berhubungan dengan faktor sosial adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi masyarakat yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan sehingga tidak mampu memenuhi konsumsi pangan yang seimbang dari keragaman gizi dan memenuhi PPH ideal. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya pola kebiasaan dan budaya makan masyarakat. Pola kebiasaan makan merupakan cara yang ditempuh seseorang/sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya dan sosial.

### **2.2.3. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan**

Dalam upaya untuk meningkatkan pengawasan, mutu dan keamanan pangan, ditemukan beberapa permasalahan antara lain:



**a. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha di bidang industri rumah tangga pangan terhadap standar mutu dan keamanan pangan .**

Menjamurnya kelompok industri usaha mikro, kecil, dan menengah pangan membawa risiko kesehatan karena modal dan profesionalisme yang melandasi usaha ini sering tidak memadai untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan. Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran produsen serta upaya pelaku usaha untuk menyediakan produk pangan yang murah agar dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat mengakibatkan mereka melakukan proses produksi dan penyediaan pangan yang tidak layak serta melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini lebih memperparah keadaan apabila produsen makanan tersebut memproduksi makanan anak-anak sekolah yang tidak punya pengetahuan tentang makanan yang sehat dan aman. Tidak adanya data yang tersedia tentang jumlah dan lokasi sekolah yang mempunyai kantin juga perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan keamanan dan kualitas jajanan anak sekolah.

**b. Beredarnya secara bebas bahan kimia berbahaya**

Oleh karena kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan serta daya beli masyarakat yang masih lemah pascakrisis ekonomi, dapat membuka peluang bagi produsen pangan yang hanya berorientasi keuntungan tanpa memperhatikan keamanan, mutu dan gizi pangan. Akibatnya makin marak penggunaan bahan kimia berbahaya yang seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil yaitu Rodhamin B dan Metanil Yellow yang digunakan untuk pangan. Bahan kimia ini beredar secara bebas dan mudah didapatkan di pasaran, dan pengawasan peredaran bahan kimia yang bukan untuk pangan ini masih sulit dipantau oleh instansi yang berwenang.

**c. Jumlah dan persebaran tenaga *District Food Inspector* dan Penyuluh Keamanan Pangan yang tidak merata**

Tenaga DFI dan PKP yang berada di Kabupaten/Kota mempunyai peran dan fungsi dalam pengawasan dan pembinaan pada produsen pangan rumah tangga. Jumlah tenaga yang cenderung menurun karena mutasi atau purna tugas, makin jauh dari kebutuhan atau sesuai rasio jumlah penduduk (1:40.000), sehingga dapat mempengaruhi mutu dan keamanan pangan industri rumah tangga yang beredar.

**2.2.4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**

Berdasarkan hasil pemetaan PHBS Tatanan Rumah Tangga Kabupaten/Kota tahun 2010, diperoleh 3 (tiga) urutan prioritas masalah berdasarkan 16 indikator PHBS sebagai berikut :

- a. Perilaku Rumah Tangga yang memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya baru mencapai 49,50% sehingga masih ada sebesar 50,50% rumah tangga yang belum memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya (variabel KIA/Gizi).
- b. Perilaku anggota rumah tangga melakukan aktivitas fisik (olah raga) mencapai 71,3% sehingga masih ada 28,7% rumah tangga yang belum melakukan aktivitas fisik secara rutin (variabel gaya hidup).
- c. Rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak mencapai 70,7% sehingga masih ada 29,3% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak (variabel kesehatan lingkungan).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 3 urutan prioritas masalah tersebut, diperlukan kegiatan intervensi yang melibatkan lintas program/sektor terkait, mengingat ke tiga urutan prioritas masalah tersebut mewakili variabel yang beragam, sehingga koordinasi dengan program dan sektor terkait diharapkan dapat mendukung peningkatan dan pembudayaan perilaku hidup bersih

dan sehat. Selain itu, dalam rangka mendukung peningkatan status gizi balita, perlu mengoptimalkan peran Tim PMTAS yang sampai saat ini belum mendapat sosialisasi dan pelatihan pengolahan tentang kudapan PMTAS yang sehat dan bergizi seimbang.

#### **2.2.5. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi**

Permasalahan yang dihadapi dalam kelembagaan pangan dan gizi di provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Tengah adalah :

- a. Belum optimalnya penanganan masalah gizi ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan masih lemahnya koordinasi antara lembaga terkait.
- b. Kinerja DKP tingkat Kabupaten/Kota masih belum optimal.
- c. Penanganan ketahanan pangan seringkali menghadapi kendala pendataan dan informasi pangan yang kurang akurat dan cepat.
- d. Monitoring dan evaluasi kinerja ketahanan pangan secara terpadu belum berjalan.
- e. Pengembangan ketahanan pangan keluarga berbasis sumberdaya dan kearifan lokal belum banyak dikembangkan.
- f. Keterbatasan sumber daya manusia baik kuantitas dan kualitas di bidang pangan dan gizi baik sebagai tenaga yang bertugas di Puskesmas maupun sebagai penyuluh pangan dan gizi.

### **2.3 Tantangan dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah**

#### **2.3.1. Perbaikan Gizi Masyarakat**

Masih terdapat kesenjangan status gizi balita antar kabupaten/kota menjadi tantangan yang harus dihadapi Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan masih lebih banyaknya anak balita di pedesaan yang kekurangan gizi dibanding di perkotaan. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita yang tinggi di wilayah pedesaan terkait erat dengan kemiskinan, pendidikan yang rendah

dan kesadaran yang harus ditingkatkan agar pola gizi seimbang dapat dipahami dan dilaksanakan masyarakat secara luas.

Harapan pencapaian sasaran balita dengan Berat Badan Rendah sebesar 11,0 % serta Balita *Stunting* sebesar 27,5 % pada tahun 2015 merupakan tantangan besar dalam rangka percepatan pencapaian perbaikan gizi masyarakat. Target tersebut diharapkan semakin dapat meningkatkan sinergi berbagai program terkait.

### **2.3.2. Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam**

Terkait dengan ketersediaan pangan di Jawa Tengah, tantangan yang harus dihadapi kedepan adalah jumlah kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan penggunaan pangan. Di sisi lain, peningkatan produksi pangan menghadapi ancaman serius, yaitu: (1) alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (3) semakin terbatasnya ketersediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan; dan (4) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim dan bencana alam. Disamping itu, pemberdayaan penyuluh swadaya/swasta perlu ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan tenaga penyuluh sehingga dapat menunjang peningkatan produksi pangan.

Tantangan yang harus dihadapi pada sistem distribusi pangan adalah bagaimana menciptakan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar daerah dan antar waktu menjadi tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar tetap lancar sampai ke seluruh kabupaten/kota sepanjang waktu.

Pemenuhan akses pangan masyarakat menghadapi tantangan rendahnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan. Rendahnya daya beli masyarakat tidak hanya terjadi di wilayah perdesaan, tetapi juga terjadi di wilayah perkotaan. Tantangan ekonomi lainnya adalah rendahnya sumberdaya yang tersedia di daerah untuk mendorong terciptanya *multiplier effect* yang dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan dan mata pencaharian bagi masyarakat. Tantangan lainnya adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga membatasi ruang gerak dalam memperoleh sumber-sumber pendapatan (mata pencaharian).

Berkaitan dengan konsumsi pangan, tantangan yang dihadapi adalah menurunkan populasi penduduk dengan asupan kalori <2.000 Kkal/kapita/hari dari 66,8% menjadi 35,32% pada Tahun 2015 **atau** menurunkan populasi penduduk dengan asupan kalori <1400 kkal/kap/hari dari 15,22% menjadi 8,5% di Tahun 2015 (sesuai dengan target MDGs Jawa Tengah 2010-2015).

Tantangan lain yang masih dihadapi adalah rendahnya kualitas konsumsi pangan sebagaimana dapat diketahui dari skor PPH. Dilihat perbandingan antara capaian PPH dengan PPH ideal, dapat disimpulkan bahwa kecukupan kalori masyarakat Jawa Tengah masih bertumpu pada padi-padian. Jika dilihat dari keragaman jenis konsumsinya, terlihat bahwa konsumsi pangan hewani masih sangat rendah. Hal ini ironis jika dibandingkan dengan ketersediaan daging, telur dan susu di Jawa Tengah yang telah melebihi jumlah kebutuhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengonsumsi bahan pangan hewani tersebut karena faktor ketidakmampuan dari segi ekonomi karena pendapatan yang rendah. Begitu pula konsumsi sayur-sayuran, umbi-umbian dan kacang-kacangan yang masih kurang ideal. Perlu dipikirkan bagaimana mengedukasi masyarakat secara terus menerus agar memahami pentingnya keragaman konsumsi pangan

dan melaksanakannya dalam penyediaan makanan bagi anggota keluarga.

### **2.3.3. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan**

Untuk menyusun strategi dalam upaya pencapaian Pembangunan Pangan dan Gizi terkait Pilar ketiga yaitu meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain :

#### **a. Era Perdagangan Bebas**

Sistem perdagangan internasional makin membuka peluang produk luar negeri untuk mengisi pasar Indonesia dan bersaing dengan produk lokal dengan kualitas dan harga yang ditawarkan. Tantangan ini dapat memacu pertumbuhan pangan lokal sesuai permintaan pasar. Di sisi lain peningkatan impor bahan dan produk pangan lebih diakibatkan oleh faktor harga, mutu dan persepsi konsumen.

#### **b. Kemajuan Teknologi Produksi**

Kemajuan teknologi produksi pangan yang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mengakibatkan makin banyaknya jenis pangan dan penggunaan bahan tambahan pangan yang perlu diantisipasi oleh laboratorium pengujian untuk mengidentifikasi kandungan pada produk pangan baik secara kimia maupun mikrobiologi. Ketertinggalan laboratorium pengujian dalam mengejar teknologi pengujian, membuka celah bocornya risiko kesehatan akibat produk yang berbahaya.

#### **c. Kemajuan Teknologi Promosi**

Kemajuan teknologi promosi atau periklanan digunakan sebagai salah satu pemicu dalam menggugah permintaan masyarakat. Keadaan ini berpotensi pada penggunaan produk secara irasional. Di samping itu kecanggihan teknologi promosi dapat menutupi berbagai kelemahan produk, yang dapat

menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen yang sudah terpapar oleh dorongan permintaan. Perkembangan kemajuan teknologi promosi merupakan tantangan bagi pemerintah, institusi pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberdayakan masyarakat melalui intensifikasi upaya sosialisasi dan KIE agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai informasi.

#### **2.3.4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat**

Persentase rumah tangga sehat yaitu yang diwakili oleh rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna sampai Tahun 2010 adalah sebesar 72,63% dengan cakupan tertinggi di Kota Magelang (97,90%) dan cakupan terendah di Kabupaten Banjarnegara sebesar 31%. Kondisi ini masih dibawah target RPJMD 2008-2013 yaitu rumah tangga sehat sebesar 75%. Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan perilaku hidup bersih adalah sulitnya mengubah perilaku masyarakat yang biasanya berhubungan dengan faktor ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan perilaku masyarakat tidak dapat terjadi dalam waktu yang singkat tetapi memerlukan proses yang panjang sehingga diperlukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan.

#### **2.3.5. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi**

Tantangan yang dihadapi dalam penguatan kelembagaan pangan dan gizi antara lain :

- a. Perlunya mengoptimalkan peran lembaga yang menangani masalah gizi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Sinergitas program kegiatan dari Kementerian/Lembaga, SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian target di bidang pangan dan gizi yang telah terjabar pada Dokumen Perencanaan, SPKD, RAD MDGs, RAD-PG dalam percepatan pencapaian sasaran MDGs.

- c. Penguatan DKP sebagai lembaga yang memformulasikan kebijakan peningkatan ketahanan pangan dan gizi.
- d. Pengembangan sistem informasi kewaspadaan pangan dan gizi. Optimalisasi peran Posyandu diseluruh desa dan kelurahan sebagai aktualisasi nyata partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat dan didukung dengan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kader-kader PKK dibawah pembinaan Tim Penggerak PKK.



### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI**

Mengacu pada kesepakatan internasional *MDGs* yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target *Millennium Development Goals* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 dan RAN-PG, serta memperhatikan situasi pangan dan gizi di Jawa Tengah maka tujuan pembangunan pangan dan gizi pada tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan prevalensi balita dengan berat badan rendah (gizi buruk dan gizi kurang) dari 12,13% (tahun 2010) menjadi 11,00% pada tahun 2015.
2. Menurunkan prevalensi balita stunting (pendek dan sangat pendek) dari 29,79 % (tahun 2010) menjadi 27,5 % pada tahun 2015.
3. Menurunkan populasi penduduk dengan asupan kalori < 1400 kkal/kap/hari dari 15,22% (tahun 2010) menjadi 8,5% di tahun 2015.

**Tabel 8. Target Pembangunan Pangan dan Gizi  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015**

<b>NO</b>	<b>TARGET</b>	<b>2011 (%)</b>	<b>2012 (%)</b>	<b>2013 (%)</b>	<b>2014 (%)</b>	<b>2015 (%)</b>
1	Penurunan prevalensi balita dengan BB rendah	11,8	11,6	11,4	11,2	11
2	Penurunan prevalensi balita <i>stunting</i>	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5
3	Penurunan populasi penduduk dengan asupan $\leq 1.400$ kkal/kap/hari	13,88	12,54	11,20	9,86	8,5

Menurut hasil stratifikasi Pemerintah Pusat yang berdasarkan pada tingkat prevalensi anak balita pendek dan proporsi penduduk sangat rawan pangan, seperti yang tertulis di dokumen RAN-PG 2011-2015, Provinsi Jawa

Tengah digolongkan pada **Strata 4** yaitu provinsi dengan prevalensi pendek pada anak Balita >32% dan proporsi jumlah penduduk dengan rata-rata asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari >14,47%.

Berdasarkan survai gizi tahun 2010 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, diperoleh data prevalensi balita pendek dan sangat pendek Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 29,79% dengan sebaran pada tiap kabupaten/kota tersajikan pada Gambar 2. Sedangkan Riskesdas tahun 2010 tidak melakukan riset sampai tingkat Kabupaten/Kota sehingga hanya diperoleh angka persentase balita pendek pada tingkat provinsi. Sumber data PSG yang tersedia sampai tingkat Kabupaten/Kota dijadikan dasar sebagai penentuan strata Jawa Tengah dan stratifikasi Kabupaten/Kota. Dengan demikian **Jawa Tengah berada pada strata 2**, yaitu provinsi dengan presentase pendek pada anak balita  $\leq$  32% dan proporsi penduduk sangat rawan pangan (asupan kalori <1400 Kkal/kap/hari) > 14,47%.

Arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran pembangunan pangan dan gizi di Jawa Tengah disusun sesuai dengan stratifikasi kabupaten/kota menurut pencapaian status pembangunan pangan dan gizi. Stratifikasi kabupaten/kota dimaksudkan untuk menentukan *stressing* intervensi program/kegiatan pada masing masing kelompok strata, sehingga mempercepat keberhasilan pencapaian target sasaran provinsi.

Stratifikasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dilakukan dengan melihat dua indikator yang berbeda dengan indikator yang ditetapkan oleh Pusat, yaitu; **persentase balita berat badan rendah** dan **persentase balita pendek** pada masing-masing Kabupaten/Kota berdasar data PSG Tahun 2010 dari Dinas Kesehatan. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum pernah dilakukan survai/pendataan terkait proporsi populasi dengan asupan kalori kurang dari 1400 Kkal/kap/hari pada penduduk di Kabupaten/Kota. Indikator proporsi penduduk sangat rawan pangan (asupan kalornya < 1400 Kkal/kap/hari) tidak tersedia untuk masing-masing Kabupaten/Kota. Sampling yang telah dilakukan oleh BKP hanya bisa memperoleh data rata-rata asupan kalori per Kabupaten/Kota yang

tidak bisa mencerminkan keadaan riil proporsi penduduk yang benar-benar mengalami rawan pangan atau proporsi penduduk yang asupan kalorinya < 1400 kkal/kap/hari. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan lain disesuaikan dengan kondisi yang ada, yaitu dengan menggunakan indikator balita dengan berat badan rendah dan balita *stunting*.

Sesuai dengan target RAD-PG Provinsi Jawa Tengah, maka perumusan kebijakan dan strategi pembangunan pangan dan gizi di kabupaten/kota dengan melihat status gizi balita. Menurut kedua indikator, persentase balita berat badan rendah dan persentase balita pendek, maka stratifikasi pada kabupaten/kota di Jawa Tengah dan tingkat intensitas intervensi yang akan dilakukan pada masing-masing pilar pembangunan pangan gizi dapat dilihat pada Tabel 8. Tingkat intensitas ditunjukkan dengan banyaknya jumlah x, dimana semakin banyak jumlah x berarti semakin tinggi tingkat keseriusan/kesungguhan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pilar pembangunan pangan dan gizi tersebut.

**Tabel 9. Intervensi Strategi 5 Pilar dengan Stratifikasi Kabupaten/Kota**

Tingkat Stratifikasi	Kabupaten/ Kota	Strategi 5 Pilar Rencana Aksi				
		Perbaikan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas Pangan Beragam	Pengawasan Mutu & Keamanan Pangan	Perilaku Hidup Bersih & Sehat	Kelembagaan Pangan & Gizi
<b>Strata 1</b> Kabupaten/ Kota dengan persentase Balita BBR $\leq$ 12,13 % dengan persentase pendek pada anak balita $\leq$ 29,79 %;	Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Karanganyar, Semarang, Wonogiri, Banjarnegara, Sragen, Sukoharjo, Pati, Klaten, Cilacap, Banyumas, Kudus	X	X	X	X	X
<b>Strata 2</b> Kabupaten/ Kota dengan persentase Balita BBR > 12,13 % dengan persentase pendek pada anak balita $\leq$ 29,79 %;	Batang, Tegal, Kota Pekalongan, Brebes	XX	XXX	XX	XX	XX

Tingkat Stratifikasi	Kabupaten/ Kota	Strategi 5 Pilar Rencana Aksi				
		Perbaikan Gizi Masyarakat	Aksesibilitas Pangan Beragam	Pengawasan Mutu & Keamanan Pangan	Perilaku Hidup Bersih & Sehat	Kelembagaan Pangan & Gizi
<b>Strata 3</b> Kabupaten/ Kota dengan persentase Balita BBR $\leq$ 12,13 % dengan persentase pendek pada anak balita > 29,79 %;	Temanggung, Wonosobo, Pemalang, Boyolali, Purbalingga, Kebumen	XXX	XX	XX	XXX	XX
<b>Strata 4</b> Kabupaten/ Kota dengan persentase Balita BBR > 12,13 % dengan persentase pendek pada anak balita > 29,79 %;	Kota Tegal, Kota Surakarta, Grobogan, Kendal, Magelang, Purworejo, Jepara, Pekalongan, Rembang, Demak, Blora	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

**Keterangan :** Jumlah “x” menunjukkan tingkat intensitas intervensi yang dilakukan.

Kebijakan dan strategi masing-masing strata status pembangunan pangan dan gizi adalah sebagai berikut:

### **3.1 Strata 1: Kabupaten/Kota dengan persentase Balita BBR $\leq$ 12,13 % dengan persentase pendek pada anak balita $\leq$ 29,79 %;**

Meliputi Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Karanganyar, Semarang, Wonogiri, Banjarnegara, Sragen, Sukoharjo, Pati, Klaten, Cilacap, Banyumas, Kudus

**Arah Kebijakan :** Melanjutkan penurunan prevalensi kurang gizi pada ibu dan anak dan mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat agar berkontribusi terhadap percepatan MDGs 1,4,5 dan 6.

#### **Strategi :**

- 1. Perbaikan gizi masyarakat** dengan mengukur panjang/tinggi badan semua anak baduta setiap 6 bulan selama distribusi kapsul vitamin A.
- 2. Peningkatan aksesibilitas pangan beragam** dengan mengembangkan pemetaan kabupaten/kota berdasarkan indikator

prevalensi pendek anak balita dan asupan kalori < 2.000 kkal/kap/hari untuk prioritas penanganan wilayah.

- 3. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan** dengan menjaga mutu dan keamanan pangan termasuk makanan jajanan, PIRT, dan air minum.
- 4. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat** melalui peningkatan akses informasi dan edukasi tentang PHBS bidang pangan dan gizi kepada individu, keluarga, dan masyarakat terutama untuk menanggulangi gizi lebih dan penyakit tidak menular terkait gizi.
- 5. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi** dengan harmonisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi di tingkat kabupaten/kota untuk mencapai target MDGs.

### **3.2 Strata 2 : Kabupaten/Kota dengan persentase Balita BBR > 12,13% dengan persentase pendek pada anak balita $\leq$ 29,79 %;**

Meliputi Kota Pekalongan, Batang, Tegal, Brebes

**Arah Kebijakan** : Melanjutkan penurunan prevalensi kurang gizi pada ibu dan anak dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat terutama di daerah sangat rawan pangan.

#### **Strategi** :

- 1. Perbaikan gizi masyarakat** dengan memfokuskan pelayanan berkelanjutan pada remaja putri, ibu hamil dan anak baduta dengan intervensi paket pelayanan kesehatan dan gizi.
- 2. Peningkatan aksesibilitas pangan beragam** dengan : i) meningkatkan aksesibilitas pangan beragam untuk memenuhi asupan kalori minimal 2000 kkal/kap/hari terutama bagi rumah tangga miskin, daerah terpencil dan daerah perbatasan dan ii) mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal yang bermutu dan aman.
- 3. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan** dengan meningkatkan kesadaran tentang keamanan pangan.
- 4. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat** dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai

kemandirian keluarga khususnya remaja dan perempuan dalam berperilaku hidup bersih dan sehat termasuk sadar gizi.

- 5. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi** dengan meningkatkan sumber daya termasuk anggaran dan SDM bidang pangan dan gizi.baik formal maupun informal.

### **3.3 Strata 3 : Kabupaten/Kota dengan persentase Balita BBR $\leq$ 12,13 % dengan persentase pendek pada anak balita $>$ 29,79 %;**

Meliputi Temanggung, Wonosobo, Pemasang, Boyolali, Purbalingga, Kebumen

**Arah Kebijakan** : Mempercepat penurunan prevalensi kurang gizi pada ibu dan anak dan mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat untuk mencapai asupan kalori ideal 2000 kkal/kap/hari.

#### **Strategi** :

- 1. Perbaikan gizi masyarakat** dengan mengembangkan kebijakan strategi untuk kegiatan aksi yang menjangkau semua perempuan pra hamil dan ibu hamil dengan paket pelayanan kesehatan reproduksi dan gizi, termasuk program penanggulangan WUS, KEK dan anemia, dan peningkatan program keluarga berencana serta dengan mendorong pengembangan dan penerapan kebijakan sehat terkait pangan dan gizi termasuk pemberian ASI Eksklusif (0-6 bulan) dan makanan pendamping ASI (6-24 bulan) berbasis sumberdaya pangan lokal, pemasaran makanan sehat dan aman untuk anak dan konsumsi garam beryodium.
- 2. Peningkatan aksesibilitas pangan beragam** dengan mengembangkan pemetaan kabupaten/kota berdasarkan indikator prevalensi pendek anak balita dan asupan kalori $<$ 2.000 kkal/kap/hari untuk prioritas penanganan wilayah.
- 3. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan** dengan meningkatkan kesadaran tentang keamanan pangan.
- 4. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat** dengan mengutamakan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung PHBS bidang pangan dan gizi melalui peningkatan

kemitraan lintas sektor, swasta, dan peran serta organisasi sosial kemasyarakatan.

- 5. Penguatan Kelembagaan pangan dan gizi** dengan: 1) mengembangkan peta SDM terkait gizi termasuk D3 gizi dan petugas kesehatan lain untuk identifikasi kesenjangan deskripsi pekerjaan dan kompetensi petugas; 2) menjamin implementasi SDM bidang kesehatan dan bidang pangan dan 3) optimalisasi pengelola posyandu diseluruh desa dan kelurahan.

**3.4 Strata 4 : Kabupaten/Kota dengan persentase Balita BBR > 12,13 % dengan persentase pendek pada anak balita > 29,79 %;**

Meliputi Kota Tegal, Kota Surakarta, Grobogan, Kendal, Magelang, Purworejo, Jepara, Pekalongan, Rembang, Demak, Blora

**Arah Kebijakan** : Mempercepat penurunan prevalensi gizi kurang pada ibu dan anak dan peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang beragam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

**Strategi** :

- 1. Perbaikan gizi masyarakat** dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan berkelanjutan pada ibu dan anak sejak janin dalam kandungan, persalinan, neonatal, bayi dan anak baduta dengan paket intervensi gizi efektif.
- 2. Peningkatan aksesibilitas pangan beragam** dengan meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, aman dan bergizi seimbang untuk memenuhi asupan kalori ideal 2.000 Kkal/kap/hari terutama bagi rumah tangga miskin, daerah terpencil dan perbatasan.
- 3. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan** dengan meningkatkan kesadaran tentang keamanan pangan.
- 4. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat** dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam menerapkan PHBS termasuk sadar gizi.
- 5. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi** dengan :
  - 1) meningkatkan kemitraan dan kerjasama multi-sektor dalam badan pangan dan gizi tingkat provinsi yang efektif dan badan yang bersifat paralel di tingkat kabupaten dan kota, 2) memantau dengan

intensif implementasi program terkait dengan pengentasan kemiskinan termasuk meningkatkan anggaran yang mampu mengungkit kinerja utama kabupaten dan kota, 3) pemutakhiran deskripsi pekerjaan untuk SDM terkait pangan dan gizi di semua tingkat (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan) untuk memenuhi kebutuhan tenaga sesuai dengan arah program pangan dan gizi, termasuk memberikan insentif kepada petugas yang bekerja di area penduduk yang tak terlayani, dan 4) peningkatan advokasi dan sosialisasi pengembangan kebijakan sehat mendukung pangan dan gizi di semua jenjang administrasi. 5) penguatan sistem informasi kewaspadaan pangan dan gizi.



## **BAB IV**

### **RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI**

Ketersediaan pangan yang melebihi kebutuhan pangan penduduk tidak menjamin bahwa seluruh penduduk terbebas dari kelaparan dan gizi kurang. Konsep ketahanan pangan dan gizi yang luas bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan yaitu tingkat kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, sasaran pertama *MDGs* bukanlah tercapainya produksi atau penyediaan pangan, tetapi menurunkan kemiskinan dan kelaparan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. *MDGs* menggunakan pendekatan dampak bukan masukan. *UNDP* sebagai lembaga PBB yang berkompeten memantau pelaksanaan *MDGs* telah menetapkan dua ukuran kelaparan, yaitu jumlah konsumsi energi (kalori) rata-rata anggota rumah tangga di bawah kebutuhan hidup sehat dan proporsi anak balita yang menderita gizi kurang. Oleh karena itu, analisis situasi ketahanan pangan harus dimulai dari evaluasi status gizi masyarakat diikuti dengan tingkat konsumsi, persediaan dan produksi pangan. Status gizi masyarakat yang baik ditunjukkan oleh keadaan tidak adanya masyarakat yang menderita kelaparan dan gizi kurang. Keadaan ini secara tidak langsung menggambarkan akses pangan dan pelayanan sosial yang merata dan cukup baik.

Berdasarkan konsep tersebut, maka dalam penyusunan RAD-PG Jawa Tengah 2011-2015 mengacu pada pada keluaran Akses Universal Pangan dan Gizi pada tahun 2015, yaitu : 1) penurunan prevalensi gizi buruk dan kurang anak balita; 2) penurunan Prevalensi pendek anak balita; 3) penurunan populasi jumlah penduduk dengan asupan energi (kalori)  $\leq 1.400$  kkal/kapita/hari. (tabel 9).

Pencapaian harus dilakukan secara bertahap dan indikator keluaran yang terukur, yakni:

1. Meningkatnya cakupan ASI eksklusif, D/S (jumlah anak yang ditimbang terhadap jumlah seluruh anak di wilayah penimbangan tersebut), KN (kunjungan neonatal), dan K4 Kunjungan ke-4

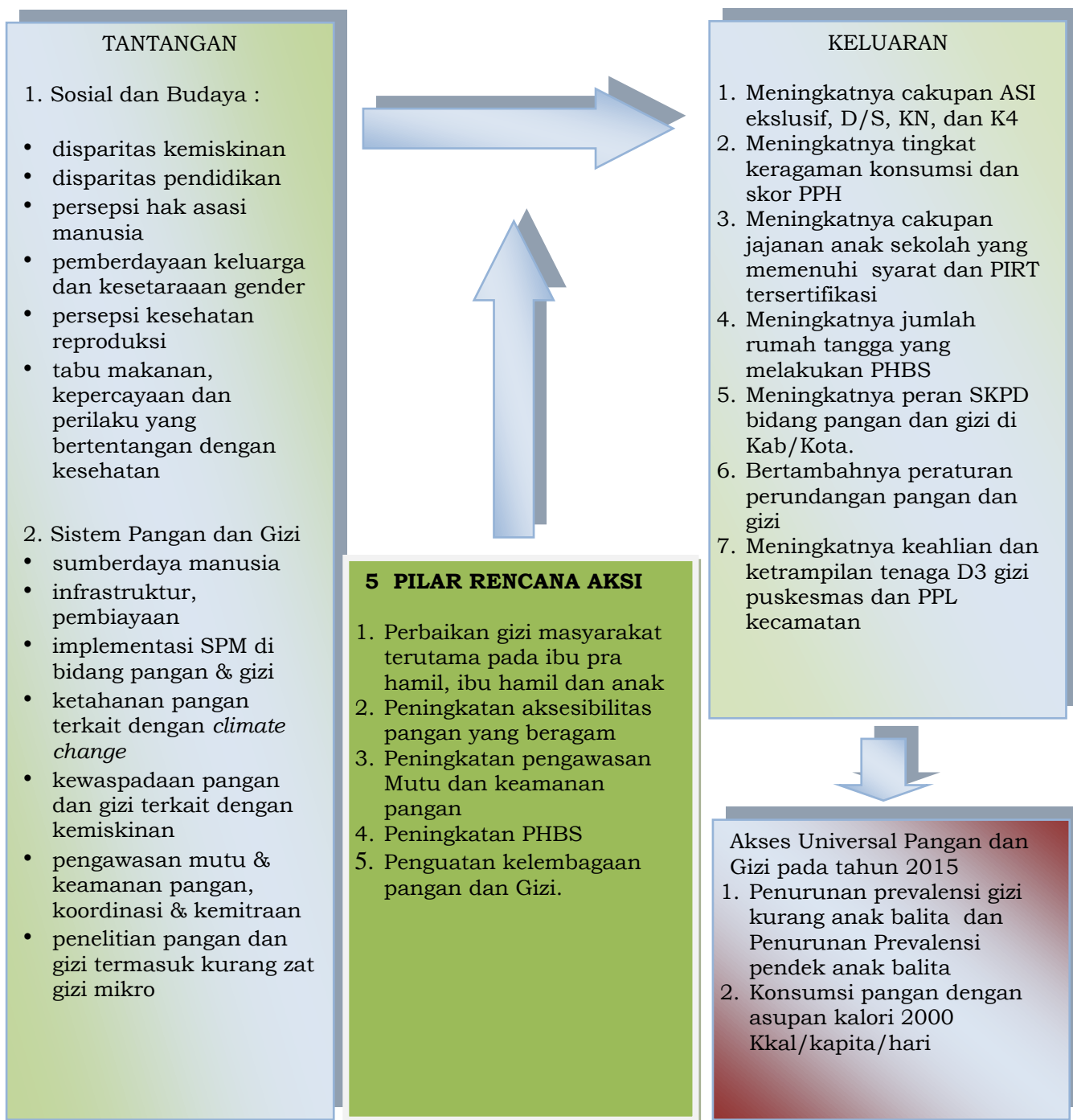
2. Meningkatnya tingkat keragaman konsumsi dan skor PPH
3. Meningkatnya cakupan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat dan PIRT tersertifikasi
4. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang melakukan PHBS
5. Meningkatnya peran SKPD bidang pangan dan gizi di Kabupaten/Kota.
6. Bertambahnya peraturan perundangan pangan dan gizi
7. Meningkatnya keahlian dan ketrampilan tenaga D3 gizi puskesmas dan PPL kecamatan

RAD-PG Provinsi Jawa Tengah 2011-2015 perlu diimplementasikan dengan sistematis sesuai dengan tantangan yang dihadapi dan kegiatan yang terstruktur secara integratif dalam 5 pilar rencana aksi, yang terdiri atas :

1. Perbaikan gizi masyarakat terutama pada ibu pra hamil, ibu hamil dan anak
2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam
3. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan
4. Peningkatan PHBS
5. Penguatan kelembagaan pangan dan Gizi

Secara keseluruhan RAD-PG menjadi titik awal peningkatan gizi dan ketahanan pangan masyarakat dengan prasyarat perlunya konsistensi dan pengawalan Rencana Aksi yang telah dituangkan sampai dengan Tahun 2015 dari segenap pemangku kepentingan.

Kerangka konsep implementasi RAD-PG Provinsi Jawa Tengah selengkapnya dapat dilihat pada gambar 31.



**Gambar 31. Kerangka Konsep Implementasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah 2011-2015**

#### 4.1 Perbaikan Gizi Masyarakat

Perbaikan gizi di Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, BP3AKB, BKP serta melibatkan peran Tim Penggerak PKK melalui alokasi anggaran APBD Provinsi, APBN serta *Non Government Organization* dengan program perbaikan gizi masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :

1. **Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)**, yaitu upaya peningkatan gizi dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui Posyandu dengan fokus kegiatan :
  - a. Pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu, Tatalaksana penanganan gizi buruk rumah tangga dan Puskesmas,
  - b. Pelatihan petugas tatalaksana gizi buruk di Puskesmas Perawatan
  - c. Pemberian kapsul Vitamin A dosis tinggi
  - d. Pemberian IMD dan ASI Eksklusif
2. **Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium**, yaitu upaya penanggulangan masalah kekurangan iodium pada masyarakat dengan fokus kegiatan :
  - a. Pemantauan konsumsi garam beryodium di tingkat masyarakat
  - b. Pembinaan dan pengawasan produksi dan distribusi garam (Tim)
  - c. Surveillance GAKI
3. **Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)**, yaitu suatu rangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan data dan informasi serta pembuatan kebijakan dalam konteks penanganan masalah gizi, dengan fokus kegiatan :
  - a. PSG dan Keluarga Sadar Gizi
  - b. Pemantauan pendek pada balita
  - c. Pemantauan kasus gizi buruk pada balita
  - d. Pemantauan konsumsi gizi pada WUS, ibu hamil, dan balita
4. **Upaya Perbaikan Gizi Institusi (UPGI)** yaitu upaya perbaikan gizi di institusi seperti Rumah Sakit, Pusat Pemulihan Gizi (PPG), perusahaan/tempat kerja dan sekolah, dengan fokus kegiatan :
  - a. Perawatan kasus gizi buruk di Rumah Sakit

- b. Pembentukan PPG
- c. Pemberian IMD dan Rujukan ASI Eksklusif

**5. Pelayanan KIA** yaitu upaya pelayanan kesehatan bagi WUS, ibu hamil dan balita, dengan fokus kegiatan :

- a. Pemberian Tablet Tambah Darah (Fe) 90 tablet pada ibu hamil
- b. Pemeriksaan Ibu Hamil
- c. Pemeriksaan Neonatal
- d. Pemberian tablet tambah darah (Fe) pada WUS

**Tabel 10. RENCANA AKSI PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT**

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
<b>Provinsi</b>							
<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>							
Upaya Perbaikan Gizi Institusi	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	75,41	78	81	84	87	90
	Jumlah puskesmas non perawatan memiliki tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk.	35	150	250	350	450	576 (100%)
	Persentase kader Posyandu aktif di Posyandu	88%	90%	91%	92%	93%	94%
	Jumlah posyandu yang memiliki sarana dan prasarana pemantauan	10%	25%	50%	60%	70%	80%
	Jumlah Posyandu Model yang dikembangkan	2500	3000	3500	4000	0	0
	Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	95	95	95	95	95	95
	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	60	65	67	70	75	80
	Persentase Kab./Kota yang mempunyai peraturan tentang ASI Eksklusif	3%	10%	30%	40%	50%	60%

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan sesuai standard(%)	100	100	100	100	100	100
Penanggulangan GAKI	Cakupan rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium (%)	70 %	75%	80%	83%	87%	90%
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah kasus gizi buruk yang memperoleh obat gizi buruk	3468	3468 (100%)	3468 (100%)	3468 (100%)	3468 (100%)	3468 (100%)
	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Surveillance Gizi Khusus	0	3	20	30	35	35
Upaya Perbaikan Gizi Institusi	Jumlah puskesmas, yang telah dilatih dengan pemantauan pertumbuhan balita	52	300	450	600	750	901 (100%)
	Jumlah puskesmas perawatan dan RSUD memiliki tenaga yang dilatih tata laksana gizi buruk	182	259	332 (100%)	332 (100%)	332 (100%)	332 (100%)
Program Pelayanan KIA	Cakupan kunjungan pertama neo natus (KN1)	95%	86%	88%	89%	90%	90%
	Cakupan kunjungan ke-4 ibu hamil (K4)	92%	96%	98%	100%	100%	100%
	Cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah (Fe) sebanyak 90 tablet	71%	74%	78%	80%	81%	85%

## 4.2 Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam

Aksesibilitas pangan sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan, sangat terkait dengan kondisi fisik, ekonomi maupun sosial. Kondisi fisik dikaitkan dengan ketersediaan dan produksi komoditas pangan juga dengan kondisi transportasi (jalan, kapal, cuaca). Sedangkan kondisi ekonomi umumnya dikaitkan pada pendapatan masyarakat sebagai daya beli bahan pangan.

## **1. Program/Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Pangan**

### **a. Desa Mandiri Pangan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.**

Tujuan dilaksanakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian pangan rumah tangga dan masyarakat. Program Aksi Desa Mandiri Pangan dilakukan dengan kegiatan, antara lain :

- 1). Penanggulangan kerawanan pangan di tingkat desa dengan basis data Peta FSVA.
- 2). Penanggulangan kemiskinan dengan sinergitas Program penanggulangan kemiskinan.
- 3). Penanggulangan urbanisasi dan pengangguran melalui peningkatan kegiatan usaha pertanian maupun pengembangan industri kecil di pedesaan.

Pemantauan situasi ketahanan pangan dan gizi masyarakat oleh Tim SKPG untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan di suatu wilayah melalui sistem peringatan dini (*early warning system*).

### **b. Penguatan cadangan pangan masyarakat melalui pemberdayaan lumbung pangan perlu terus dikembangkan sebagai upaya untuk memperkuat cadangan pangan masyarakat, dimaksudkan untuk :**

- 1). Meningkatkan ketersediaan dan kecukupan pangan sampai di tingkat rumah tangga.
- 2). Meningkatkan stok pangan di masyarakat
- 3). Meningkatkan akses pangan, permodalan dan sarana produksi
- 4). Penguasaan pasar dan teknologi.

Fasilitasi pemerintah, diarahkan untuk :

- 1). Penguatan kapasitas SDM pengurus lumbung
- 2). Penguatan cadangan pangan masyarakat
- 3). Penguatan kelembagaan melalui berbagai fasilitasi sarana prasarana.

c. Analisis ketersediaan pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk suatu wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) pada waktu tertentu. Melalui kegiatan ini akan diketahui jumlah pangan yang tersedia untuk konsumsi per kapita (kg/kap/th atau gr/kap/hr atau zat gizi tertentu kkal/kap/hr; gr protein/hr; gram lemak/hr)

**2. Program/Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan**

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran pasokan antar wilayah, antar waktu, melalui :

- a. Pengembangan sistem distribusi dan peningkatan akses pangan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui Penguatan LDPM.
- b. Kegiatan peningkatan informasi harga, pengamanan stok dan distribusi.

**3. Program/Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar**

a. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui :

- 1) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan (pelatihan, demplot, pemberian stimulan bibit/benih tanaman/ternak/ikan spesifik lokasi dan peningkatan nilai tambah).
- 2) Sosialisasi dan promosi (demonstrasi, pameran, siaran radio, promosi lewat media cetak dan elektronik)
- 3) Kerjasama dengan perguruan tinggi (Pengkajian, pemberdayaan, peningkatan daya saing).
- 4) Pengembangan preferensi pangan berbasis sumber daya lokal (penumbuhan/pelatihan, pengembangan dan kemandirian serta kemitraan)
- 5) Analisis Konsumsi Pangan Harapan
- 6) Pengembangan bisnis pangan.



b. Pengembangan Mutu dan Keamanan Pangan Segar.

Pengembangan mutu dan keamanan pangan segar dilakukan melalui sertifikasi dan pelabelan serta pengawasan batas minimal residu buah dan sayuran dengan kegiatan :

- 1) Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha produk pangan segar sesuai dengan standar *GAP* dan *SOP* dalam rangka standarisasi jaminan mutu dan keamanan pangan.
- 2) Memfasilitasi proses sertifikasi Prima 3 dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan.
- 3) Melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan secara periodik.
- 4) Mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang bermutu dan aman terhadap bahan tambahan makanan serta residu pestisida.

**4. Program/Kegiatan Peningkatan produksi dan produktivitas padi dan jagung.**

Dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas padi dan jagung, akan dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain pemberian bantuan benih, alat mesin pertanian dan pestisida, pemberian subsidi pupuk, serta peningkatan SDM petani melalui SL-PTT Padi Hibrida, SL-PTT Padi Non Hibrida, SL-PTT Padi Lahan Kering/Gogo dan SL-PTT Jagung Hibrida.

**5. Program/Kegiatan Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi**

Tanaman aneka kacang dan umbi (Kabi) merupakan sumber protein nabati (kedelai, kacang tanah, kacang hijau maupun kacang-kacangan lainnya); dan juga sebagai sumber karbohidrat (ubi kayu, ubijalar maupun umbi-umbian lainnya). Komoditas tersebut telah lama dibudidayakan dan sebagai salah satu penopang kebutuhan keluarga bahkan di beberapa tempat merupakan sumber mata pencaharian. Pengembangan aneka kacang dan umbi akan meningkatkan pendapatan petani dan menggairahkan kegiatan

perekonomian di perdesaan dan juga sebagai mempertimbangkan terjadinya diversifikasi konsumsi.

Untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas aneka kacang dan umbi dilakukan berbagai kegiatan pendukung, diantaranya :

- a. SL-PTT Kedelai
- b. SL-PTT Kacang Tanah
- c. SL-PTT Kacang Hijau
- d. Peningkatan Mutu Intensifikasi Kedelai
- e. Peningkatan Mutu Intensifikasi Kacang Tanah
- f. Peningkatan Mutu Intensifikasi Kacang
- g. Pengembangan Ubi Kayu dan Percontohan Ubi Kayu
- h. Pengembangan Koro Pedang
- i. Pengembangan Tanaman Gambili
- j. Pengembangan tanaman suweg
- k. Pengembangan Ganyong
- l. Gelar Kabi Herbal.

#### **6. Program/Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan**

Berbagai jenis buah tropis seperti durian, mangga, manggis, salak, nanas, alpukat terdapat di beberapa daerah. Beberapa diantaranya telah membentuk kawasan dengan skala luas seperti: mangga di Pemalang, durian di Karanganyar dan Kabupaten Semarang, buah naga di Sragen, serta salak di Magelang dan Banjarnegara. Dalam mendukung ketersediaan pangan asal buah-buahan maka diupayakan penerapan *GAP* untuk perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah dan *GHP* untuk mempertahankan mutu melalui pengelolaan pasca panen tanaman buah.

## **7. Program/Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan**

Pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat terdiri dari pengembangan kawasan pendampingan intensif dan kawasan inisiasi. Kawasan sayuran dan tanaman obat dengan pendampingan intensif merupakan suatu wilayah dengan kesamaan ekonomi dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis pasar mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya secara intensif, penanganan dan pengolahan pasca panen, pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya. Diperlukan dukungan sub sektor terkait secara terintegrasi pada aspek budidaya hingga pemasaran. Sedangkan kawasan inisiasi adalah daerah pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat yang dipersiapkan untuk menjadi kawasan pendampingan intensif yang dilaksanakan pada periode berikutnya.

Sasaran kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat adalah :

- a. Terbentuknya kawasan sayuran dan tanaman obat di kawasan inisiasi dan di kawasan intensif;
- b. Berkembangnya kawasan sayuran organik di beberapa sentra produksi sayuran ;
- c. Optimalisasi lahan pekarangan sebagai sumber sayuran dan tanaman obat untuk kebutuhan keluarga;
- d. Dihasilkannya produk bermutu untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, bahan baku industri dan ekspor dengan menerapkan *GAP* sesuai *SOP* menuju registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan kawasan sayuran dan tanaman obat adalah :

- a. Sekolah Lapang *GAP* sayuran dan tanaman obat;
- b. Pengembangan/ pemberdayaan kelembagaan usaha;

- c. Registrasi lahan usaha sayuran dan tanaman obat;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana;
- e. Peningkatan Mutu Pembinaan (pertemuan, sosialisasi, workshop, pelatihan, promosi).

#### **8. Program/Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan**

Untuk mendukung tercapainya swasembada gula nasional tahun 2014, Provinsi Jawa Tengah bertekad mewujudkan swasembada gula pada tahun 2013, dengan target produksi gula tebu sejumlah 400.000 ton dengan asumsi penduduk 37 Juta Jiwa dan kebutuhan konsumsi per Kapita 12 Kg/tahun. Produksi gula tebu sejumlah 400.000 ton dapat terpenuhi bila target areal seluas 67.000 Ha, produksi tebu sebesar 5.025.000 ton, dan rendemen 8%. Program untuk mewujudkan swasembada gula tersebut adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan dengan kegiatan : (1) regulasi pertebuan dan pergulaan; (2) peningkatan pembinaan kelembagaan perkebunan; (3) permodalan usaha; (4) penyediaan areal; (5) penyediaan bibit unggul dan penataan varietas unggul tebu; (6) penyediaan pupuk bersubsidi dan pestisida; (7) intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman tebu; (8) revitalisasi PG lama dan (9) pendirian PG baru. Kegiatan kegiatan tersebut didukung oleh anggaran APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Swadaya Petani.

#### **9. Program/Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal**

Untuk menyukseskan Program Nasional Swasembada Daging Sapi dan Kerbau tahun 2014, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan berbagai kegiatan untuk memacu pembangunan peternakan. Kegiatan tersebut diantaranya :

- a. Penyediaan bakalan/daging sapi lokal melalui peran aktif kelompok Tani Ternak (KTT) dan Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Jawa Tengah;

- b. Peningkatan produktivitas ternak sapi lokal dengan mengoptimalkan peran BIB dan UPTD lain pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.
- c. Pencegahan pematangan sapi betina produktif melalui sosialisasi dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penjarangan ternak betina produktif dengan memanfaatkan KTT,
- d. Peningkatan penyediaan bibit sapi melalui bantuan sosial pembibitan ternak, Kredit Usaha Pembibitan Sapi, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, dan program CSR BUMN dan Swasta.
- e. Pengaturan ketersediaan daging sapi dalam negeri oleh Pemerintah melalui pengendalian importasi sapi bakalan dan daging sapi.

#### **10. Program/Kegiatan Penyediaan Beras Bersubsidi (Raskin) untuk Rumah Tangga Sasaran**

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Penyaluran Raskin di Jawa Tengah seluruhnya menggunakan mekanisme penyaluran Raskin melalui titik distribusi dimana beras dari Gudang Bulog diantar oleh Satker Raskin sampai ke titik distribusi di Desa/Kelurahan atau tempat lain yang disepakati. Selanjutnya pelaksana distribusi Desa/Kelurahan menyerahkan beras Raskin tersebut kepada RTS-PM.

Untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan menilai pencapaian target serta efektifitas pelaksanaan program Raskin, Tim monitoring dan evaluasi Raskin Provinsi Jawa Tengah secara rutin setiap satu bulan sekali melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kabupaten/Kota. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga dimaksudkan untuk menilai indikator kinerja program Raskin yang ditunjukkan dengan

tercapainya 6 Tepat, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

#### **11. Program/Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan tangkap**

Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui serangkaian kegiatan tangkap, sarana prasarana, yang bersifat ramah lingkungan. Dengan kebijakan melaksanakan optimalisasi usaha perikanan tangkap, memasyarakatkan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pengembangan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap.

#### **12. Program/Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**

Program peningkatan produksi budidaya bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui serangkaian kegiatan berbasis *Culture Bases Fisheries*, optimalisasi produksi benih ikan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai keunggulan komoditas lokal.

#### **13. Program/Kegiatan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan**

Program peningkatan daya saing produk perikanan melalui optimalisasi usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan bertujuan untuk meningkatkan mutu produk, teknologi, sanitasi, dan higienis agar dapat memenuhi persyaratan mutu ekspor maupun pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

#### **14. Program/Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan**

Program kegiatan fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan TPI serta pasar ikan agar dapat berfungsi sesuai standar sehingga pemasaran ikan dalam negeri dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu untuk meningkatkan

konsumsi ikan dilakukan melalui pengembangan promosi berupa event, pameran, dan kegiatan GEMARIKAN.

#### **15. Program/Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan**

Pengembangan SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dilaksanakan secara sinergis dengan sasaran petugas dan petani/masyarakat, sehingga dapat mencapai tujuan, yaitu :

- a. Meningkatkan kompetensi SDM penyuluh melalui pelaksanaan berbagai kegiatan formal maupun non formal (magang, sarasehan, seminar, dan lain-lain).
- b. Meningkatkan jumlah penyuluh PNS dan Non PNS baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota
- c. Melaksanakan Klinik Konsultasi Agribisnis dalam penyelenggaraan penyuluhan di Balai Penyuluhan
- d. Memobilisasi penyuluh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
- e. Meningkatkan produksi dalam Peningkatan Produksi Beras Nasional
- f. Pengawasan dan pendampingan produksi strategis
- g. Meningkatkan sistem latihan dan kunjungan
- h. Pengembangan SL Demplot untuk mempercepat penerapan teknologi di lapangan dengan melakukan : pembinaan terhadap kelompok penerima demplot, penentuan wilayah lokasi demplot sesuai dengan komoditas unggulan daerah, monitoring dan evaluasi terhadap penerima demplot, dan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pendapatan masyarakat melalui penerapan teknologi.

**Tabel 11. RENCANA AKSI PENINGKATAN AKSESIBILITAS  
PANGAN BERAGAM**

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
<b>Provinsi</b>							
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>							
Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang sudah mandiri	7 Desa	15 Desa	17 Desa	44 Desa	56 Desa	68 Desa
	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan	144 Desa	222 Desa	272 Desa	322 Desa	372 Desa	422 Desa
Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan	Jumlah cadangan pangan pemerintah (Provinsi 200 ton)	110 Ton	110 Ton	233 Ton	335 Ton	385 Ton	435 Ton
Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan	Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kkal/kap/hr	3.277 kkal/ kap/hr	3.343 kkal/ kap/hr	3.376 kkal/ kap/hr	3.410 kkal/ kap/hr	3.444 kkal/ kap/hr	3.479 kkal/ kap/hr
	Tersedianya protein minimal 57 gram/kap/hr	86,28 gram/ kap/hr	88,01 gram/ kap/hr	88,89 gram/ kap/hr	89,78 gram/ kap/hr	90,68 gram/ kap/hr	91, 59 gram/ kap/hr
	Skor PPH	86,02	88,70	89,30	91,20	93,08	95,00
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah wilayah rawan pangan yang tertangani oleh PDRP	31 Desa	34 Desa	40 Desa	44 Desa	48 Desa	50 Desa
	Persentase Kab./Kota yang melaksanakan Surveilans Pangan dan Gizi	50%	70%	80%	90%	100%	100%
	Tersedianya peta ketahanan dan kerawanan pangan (FSVA)	29 Kabupaten	537 Kecamatan	8.577 Desa/ Kelurahan	8.577 Desa/ Kelurahan	8.577 Desa/ Kelurahan	8.577 Desa/ Kelurahan



Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Jumlah LDPM di daerah produsen pangan	24 gapoktan	108 gapoktan	138 gapoktan	168 gapoktan	198 gapoktan	228 gapoktan
	Jumlah Kab/Kota yang memiliki data & informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan	35 Kabupaten	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota	35 Kab/ Kota
	Jumlah Kab/ Kota yang melakukan pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota
<b>Provinsi</b>							
<b>Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan</b>							
Kegiatan Pengembangan diversifikasi konsumsi dan penganeekaragaman pangan	Jumlah komoditas pangan segar yang tersertifikasi dan teregistrasi aman dikonsumsi	10 sertifikasi dan 6 registrasi	7 sertifikasi dan 10 registrasi	15 sertifikasi dan 10 registrasi	17 Sertifikasi dan 10 registrasi	19 sertifikasi dan 10 registrasi	21 sertifikasi dan 10 registrasi
	Jumlah desa P2KP	250 Desa	380 Desa	450 Desa	600 Desa	750 Desa	900 Desa
	Jumlah Kab dan Kota yang melaksanakan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	21 Kab/Kota	31 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota
	Jumlah tenaga / petugas lapangan seperti penyuluh (Pendampingan P2KP)	210 Petugas	380 Petugas	400 Petugas	400 Petugas	420 Petugas	420 Petugas

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah Kab/ Kota yang melakukan pemantauan dan pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (termasuk skor PPH & tingkat konsumsi energi rata-rata penduduk)	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota
	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai data dan informasi tentang pola konsumsi penganeekaragaman dan keamanan pangan	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota
<b>Provinsi</b>							
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>							
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman sereal	Luas areal penerapan budidaya sereal yang tepat dan berkelanjutan						
	<i>SL-PTT Padi :</i>						
	= Padi Non Hibrida	158.7 Ha	175.000 Ha	198.000 Ha	211.275 Ha	220.400 Ha	230.875 Ha
	= Padi Hibrida	24.350 Ha	17.970 Ha	18.040 Ha	10.050 Ha	10.000 Ha	10.050 Ha
	= Padi lahan Kering	20.000 Ha	27.100 Ha	45.125 Ha	27.700 Ha	28.050 Ha	28.375 Ha
	<i>SL-PTT jagung:</i>						
	= Jagung Hibrida	18.780 Ha	34.125 Ha	27.600 Ha	76.650 Ha	84.330 Ha	92.715 Ha
Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Luas areal Pengembangan padi non hibrida	2.500 Ha	6.653 Ha	15.000 Ha	16.000 Ha	17.000 Ha	18.000 Ha
	Luas areal Pengembangan jagung hibrida	1.100 Ha	1.300 Ha	2.500 Ha	3.000 Ha	3.500 Ha	4.000 Ha

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Luas arel Pengembangan jagung komposit	0	520 Ha	520 Ha	520 Ha	520 Ha	520 Ha
	Luas areal penerapan budidaya kedelai						
	- SL-PTT Kedelai	38.200 Ha	45.000 Ha	51.000 Ha	55.300 Ha	57.080 Ha	58.900 Ha
	- PMI Kedelai	1.600 Ha	1.700 Ha	1.800 Ha	1.900 Ha	2.000 Ha	2.100 Ha
	- PMI Kacang Tanah	150 Ha	150 Ha	150 Ha	150 Ha	150 Ha	150 Ha
	- PMI Kacang Hijau	480 Ha	500 Ha	520 Ha	540 Ha	560 Ha	580 Ha
	- Pengembangan Ubi Kayu	0	75 Ha	80 Ha	85 Ha	90 Ha	100 Ha
<b>Provinsi</b>							
<b>Program Pengembangan Agribisnis</b>							
Peningkatan produksi, produktivitas & mutu produk tan. berkelanjutan	Luas areal Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah	215 Ha	288 Ha	388 Ha	498 Ha	618 Ha	748 Ha
	Luas areal Perbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman buah	1.456 Ha	1.706 Ha	2006 Ha	2.356 Ha	2.756 Ha	3.206 Ha
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan	Luas areal Pengembangan kawasan tanaman sayuran dan tanaman obat						
	- Sayuran	40 Ha	51 Ha	61 Ha	71 Ha	81 Ha	91 Ha
	- Obat	30 Ha	43 Ha	53 Ha	63 Ha	73 Ha	83 Ha
	Luas areal Pengembangan registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat						

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
	- Sayuran	40 Ha	51 Ha	61 Ha	71 Ha	81 Ha	91 Ha
	- Obat	30 Ha	43 Ha	53 Ha	63 Ha	73 Ha	83 Ha
<b>Provinsi</b>							
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>							
Peningkatan produksi, produktivitas & mutu tanaman semusim	Luas areal Pengembangan areal produksi tebu	55.652 Ha	63.138 Ha	64.400 Ha	67.000 Ha	70.000 Ha	71.000 Ha
	Jumlah Produksi Tebu	3.710.254 Ton	4.630.607 Ton	4.881.635 Ton	5.025.000 Ton	5.097.826 Ton	5.170.652 Ton
	Jumlah Produksi gula Provinsi	281.705 Ton	344.374 Ton	365.865 Ton	400.000 Ton	405.797 Ton	411.594 Ton
<b>Provinsi</b>							
<b>Program Pengembangan Agribisnis</b>							
Peningkatan produksi, Ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal	Jumlah akseptor pada Optimalisasi IB dan INKA	347.000 Akseptor	360.000 Akseptor	370.000 Akseptor	385.000 Akseptor	390.000 Akseptor	405.000 Akseptor
	Jumlah produksi semen beku melalui optimalisasi BIB						
	- Sapi	179.841 Straw	250.000 Straw	280.000 Straw	350.000 Straw	390.000 Straw	410.000 Straw
	- Kambing	18.078 Straw	30.000 Straw	30.000 Straw	40.000 Straw	40.000 Straw	50.000 Straw
	Jumlah LM3 (kelompok) & SMD dalam Pengembangan agribisnis peternakan	90 Kelompok & 79 Orang	57 Kelompok & 50 Orang	57 Kelompok & 50 Orang	57 Kelompok & 50 Orang	57 Kelompok & 50 Orang	57 Kelompok & 50 Orang
	Jumlah kelompok Pengembangan budidaya perunggasan	9 Kelompok	23 Kelompok	25 Kelompok	27 Kelompok	29 Kelompok	31 Kelompok

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah kelompok Pengembangan budidaya aneka ternak	2 Kelompok	4 Kelompok	5 Kelompok	6 Kelompok	7 Kelompok	8 Kelompok
<b>Provinsi</b>							
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>							
	Jumlah kelompok pada pengembangan budidaya ternak perah	4 Kelompok	5 Kelompok	7 Kelompok	9 Kelompok	11 Kelompok	13 Kelompok
	Jumlah kelompok pada pengembangan budidaya ternak sapi potong/kerbau	15 Kelompok	73 Kelompok	75 Kelompok	80 Kelompok	85 Kelompok	90 Kelompok
	Jumlah kelompok pada pengembangan budidaya ternak kambing/domba	29 Kelompok	26 Kelompok	30 Kelompok	35 Kelompok	35 Kelompok	40 Kelompok
	Jumlah kelompok pada pengembangan budidaya aneka ternak	2 Kelompok	4 Kelompok	5 Kelompok	6 Kelompok	7 Kelompok	8 Kelompok
<b>Provinsi</b>							
<b>Program Penyediaan Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin</b>							
Penyediaan Raskin RTS	Jumlah RTS penerima raskin	2.888.361 RTS	2.888.361 RTS	2.888.361 RTS	2.888.361 RTS	2.888.361 RTS	2.888.361 RTS
<b>Provinsi</b>							
<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>							
Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan laut tangkap	212.635 Ton	185.151 Ton	188.854 Ton	192.579 Ton	192.631 Ton	194.557 Ton
	Jumlah produksi perikanan umum daratan tangkap	18.484 Ton	19.052 Ton	19.558 Ton	19.759 Ton	20.086 Ton	20.287 Ton

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
<b>Provinsi</b>							
<b>Program Pengembangan Perikanan Budidaya</b>							
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Volume produksi	189.949 Ton	202.524 Ton	215.931 Ton	229.225 Ton	244.400 Ton	260.579 Ton
<b>Provinsi</b>							
<b>Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan</b>							
Peningkatan daya saing produk perikanan	Jumlah rata-rata konsumsi ikan per kapita provinsi ( kg/kap/th)	12,93 kg/kap /th	13,24 kg/kap/th	13,55 kg/kap/th	13,87 kg/kap/th	14,20 kg/kap/th	14,54 kg/kap/th
Kegiatan fasilitasi penguatan dan pengem- bangan pe- masaran dalam negeri hasil perikanan	Jumlah lokasi pelaksanaan GEMARIKAN	7 Lokasi	8 Lokasi	10 Lokasi	12 Lokasi	14 Lokasi	16 Lokasi
<b>Provinsi</b>							
<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>							
Kegiatan Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang direvitalisasi	186 Lumbung	236 Lumbung	306 Lumbung	376 Lumbung	446 Lumbung	516 Lumbung
Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Jumlah Penyulu- h Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Jawa Tengah	3.254 Orang	3.254 Orang	3.502 Orang	3.843 Orang	4.143 Orang	4.419 Orang
	a. Penyuluh Pertanian	2.352 Orang	2.352 Orang	2.583 Orang	2.816 Orang	3.041 Orang	3.226 Orang
	b. Penyuluh Perikanan	227 Orang	227 Orang	244 Orang	271 Orang	301 Orang	342 Orang
	c. Penyuluh Kehutanan	675 Orang	675 Orang	675 Orang	756 Orang	801 Orang	851 Orang
	d. Jumlah SL Demplot	10 Unit	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	a. SL Demplot Pertanian	4 Unit	4 Unit	8 Unit	12 Unit	16 Unit	20 Unit

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
	b. SL Demplot Perikanan	2 Unit	2 Unit	4 Unit	6 Unit	8 Unit	10 Unit
	c. SL Demplot Hutan Rakyat	2 Unit	2 Unit	4 Unit	6 Unit	8 Unit	10 Unit
	d. SL Demplot Peternakan	2 Unit	2 Unit	4 Unit	6 Unit	8 Unit	10 Unit

### 4.3 Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan di Provinsi Jawa Tengah, akan dilaksanakan program dan kegiatan dari sektor-sektor terkait. Rincian Program dan kegiatan tersebut adalah :

- 1. Program Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya**, melalui kegiatan pengawasan produk dan bahan berbahaya dengan melakukan pengawasan produk pangan yang beredar di Jawa Tengah dengan cara sampling dan pengujian di laboratorium. Parameter uji difokuskan pada identifikasi bahan berbahaya antara lain *formalin*, *boraks*, *Rhodamin B*, dan *metanil Yellow*. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dari APBN oleh Balai Besar POM.
- 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan** melalui kegiatan optimalisasi laboratorium kesehatan masyarakat veteriner jumlah sampel makan yang mengandung bahan berbahaya (uji AB, pestisida dan formalin). Kondisi saat ini telah dilakukan dengan hasil 10% dari 3.750 sampel mengandung pestisida maupun formalin. Sampai tahun 2015 direncanakan akan melakukan pengawasan untuk 6.000 sampel makanan dari hasil ternak. Selain itu penanganan produsen makanan yang mempunyai ijin operasional. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dari APBD oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 3. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan**, melalui kegiatan pengawasan barang beredar dengan indikator

- a. Pengawasan sarana ditribusi pada penjual bahan berbahaya (toko bahan kimia). Jenis pelanggaran yang ditemui adalah tidak semua pengguna menunjukkan bukti diri (untuk meminimalisir penyalahgunaan); penunjukan bukti diri hanya formalitas (tidak tercatat) serta tidak diketahui pengguna akhir (timbul pelanggaran). Tindak lanjut ke depan yang akan dilakukan adalah pembinaan langsung pada sarana penjual serta pembinaan lanjutan diserahkan kepada Dinas/Instansi setempat melalui kegiatan pengawasan barang beredar. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dari APBD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang diawasi, berupa pengawasan terhadap barang beredar baik produk lokal maupun impor termasuk bahan berbahaya ini tidak dimaksudkan untuk mematikan dunia usaha namun diharapkan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan kondusif dengan menyediakan barang dan atau jasa yang berkualitas yang tidak bertentangan dengan ketentuan pemerintah yang berlaku. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dari APBD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Pengawasan produk pangan yang beredar dengan cara sampling dan pengujian di laboratorium. Parameter uji difokuskan pada pemeriksaan kandungan bahan tambahan pangan (pemanis dan pengawet) yang melebihi batas maksimum penggunaan. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dari APBN oleh Balai Besar POM

#### **4. Program/Kegiatan Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan dan Tenaga Pengawasan Pangan Kabupaten/Kota**

Untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi PKP dan tenaga pengawasan pangan di Kabupaten/Kota telah dilakukan oleh Balai Besar POM dengan dana APBD sejak tahun 2003 dengan



melakukan pelatihan tenaga PKP dan tenaga DFI petugas Pemerintah Kabupaten/ Kota.

PKP adalah pegawai negeri sipil yang berkompeten dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan penyuluhan keamanan pangan pada industri rumah tangga pangan. Sedangkan DFI adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten dalam produksi pangan dan bertugas melakukan pengawasan keamanan pangan olahan hasil IRTP. Anggaran kegiatan ini diharapkan dari APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota dengan pelaksana/fasilitator dari Balai Besar POM.

#### **5. Program/Kegiatan Bimbingan Teknis pada Industri Rumah Tangga Pangan.**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang industri rumah tangga pangan melalui:

- a. Pelatihan/Bimtek pada IRTP pada masing-masing kabupaten, dengan materi higiene dan sanitasi, keamanan Pangan (termasuk bahan tambahan pangan), CPPB IRT, peraturan perundang-undangan di bidang pangan, pengemasan dan label pangan, pengendalian proses dan audit internal. Setelah Bimtek, IRTP dikunjungi untuk difasilitasi penerapan CPPB-IRT, sampel produk pangan IRTP disampling, dan diuji di laboratorium terakreditasi.
- b. Monitoring dan verifikasi penerapan CPPB pada IRTP, yang dilakukan pada IRTP yang telah dilatih dan difasilitasi oleh tenaga DFI Balai dan DFI pemerintah Kabupaten/Kota, dan dilakukan 3 bulan setelah kunjungan/fasilitasi.

Anggaran dua kegiatan ini dialokasikan dari APBN oleh Balai Besar POM dan bersifat pembinaan, belum pada tahapan pemberian sanksi bagi IRTP yang melakukan pelanggaran.

## **6. Program/Kegiatan Bimbingan Teknis dan Monitoring pada Kantin Sekolah**

Bimtek dan monitoring pada kantin sekolah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Bimtek kantin sekolah dalam rangka penerapan prinsip keamanan pangan. Peserta Bimtek adalah 5 orang wakil dari masing-masing sekolah (Kepala Sekolah, Guru UKS, Guru Pengawas Kantin, Komite sekolah dan Penjaja di kantin) dengan materi Bimtek : higiene dan sanitasi, keamanan pangan (termasuk bahan tambahan pangan), CPPB kantin sekolah, audit internal, dan demo rapid test kid. Setelah bimtek, kantin sekolah dikunjungi untuk difasilitasi penerapan praktek keamanan sekolah.
- b. Monitoring dan verifikasi penerapan prinsip keamanan pangan di kantin sekolah. Monitoring dilakukan dengan cara audit ke sekolah yang telah dilatih dan difasilitasi, pada saat audit juga dilakukan sampling dan uji sampel yang dicurigai tidak memenuhi persyaratan. Hasil monitoring dapat diajukan usulan untuk penerimaan Piagam Bintang KP bagi kantin sekolah.

Anggaran dua kegiatan ini dialokasikan dari APBN oleh Balai Besar POM. Sekolah yang mendapat bimbingan teknis dan monitoring masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah sekolah di Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan anggaran dari Pemerintah diharapkan sebagai stimulan yang dapat mendorong sekolah-sekolah secara swadaya meminta bimbingan teknis dan monitoring kantin sekolah kepada Balai Besar POM.

- ## **7. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan,** melalui kegiatan peningkatan mutu untuk kantin sekolah dan pembinaan terhadap mutu pangan dan keamanan PJAS yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Balai Besar POM berupa pelatihan dan fasilitasi penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dari APBD oleh Badan Ketahanan Pangan.

Diharapkan sekolah-sekolah secara swadaya tertarik untuk mengadakan pelatihan dan fasilitasi penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolahnya.

**8. Program/Kegiatan Peningkatan Keamanan, mutu, gizi pangan jajanan anak sekolah,** melalui kegiatan peningkatan keamanan mutu, gizi pangan jajanan anak sekolah:

- a. Komunikasi Informasi dan Edukasi PJAS di daerah melalui program intensifikasi mobil laboratorium keliling. Kegiatan KIE dilakukan bersamaan dengan pengawasan PJAS melalui sampling dan pengujian di tempat produk pangan di kantin dan luar kantin sekolah. Sampel adalah PJAS yang diduga mengandung bahan kimia yang dilarang digunakan untuk pangan seperti *formalin*, *boraks*, *rhodamin B* dan *metanil Yellow*. KIE juga dilakukan melalui kampanye keamanan pangan di sekolah, pemberian informasi dan penyebaran leaflet, brosur, dan komik. Sasaran KIE adalah murid sekolah dasar, penjaja PJAS di kantin sekolah dan di luar sekolah.
- b. Sosialisasi Aksi Nasional PJAS melalui pertemuan/Lokakarya/Rapat lintas sektor Aksi Nasional PJAS di Daerah. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh lintas sektor terkait dengan pengawasan dan pembinaan PJAS di daerah. Keluaran dari kegiatan sosialisasi adalah terbentuknya komitmen diantara peserta lokakarya, teridentifikasinya *contact point* masing-masing instansi, dan tersedianya rekomendasi aksi PJAS yang terintegrasi di daerah.

Anggaran kedua kegiatan ini dialokasikan dari APBN oleh Balai Besar POM.

**9. Program Pendidikan Dasar** melalui kegiatan bantuan kantin sehat untuk SD/MI dan SMP/MTs mendukung program PHBS anak sekolah termasuk pola makan anak sekolah yang akan dilaksanakan mulai tahun 2012. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dari APBD oleh Dinas Pendidikan

**10. Program Pengembangan Agribisnis,** melalui kegiatan pengembangan alsintan dan pengembangan mutu hasil pertanian mendukung ketahanan pangan dan hortikultura serta peningkatan sistem jaminan mutu melalui sertifikasi produksi pertanian, yang dilaksanakan mulai dari produk hasil pertanian hingga pascapanen. Dilakukan pembinaan pada kelompok tani dan industri pertanian skala kecil yang berkaitan dengan produk segar dan bahan baku dari produk pertanian. Salah satu langkah untuk menghasilkan produk pertanian yang bermutu dan aman dikonsumsi yaitu dengan penerapan sistem jaminan mutu melalui *GHP* dan *SOP*. Kegiatan untuk penerapan sistem jaminan mutu dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan dilaksanakan antara lain melalui pembinaan dan pengawalan dalam budidaya, pasca panen dan konsumsi oleh konsumen. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dari APBD dan APBN pada Dinperten TPH.

**11. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan** melalui fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dengan pembinaan terhadap UPI yang telah menerapkan GMP dan memenuhi persyaratan SSOP dengan indikator SKP. Hal ini dimaksudkan agar produk yang dihasilkan mempunyai mutu yang baik dan aman untuk dikonsumsi dalam rangka memenuhi tuntutan pasar domestik dan pasar internasional.

Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan produk olahan hasil perikanan, maka penerapan sistem HACCP mutlak diperlukan pada setiap unit UPI. Pada kebanyakan UPI tradisional masih belum atau kurang sempurna dalam menerapkan sistem HACCP melalui peningkatan sarana prasarana. Di sisi lain diterapkan *GAP* dilakukan dengan menerapkan CBIB yang dimulai pemilihan lokasi, proses budidaya sampai dengan panen. Keluaran dari kegiatan adalah peningkatan produktivitas serta jaminan keamanan pangan dengan indikator tidak ada kandungan residu pada produk

perikanan budidaya. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dari APBN oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

**12. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**, melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi secara sistematis dan berkelanjutan yang ditujukan untuk mengetahui keragaman dan penyebaran penyakit dalam suatu populasi dan lingkungan di suatu wilayah dalam rangka menentukan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. Penyebaran penyakit yang dimonitor adalah jenis penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan parasit. Pemantauan dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dengan hasil Peningkatan produktivitas udang/ikan serta terkendalinya hama dan penyakit udang/ikan. Anggaran kegiatan ini dialokasikan dari APBN dan APBD oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

**Tabel 12. RENCANA AKSI PILAR PENINGKATAN PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN**

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
<b>Provinsi</b>							
<b>Pengawasan Produk dan bahan berbahaya</b>							
<b>Program Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya</b>							
Kegiatan sampling dan pengujian produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya	Persentase makanan yang mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang	15,74% (2010)	10.0	9.0	8.0	7.0	6.0
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>							
Kegiatan Optimalisasi Lab kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel makanan yang mengandung bahan berbahaya (uji AB, pestisida dan formalin)	10 % dari 3.750 sampel	10 % dari 4000	10 % dari 4400	10 % dari 5000	10 % dari 5500	10 % dari 6000

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah produsen bahan pangan asal hewan yang mempunyai ijin operasional	22 unit usaha	5	5	6	7	8
<b>Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>							
Kegiatan Pengawasan Barang Beredar	Jumlah sarana distribusi yang diawasi	13 Sarana	22	35	40	45	50
	Jumlah pasar tradisional/ pasar modern yang diawasi	15/ 15	22/ 22	36/ 30	40/ 55	55/ 65	70/ 75
Kegiatan sampling dan pengujian produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya	Persentase bahan tambahan pangan (pemanis dan pengawet) yang melebihi batas maksimum penggunaan	12.7%	9.09	9.09	8.80	8.40	8.00
<b>Provinsi</b>							
<b>Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan dan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food Inspector)</b>							
<b>Program Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan dan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (District Food Inspector)</b>							
Kegiatan Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga PKP dan DFI	1. Jumlah tenaga PKP dan DFI	PKP : 83 DFI : 66	-	-	35 35	35 35	35 35
	2. Persentase bahan tambahan makan yang melebihi dosis	12.70% Th 2010	9.09	9.09	8.80	8.40	8.00
	3. Persentase Kab./Kota yang memiliki jumlah tenaga penyuluh dan pengawas keamanan pangan sesuai standar	(%)  Kab/Kota	2,85  1	8.57  3	14.28  6	22.88  8	34.28  12

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
	(1/40.000) penduduk)						
<b>Provinsi</b>							
<b>Bimbingan Teknis pada Industri Rumah Tangga Pangan</b>							
<b>Program Bimbingan teknis pada Industri Rumah tangga Pangan</b>							
Kegiatan penyuluhan keamanan pangan pada IRTP	1. Jumlah Industri rumah tangga yang mendapatkan penyuluhan	1.050 IRTP	240	75	75	75	75
	2. Jumlah IRTP yang dilatih & difasilitasi desain dan implementasi CPPB pada Industri Rumah Tangga	350 IRTP	80	75	75	75	75
	3. Monitoring & verifikasi penerapan CPPB pada Industri Rumah Tangga	350 IRTP	80	75	75	75	75
<b>Provinsi</b>							
<b>Bimbingan Teknis dan Monitoring pada Kantin Sekolah</b>							
<b>Program Bimbingan Teknis dan Monitoring pada Kantin Sekolah</b>							
Bimbingan Teknis dan Monitoring pada Kantin Sekolah	1. Jumlah kantin sekolah yang sudah mendapatkan pembinaan keamanan pangan	-	22 sekolah	11 sekolah	15 sekolah	20 sekolah	25 Sekolah
	2. Presentase kantin sekolah yang sudah mendapatkan piagam bintang keamanan pangan	3 sekolah	0	25	25	25	25
<b>Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan</b>							

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
	Jumlah kantin sekolah yang dilatih dan difasilitasi penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan di kantin sekolah	6 SD/MI	10	15	30	50	60
	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan pembinaan PJAS	12 SD	20	45	90	150	180
<b>Provinsi</b>							
<b>Peningkatan Keamanan, Mutu, Gizi Pangan Jajanan Anak Sekolah</b>							
<b>Program Peningkatan Keamanan, Mutu, Gizi Pangan Jajanan Anak Sekolah</b>							
Kegiatan KIE dengan operasional mobil keliling	Persentase PJAS yang tidak memenuhi syarat	19,02%	30%	30%	25%	25%	20%
<b>Program pendidikan Dasar</b>							
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan	Jumlah SD/MI dan SMP/MTs yang mendapat bantuan kantin sehat	Sekolah	-	70	100	150	200
<b>Penerapan Good Handling Practise dalam rangka Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan</b>							
<b>Program Pengembangan Agribisnis</b>							
Kegiatan Pengembangan Alsintan mendukung Ketahanan Pangan dan Hortikultura	Jumlah agroindustri yang menerapkan GHP	Pengusaha/ industri pertanian	0	0	2	4	6
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Sertifikasi Hasil Produksi Pertanian	Jumlah kelompok tani yang menerapkan GHP	Kelompok tani	0	4	6	8	10
<b>Penerapan GAP,GHP dan sistem jaminan mutu perikanan budidaya</b>							
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>							
Kegiatan Penerapan GAP, GHP dan sistem jaminan mutu perikanan budidaya	Tersertifikasinya usaha pembudidayaan ikan	40 Unit usaha	115	115	115	115	115



Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Pengolah Ikan skala kecil yang mendapat ketrampilan dalam rangka penganekaragaman produk olahan hasil perikanan	3 ragam olahan	6	9	12	15	18
	Jumlah UPI yang mempunyai SKP.	27 UPI	47	60	75	90	115
<b>Monitoring dan Pengendalian Hama Penyakit</b>							
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>							
Kegiatan Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan	Persentase penurunan hama penyakit ikan dalam rangka menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya	Parasit, virus, bakteri (% penurunan)	5	10	20	30	40

#### 4.4 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan perilaku PHBS di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

##### 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi :

- a. Peningkatan Rumah Tangga Sehat.
- b. Peningkatan mutu desa siaga.

##### 2. Program Pendidikan Dasar

Program ini dikaitkan dengan penyelenggaraan siswa sekolah (SD/MI dan SMP/MTs), melalui kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Siswa dengan sub kegiatan Bantuan Fasilitasi PMT-AS.

**3. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

melalui kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dan warga sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup serta fasilitasi air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat.

**4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak**

melalui kegiatan Fasilitasi peningkatan peran serta Kaum Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menunjang terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.

**5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Melalui kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan Sekitar Industri rokok.

**6. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat**

Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat penyediaan makanan tambahan anak sekolah.

**7. Program Penyediaan Makan dan Minum bagi Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial**

Melalui kegiatan Penyediaan Makan dan Minum bagi Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial.

**8. Program Penjaringan dan Pendampingan Sosial PGOT dan Kelompok Rentan lainnya (PGOT, Anjal, Psikotik, Waria/WTS)**

Melalui kegiatan Penjaringan dan Pendampingan Sosial PGOT dan Kelompok Rentan lainnya (PGOT, Anjal, Psikotik, Waria/WTS).

**Tabel 13. RENCANA AKSI PENINGKATAN PERILAKU  
HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)**

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
<b>Provinsi</b>							
<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>							
Peningkatan Rumah Tangga Sehat	Persentase Kab/ Kota yang men- capai Rumah Tangga sehat 70%	72,64%	77%	89%	100%	100%	100%
Peningkatan mutu desa siaga	Persentase Kab/ Kota yang mempunyai desa siaga aktif (Strata Purnama dan Mandiri) > 30%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Kab/ Kota yang telah mencapai posyandu mandiri 10%	51%	69%	83%	100%	100%	100%
<b>Program Pendidikan Dasar</b>							
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Siswa							
Bantuan Fasilitasi PMT-AS	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan PMT-AS	-	5 TP PKK Kec. di 5 Kab.	29 sklh di 29 Kab	28 sklh di 28 Kab	20 sklh di 20 Kab	15 sklh di 15 Kab
<b>Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>							
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pedesaan dan warga sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah sekolah yang peduli terhadap budaya bersih dan sehat	5 sekolah	5 sekolah	7 sekolah	10 sekolah	8 sekolah	5 sekolah
Fasilitasi air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat	Jumlah Pokmas pengelola sarpras air bersih dan sanitasi	60	60	105	105	105	105

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>							
Fasilitasi peningkatan peranserta kaum Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menunjang terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat	Jumlah kaum perempuan yang meningkat kinerjanya dalam penanganan daur ulang sampah, pembuatan kompos dan pemanfaatan pekarangan	100 org orang	250 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>							
Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan Sekitar Industri rokok	Jumlah warga masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan penataan lingkungan permukiman	150 org	200 org	250 org	300 org	350 org	400 org
<b>Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat</b>							
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	Jumlah Anak SD/MI di Desa/Kelurahan miskin/tertinggal yang mendapat bantuan PMT-AS		1440 anak	1440 anak	7120 anak	2400 anak	3600 anak
	Jumlah Tim Koordinasi PMTAS Kab/Kota, Kec, Desa/Kel & Pokmas Pengelola PMTAS mendapat sosialisasi PMT-AS.	-	-	210 org (6 Kab/Kota)	525 org (15 Kab/Kota)	350 org (10 Kab/Kota)	525 org (15 Kab/Kota)
	Jumlah pengelola PMT-AS, TP PKK Kab/Kota dan TP PKK Kec. Yang mendapat pelatihan pengolahan kudapan PMT-AS	-	-	180 org (6 Kab/Kota)	450 org (15 Kab/Kota)	300 org (10 Kab/Kota)	450 org (15 Kab/Kota)
<b>Program Penyediaan Makan dan Minum bagi Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial</b>							
Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum bagi Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial	Jumlah Penerima Manfaat yang mendapatkan SOSH (25 Balai Rehabilitasi Sosial + 27 Unit Rehabilitasi Sosial)	4092 orang	4092 orang	4112 orang	4132 orang	4152 orang	4172 orang

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
<b>Program Penjaringan dan Pendampingan Sosial PGOT dan Kelompok Rentan lainnya (PGOT, Anjal, Psikotik, Waria/WTS)</b>							
Kegiatan Penjaringan dan Pendampingan Sosial PGOT dan Kelompok Rentan lainnya (PGOT, Anjal, Psikotik, Waria/WTS)	Jumlah Penjaringan melalui TRC pada PMKS	326 orang	430 orang	460 orang	480 orang	450 orang	400 orang

#### 4.5 Penguatan kelembagaan pangan dan gizi

Program/kegiatan penguatan kelembagaan pangan dan gizi di Jawa Tengah dilaksanakan oleh beberapa SKPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Bakorluh dengan pendanaan bersumber pada APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. **Program Sumber Daya Kesehatan** yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Kesehatan (tenaga, sarana, prasarana, penganggaran) dengan fokus kegiatan pemerataan tenaga kesehatan.
2. **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani** yang difokuskan untuk mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang terintegrasi, efektif dan efisien dengan fokus kegiatan peningkatan SDM penyuluh PNS, Swasta dan swadaya.
3. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kependudukan dengan fokus kegiatan penyusunan dokumen SPKD, Optimalisasi peran TKPKD dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan daerah.

4. **Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat** yang difokuskan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan fokus kegiatan Peningkatan peran BUMDES
5. **Program Pendidikan Formal dan Informal** yang difokuskan untuk meningkatkan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan non formal dan informal dengan fokus kegiatan pendidikan kemasyarakatan.
6. **Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak** yang difokuskan untuk membuka akses dan kontrol perempuan pada sumber daya ekonomi dengan fokus kegiatan Pelatihan dan pemberdayaan kelompok wanita tani.
7. **Program pengembangan Diversifikasi dan pola konsumsi pangan** yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dengan fokus kegiatan Intervensi Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA pada SD/MI dan Ponpes.
8. **Program fasilitasi Pendidikan Tinggi** yang difokuskan untuk memfasilitasi pengembangan pendidikan tinggi serta peningkatan peran perguruan tinggi dalam pembangunan daerah dengan fokus kegiatan Pembinaan lingkungan sosial pendidikan tinggi.
9. **Program Perbaikan Gizi Masyarakat** yang difokuskan untuk identifikasi permasalahan dan pemecahan masalah gizi dengan fokus kegiatan percepatan perbaikan gizi.
10. **Program Perencanaan Pembangunan** yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah.
11. **Program Peningkatan Ketahanan Pangan** yang difokuskan untuk untuk mensinergikan perencanaan pembangunan pada seluruh SKPD dan stakeholders terkait pangan dan gizi.

**Tabel 14. RENCANA AKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN PANGAN DAN GIZI**

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
<b>Provinsi</b>							
<b>Program Sumber Daya Kesehatan</b>							
Kegiatan Pemerataan Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan gizi di Puskesmas Penempatan Tenaga Gizi (POLTEKES Gizi)	814 org/ 864 pusk	839 org/ 864 pusk	864 org/ 864 pusk	889 org/ 864 pusk	914 org / 864 pusk	939 org / 864 pusk
<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>							
Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM penyuluh PNS, swasta dan swadaya	Jumlah Kecamatan yang mempunyai tenaga PPL Pertanian yang mengikuti pelatihan pangan dan gizi	0	0	3 Kec. (90 PPL)	3 Kec. (90 PPL)	3 Kec. (90 PPL)	3 Kec. (90 PPL)
<b>Program Perencanaan pembangunan daerah</b>							
Kegiatan Perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Kependudukan	Optimalisasi Peran TKPKD dalam mendukung pangan dan gizi	Provinsi & 35 Kab/ Kota	Provinsi & 35 Kab/ Kota	Provinsi & 35 Kab/ Kota	Provinsi & 35 Kab/ Kota	Provinsi & 35 Kab/ Kota	Provinsi & 35 Kab/ Kota
<b>Program penguatan kelembagaan masyarakat</b>							
Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat	Peningkatan peran BUMDES dalam rangka peningkatan pangan dan gizi masyarakat	56 BUMDES di 28 Kab	56 BUMDES di 28 Kab	58 BUMDES di 29 Kab	58 BUMDES di 29 Kab	58 BUMDES di 29 Kab	58 BUMDES di 29 Kab
<b>Program Pendidikan formal dan informal</b>							
Kegiatan Pendidikan kemasyarakatan	Jumlah Kec mempunyai SDM Pertanian yang mengikuti pelatihan pangan dan gizi :						
	-SL-PTT Hortikultura	0	4 kec	4 kec	4 kec	5 kec	5 kec
	-Magang Budidaya Hortikultura	0	5 kec	5 kec	5 kec	6 kec	6 kec
	-Pelatihan GAP/SOP	0	14 kec	14 kec	14 kec	14 kec	14 kec

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
	-Magang Pasca panen dan pengolahan hasil	0	2 kec	2 kec	2 kec	3 kec	3 kec
	-Magang budidaya hortikultura	0	2 kec	2 kec	2 kec	3 kec	3 kec
<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>							
Kegiatan Pelatihan dan pemberdayaan kelompok wanita tani	Jumlah kelompok wanita tani yang mendapat pelatihan pengembangan usaha peternakan	9 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	6 kelompok
<b>Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan</b>							
Kegiatan Intervensi Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA pada SD/MI dan Ponpes,	Intervensi Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA pada SD/MI dan Ponpes	4 Kab	4 Kab	10 Kab	11Kab/ Kota	12 Kab/ Kota	13 Kab/ Kota
	Jumlah organisasi wanita dan rumah tangga yang mengikuti pelatihan	35 Kab / Kota PKK & KWT	35 Kab / Kota PKK & KWT	35 Kab / Kota PKK & KWT, Dharma wanita	35 Kab / Kota PKK, KWT, Dharma wanita, BKOW	35 Kab / Kota PKK, KWT,Dhar- ma Wanita, BKOW, Persit	35 Kab / Kota PKK, KWT, Dharma Wanita, BKOW, Persit, keaga- maan
<b>Program fasilitasi Pendidikan Tinggi</b>							
Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial pendidikan tinggi	Jumlah Kab/kota memasukkan agenda penelitian pangan dan gizi	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota
	Jumlah Penelitian Murni	40	40	40	40	45	45
	Jumlah Penelitian Terapan	35	35	45	45	45	50
<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>							
Keg. Percepatan perbaikan gizi	Jumlah penelitian zat gizi mikro Tingkat Provinsi	0	0	1	1	1	1



Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian				
			2011	2012	2013	2014	2015
<b>Program Perencanaan Pembangunan</b>							
Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kab/kota yang sudah memasukkan program pangan dan gizi pada RPJMD	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>							
Kegiatan pembinaan dan fasilitasi mutu dan keamanan pangan serta jejaring keamanan pangan	Jumlah Kabupaten dan kota yang mempunyai data tingkat konsumsi energi	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota
	Jumlah Kab/Kota yang menyusun PPH	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota
	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Surveilans pangan dan gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kegiatan Pengembangan Kesmavet & Kesrawan	Jumlah aparat yang telah memiliki sertifikat NKV/ auditor keamanan pangan asal ternak	4 orang	0	2 orang	4 orang	4 orang	4 orang
Kegiatan Koordinasi & sinkronisasi perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	Optimalisasi Peran DKP dalam mendukung pembangunan pangan dan gizi	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **5.1. Tujuan**

Dalam rangka menjamin pencapaian RAD-PG tahun 2011-2015, perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan difokuskan pada kegiatan yang sedang dilaksanakan agar secepatnya dapat diketahui kelemahannya untuk diantisipasi. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat hasil yang dicapai dengan rencana target atau standar yang telah ditentukan.

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Internal adalah :

1. Memberikan masukan terhadap pelaksana untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pelaksana kegiatan;
2. Menyediakan sumber informasi tentang pelaksanaan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi
3. Sebagai salah satu dasar dalam perumusan kebijakan di bidang pangan dan gizi di Jawa Tengah

#### **5.2. Ruang Lingkup**

Lingkup pemantauan dan evaluasi dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek input :

Meliputi sumberdaya yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan dan peran setiap SKPD pelaksana yang terlibat, serta sumber dana yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas untuk menghasilkan capaian dari suatu kegiatan

2. Aspek Proses:

Tahapan kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan program atau kegiatan yang apakah sesuai dengan prosedur (pedoman) yang ditentukan

3. Output :

Capaian hasil kegiatan setelah kegiatan dilakukan tiap tahun

#### 4. Dampak:

Perubahan jangka panjang yang dicapai dari program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui serangkaian efek-efek hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut.

### **5.3. Prinsip Pelaksanaan**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi;
2. Dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya optimal;
3. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
4. Pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
5. Mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi;
6. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi;
7. Dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
8. Berbasis indikator kinerja, (yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan Tujuan RAD-PG)

### **5.4. Tim Pelaksana**

Pelaksana evaluasi dan pemantauan dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab terhadap program dan kegiatan yang direncanakan dalam kurun waktu 2011-2015 pada RAD-PG Provinsi Jawa Tengah, termasuk peran pemangku kepentingan yang peduli terhadap pangan dan gizi. Penanggung jawab pelaporan pemantauan dan evaluasi melekat kepada masing-masing SKPD/Instansi yang berperan sebagai

Ketua Pokja I sampai V dalam Tim RAD-PG yang telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

## **5.5. Metode**

Pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan rutin, dapat dilakukan secara berjenjang, terstruktur dan terjadwal. Pemantauan dan evaluasi internal dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif berbasis program dan kegiatan untuk menilai prestasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Indikator utama yang diukur disini adalah indikator dari kepentingan stakeholders yang dituju.

Agar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, maka setiap SKPD hendaknya menyiapkan beberapa kelengkapan yaitu evaluasi SKPD, rencana strategis, rencana program, kegiatan dan anggaran penyelenggaraan, serta melaporkan hasil kegiatan selama periode tertentu. Setiap unit diwajibkan melaporkan kegiatannya setiap triwulan. Untuk kegiatan fisik dapat mengacu kepada “Pedoman Pengukuran Realisasi Fisik Kegiatan untuk Penyusunan Laporan Perkembangan pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”. Data dan informasi tersebut di atas akan dijadikan pedoman oleh SKPD terkait dalam menjalankan tugasnya.

## **5.6. Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi**

Waktu pemantauan dan evaluasi dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun dibagi dalam tiga rentang yakni di awal, pertengahan dan akhir pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan lama waktu pelaksanaan di sesuaikan dengan kondisi pada masing-masing SKPD.

### **1. Pemantauan dan Evaluasi Awal Pelaksanaan Program**

- a. Melakukan *cross check* terhadap kondisi yang tertulis di dalam RAD-PG dengan kondisi riil di lapangan;

- b. Penentuan dan kesepakatan indikator kinerja pelaksanaan RAD-PG
  - c. Memberikan alternatif pemecahan masalah tentang:
    - 1) Strategi pencapaian tujuan,
    - 2) Kemungkinan keberhasilan yang dapat diraih, serta
    - 3) Kendala yang akan datang
  - d. Memberikan penjelasan pada pihak terkait mengenai mekanisme kerja implementasi RAD-PG
2. Pemantauan dan Evaluasi Pertengahan Pelaksanaan Program
- a. Melihat langsung dampak dari pelaksanaan RAD-PG pada pertengahan implementasi melalui SKPD terkait dan *stakeholders*
  - b. Melihat arah pengembangan pelaksanaan RAD-PG apakah sesuai dengan tujuan yang dicapai
  - c. Menggali kemungkinan keberlangsungan hasil pengembangan dan peningkatan yang telah dicapai
3. Pemantauan dan Evaluasi Akhir Pelaksanaan Program
- a. Melihat langsung dampak dari pelaksanaan RAD PG pada akhir implementasi melalui SKPD terkait dan *stakeholders*:
  - b. Melihat arah pengembangan selanjutnya di SKPD terkait
  - c. Menggali informasi pada indikator capaian, kendala dan masalah serta solusinya.
  - d. Melihat usaha-usaha dalam rangka menjaga keberlangsungan hasil pengembangan dan peningkatan yang telah dicapai oleh SKPD terkait

### **5.7. Biaya Pemantauan dan Evaluasi**

Biaya Pemantauan dan Evaluasi akan dialokasikan pada masing-masing SKPD pengampu masing-masing program/kegiatan yang direncanakan dalam RAD-PG Jawa Tengah kurun waktu tahun 2011-2015.

## **5.8. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi**

Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik maka petugas pemantauan dan evaluasi dilengkapi dengan alat-alat pemantauan dan evaluasi antara lain sebagai berikut:

1. Matrik pemantauan dan evaluasi perkembangan/kemajuan pelaksanaan kegiatan menunjukkan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan proses dan sistem yang direncanakan oleh SKPD. Pelaporan pada indikator ini membutuhkan analisis pengumpulan data dan informasi secara periodik. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi lebih ditekankan kepada kendala-kendala yang terjadi di setiap SKPD, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, serta mengukur efektivitas penanganan untuk mengatasi hambatan baik dari segi aturan maupun hambatan lain yang bersifat variatif di setiap SKPD. Tim pemantauan dan evaluasi diwajibkan memberikan saran perbaikan agar pelaksanaan kegiatan di SKPD tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga terdapat kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian tujuan kegiatan tersebut.
2. Selain matrik, petugas pemantauan dan evaluasi juga dilengkapi dengan alat pemantauan lain berupa daftar pertanyaan yang wajib diisi oleh setiap SKPD yang dipantau.
3. Petugas pemantauan dan evaluasi dalam melaksanakan tugasnya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengidentifikasi kegiatan pengembangan kapasitas pada tahun berjalan.
  - b. Mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan saran untuk perbaikannya.
  - c. Mengidentifikasi perubahan prestasi pada SKPD yang dipantau.

- d. Mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan
  - e. Mengidentifikasi tindakan yang dibutuhkan oleh SKPD tersebut guna perbaikan dalam pelaksanaannya.
  - f. Menilai dan melihat secara langsung dampak dari pelaksanaan kegiatan di SKPD tersebut.
  - g. Melihat arah perkembangan SKPD tersebut selanjutnya.
  - h. Melihat usaha-usaha yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangka menjaga keberlangsungan hasil kegiatan tersebut.
  - i. Menilai capaian, kendala dan masalah yang dihadapi serta solusinya dilaksanakan berdasarkan wawancara dengan responden kunci seperti pejabat, penanggungjawab program dan kegiatan serta stakeholders lainnya, mengevaluasi dokumen tertulis, meninjau lapangan dan bentuk lainnya jika diperlukan. Sebelum pelaksanaan disusun jadwal kegiatan untuk disebarkan kepada seluruh SKPD yang akan dipantau. Setelah kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan, dibuat laporan hasil pemantauan yang disusun dalam bentuk matrik temuan di lapangan, saran perbaikan dan kesanggupan SKPD menindaklanjuti temuan.
4. Alat ukur lain (matrik, daftar pertanyaan, dan lain-lain) jika diperlukan dapat dibuat oleh petugas pemantauan dan evaluasi.

Adapun indikator kinerja upaya pencapaian target RAD-PG merupakan indikator proses dari setiap langkah program percepatan pencapaian target RAD-PG secara lintas sektor yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi dan sinergi untuk mencapai sasaran pokok.

**Tabel 15. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RAD-PG  
Tahun 2011-2015**

<b>NO</b>	<b>PILAR PEMBANGUNAN PANGAN GIZI</b>	<b>TARGET KELUARAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1.	Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya cakupan ASI eksklusif, D/S, KN dan K4	Dinkes, Bapermasdes, PKK, BP3AKB, BKP
2.	Aksesibilitas Pangan Beragam	Meningkatnya Tingkat Keragaman Konsumsi dan Skor PPH	BKP, Dinperten TPH, Dinakeswan, Dinlutkan, Dinbun, Dinperindag, BULOG
3.	Mutu dan Keamanan Pangan	Meningkatnya cakupan jajanan anak sekolah yang memenuhi syarat dan produk PIRT tersertifikasi	Dinperindag, Dinakeswan, Balai Besar POM, Dinkes, BKP, Dinlutkan, Dinperten TPH, Dindik
4.	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya Rumah Tangga yang ber PHBS	Dinkes, Dinsos, Dindik, BLH, Bapermasdes
5.	Kelembagaan Pangan dan Gizi	1. Meningkatkan peran SKPD bidang pangan dan gizi di Kab/Kota. 2. Bertambahnya peraturan perundangan pangan dan gizi	BKP, Bappeda



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan di bidang pangan dan gizi untuk kurun lima tahun. RAD-PG Provinsi Jawa Tengah disusun dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (RAD-MDGs) Provinsi Jateng Tahun 2011-2015 dan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2011-2015.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 memuat arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat. RAD-PG menjadi panduan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota, masyarakat, swasta, organisasi profesi yang merupakan pemangku kepentingan terkait program pangan dan gizi. Oleh karena itu RAD-PG ini perlu diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dalam rencana pembangunan jangka menengah yaitu RPJM-D dan Renstra SKPD maupun dalam rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD dan Renja SKPD.

Keberhasilan RAD-PG Jawa Tengah sangat tergantung dukungan pendanaan Pemerintah Daerah dalam APBD dan berbagai sumber pendanaan dari partisipasi swasta dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen dari pemerintah daerah dan DPRD terutama dalam penyediaan tenaga dan pembiayaan untuk implementasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam RAD-PG. Selain itu diperlukan pula koordinasi dan sinergi antar berbagai pihak, baik antar SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten/Kota, maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta guna menyatukan arah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat Jawa Tengah.

**REKAPITULASI RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN  
RAD-PG PROVINSI JAWA TENGAH 2011-2015**

(Dalam jutaan Rupiah)

NO	PILAR	2011		2012		2013		2014		2015	
		APBN	APBD	APBN	APBD	APBN	APBD	APBN	APBD	APBN	APBD
1.	GIZI MASYARAKAT	6.090	5.000	6.411	5.750	6.780	6.300	7.707	6.250	7.400	6.600
2.	AKSESIBILITAS PANGAN	108.797	44.307	2.706.180	50.307	2.717.552	57.270	2.670.296	63.454	2.683.243	71.774
3.	MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	2.811	345	11.213	2.515	1.642	4.187	2.150	6.449	2.198	8.310
4.	POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT	140	25.666	160	28.510	180	29.432	200	28.322	230	28.676
5.	KELEMBAGAAN PANGAN DAN GIZI	175	3.277	195	3.585	415	4.087	425	4.666	425	5.419
TOTAL		118.013	78.595	2.724.159	90.667	2.726.569	101.276	2.680.778	109.141	2.693.496	120.779

REKAPITULASI KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN TARGET RAD-PG PROV. JATENG SELAMA 5 TAHUN DALAM :

- 1. APBN : Rp. 10,943 Trilyun
- 2. APBD : Rp. 500,458 Milyar
- TOTAL KESELURUHAN : Rp. 11,443 Trilyun

## PILAR 1: GIZI MASYARAKAT

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>NASIONAL</b>														
Peningkatan Pembinaan Gizi Masyarakat	1. Persentase balita gizi buruk dirawat sesuai standar	100	100	100	100	100	100	536,0	564,0	643,0	660,0		APBN	KEMENKES
	2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	61,3	65,0	67,0	70,0	75,0	80,0							
<b>PROVINSI</b>														
<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>														
UPGK	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	75%	78	81	84	87	90	300	350	400	450	500	APBD	BAPERMAS-DES
	Jumlah puskes- mas non pera- watan memiliki tenaga yang te- lah dilatih tata laksana gizi buruk.	35	150	250	350	450	576 (100 %)	500	600	700	800	900	APBN	DINKES

## PILAR 1: GIZI MASYARAKAT

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah puskesmas perawatan yang memiliki alat dapur dan sarana melaksanakan tatalaksana gizi buruk	130	150	200	230	260	290 (100%)	300	400	500	600	700	APBN	DINKES
	Persentase kasus gizi buruk paska perawatan yang didampingi oleh kader	60%	80%	90%	90%	100%	100%	200	300	400	500	500	APBD	DINKES
	Persentase posyandu dengan pelatihan ulang kader.	0	10%	20%	30%	40%	60%	300	400	500	600	700	APBN	DINKES
	Persentase posyandu yang dilakukan pembinaan kader.	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100	200	300	400	500	APBD	BAPERMASDES
	Jumlah posyandu yang memiliki sarana dan prasarana pemantauan pertumbuhan	10%	25%	50%	60%	70%	80%	500	600	700	800	900	APBN	DINKES
	Jumlah posyandu yang memperoleh dana operasional	7754	246	500	500	500	500	200	300	300	300	300	APBD	BAPERMAS-DES

## PILAR 1: GIZI MASYARAKAT

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Integrasi PAUD, BKB dan Posyandu (Pengembangan Posyandu Model)	2500	3000	3500	4000	0	0	300	400	500	0	0	APBD	BAPERMASDES
	Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	95	95	95	95	95	95	0	0	0	0	0	APBD	DINKES
	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	60%	65	67	70	75	80	300	400	500	600	700	APBN	DINKES
	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan sesuai standar	100%	100	100	100	100	100	2500	2500	2500	2500	2500	APBD	DINKES
	Persentase Kader Posyandu Aktif	88%	90%	91%	92%	93%	94%	0	0	0	0	0		DINKES
	Persentase Kab/ Kota yang mempunyai peraturan tentang ASI Eksklusif	3%	10%	30%	40%	50%	60%	400	600	700	800	900	APBD	DINKES

## PILAR 1: GIZI MASYARAKAT

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penanggulangan GAKI	Cakupan rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium	70%	75	80	83	87	90	500	600	700	800	900	APBD	DINKES
SKPG	Jumlah kasus gizi buruk yang memperoleh obat gizi buruk	3468 Orang/ kasus	3468 (100%)	3468 (100%)	3468 (100%)	3468 (100%)	3468 (100%)	500	500	500	500	500	APBD	DINKES
	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan surveillance gizi khusus	0	3	20	30	35	35	60	340	200	100	0	APBN	DINKES
UPGI	Jumlah puskesmas perawatan dan RSUD memiliki tenaga yang dilatih tata laksana gizi buruk	182	259	332 (100%)	332 (100%)	332 (100%)	332 (100%)	1068	587	0	0	0	APBN	DINKES
	Jumlah puskesmas, yang telah dilatih dengan pemantauan pertumbuhan balita	52	300	450	600	750	901 (100%)	1500	2000	2500	3000	3500	APBN	DINKES

## PILAR 1: GIZI MASYARAKAT

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Pendanaan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pelayanan KIA	Cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah (Fe) sebanyak 90 tablet	71%	74%	78%	80%	81%	85%	490	520	537	547	0	APBN	DINKES
	Cakupan kunjungan pertama Neonatus (KN1)	95%	86%	88%	89%	90%	90%	0	0	0	0	0		DINKES
	Cakupan kunjungan keempat ibu hamil (K4)	92%	96%	98%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0		DINKES

## PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Penda- naan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PROVINSI</b>														
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>														
1. Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan	a. Jumlah desa mandiri pangan yang sudah mandiri	-	-	1 desa	24 desa	34 desa	44 desa	-	150	2.200	2.420	2.662	APBD	BKP
		7 desa	15 desa	16 desa	20 desa	22 desa	24 desa	4.000	4.400	4.840	5.324	5.856	APBN	
	b. Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan	144 desa	222 desa	272 desa	322 desa	372 desa	422 desa	10.000	14.000	16.000	18.000	20.000	APBD + APBN	BKP
2. Kegiatan Pengembangan Cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah	Jumlah cadangan pangan pemerintah (Provinsi 200 ton)	110	110	233	335	385	435	2.000	2.000	2.200	2.420	2.662	APBD	BKP
3. Kegiatan Penanganan kerawanan pangan	a. Jumlah wilayah rawan pangan yang tertangani oleh PDRP	31 desa	34 desa	40 desa	44 desa	48 desa	50 desa	1.125	1.875	2.600	3.500	4.000	APBN	BKP



## PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Penda- naan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	b. Tersedianya peta ketahanan dan kerawanan pangan (FSVA)	29 Kabupaten	537 Kecamatan	8.577 Desa/Kelurahan	8.577 Desa/Kelurahan	8.577 Desa/Kelurahan	8.577 Desa/Kelurahan	50	120	3.000	3.000	3.000	APBD + APBN	BKP
	c. Persentase Kab./Kota yang melaksanakan Surveilans Pangan dan Gizi/SKPG	50%	70%	80%	90%	100%	100%	175	325	1.000	1.000	1.000	APBN	BKP
4. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	a. Jumlah LDPM di daerah produsen pangan	24 gapoktan	108 gapoktan	138 gapoktan	168 gapoktan	198 gapoktan	228 gapoktan	13.263	16.578	20.723	25.904	32.380	APBN	BKP
	b. Jumlah Kab/Kota yang memiliki data & informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan	35 Kabupaten	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	323,75	404,69	505,86	632,32	790,41	APBN	BKP

## PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Penda- naan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	c. Jumlah Kab/ Kota yang melakukan pemantauan dan peman- tapan distri- busi, harga dan akses pangan	35 Kabupaten	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	353	441,25	551,56	689,45	861,82	APBN	BKP
5. Analisis ketersedia- an pangan	a. Mempertahan kan ketersedia- an energi per kapita minimal 2200 kkal/kap/ hari	3.277 kkal/kap/ hari	3.343 kkal/kap/ hari	3.376 kkal/kap/ hari	3.410 kkal/kap/ hari	3.444 kkal/kap/ hari	3.479 kkal/kap/ hari	300	500	700	900	1.100	APBD	BKP
	b. Tersedianya protein mini- mal gr/kap/ hari minimal 57 gram	86,28 gr/kap/ hari	88,01 gr/kap/ hari	88,89 gr/kap/ hari	89,78 gr/kap/ hari	90,68 gr/kap/ hari	91,59 gr/kap/ hari							
<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>														
Kegiatan Fasilitasi lumbung pangan masyarakat	Jumlah lumbung pangan masyara- kat yang direvitalisasi	186 lumbung	236 lumbung	306 lumbung	376 lumbung	446 lumbung	516 lumbung	2.265	3.845	5.345	6.845	8.545	APBD dan APBN	BKP
Kegiatan Penyuluhan	a. Jumlah Pen- yuluh :	3.254	3.254	3.502	3.843	4.143	4.419	9.708	13.048	14.621	15.909	16.968	APBN	SET BAKORLUH

## PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Penda- naan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	▪ Penyuluh Pertanian	2.352	2.352	2.583	2.816	3.041	3.226							
	▪ Penyuluh Perikanan	227	227	244	271	301	342							
	▪ Penyuluh Kehutanan	675	675	675	756	801	851							
	b. Jumlah SL. Demplot :	10 Unit	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit	148	325	488	651	814	APBD	SET BAKORLUH
	▪ SL.Demplot Pertanian	4 Unit	4 Unit	8 Unit	12 Unit	16 Unit	20 Unit							
	▪ SL.Demplot Perikanan	2 Unit	2 Unit	4 Unit	6 Unit	8 Unit	10 Unit							
	▪ SL.Demplot Hutan Rakyat	2 Unit	2 Unit	4 Unit	6 Unit	8 Unit	10 Unit							
	▪ SL. Demplot Pternakan	2 Unit	2 Unit	4 Unit	6 Unit	8 Unit	10 Unit							
<b>Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan</b>														
Kegiatan Penanganan sertifikasi dan pelabelan serta Pengawasan BMR Buah dan Sayur segar	Jumlah sertifikasi prima dan pendaftaran pangan segar	10 sertifikasi dan 6 pendaftaran pangan segar	7 sertifikasi dan 10 pendaftaran pangan segar	15 sertifikasi dan 10 pendaftar- an pangan segar	17 sertifikasi dan 10 pendaftar- an pangan segar	19 sertifikasi dan 10 pendaftar- an pangan segar	21 sertifikasi dan 10 pendaftar- an pangan segar	970	1.200	1.500	2.000	2.500	APBD dan APBN	BKP

## PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Penda- naan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan</b>														
Kegiatan Pe- ngembangan diversifikasi konsumsi & penganekar- agaman pangan	Skor PPH	86,02	88,7	89,3	91,2	93,08	95	200	225	300	325	350	APBN	BKP
	Jumlah desa P2KP	210 Desa	300 Desa	350 Desa	400 Desa	450 Desa	500 Desa	3.535	4.420	5.000	5.500	6.000	APBN	BKP
		40 Desa	80 Desa	100 Desa	200 Desa	300 Desa	400 Desa	850	700	1.400	2.100	2.800	APBD	BKP
	Jumlah Kab / Kota yang melak- sanakan promosi penganekaragam- an konsumsi pangan dan kea- manan pangan	21 Kab/kota	31 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	1.355	1.355	1.500	1.500	1.600	APBN	BKP
	Jumlah tenaga / petugas lapangan seperti penyuluh (Pendampingan P2KP)	241 petugas	330 petugas	369 petugas	419 petugas	438 petugas	457 petugas	1.330	1.400	1.400	1.470	1.470	APBN	BKP

## PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Penda- naan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan & keamanan pangan (termasuk skor PPH dan tingkat konsumsi energi rata-rata penduduk)	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	1.578,4	1.750	1.750	2.000	2.000	APBN	BKP
		35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	264,38	275	275	290	290	APBD	BKP
	Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi penganekaragaman dan keamanan pangan	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	350	350	400	500	500	APBN	BKP
<b>PROVINSI</b>														
<b>Program peningkatan Ketahanan Pangan</b>														
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman sereal	Luas areal penerapan budidaya sereal yang tepat dan berkelanjutan (ha)							1.213,70	1.274,38	1.338,10	1.405,00	1.475,26	APBN	DINPER-TAN TPH

## PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Penda- naan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	- <i>SL-PTT Padi :</i>													
	• Padi Non Hibrida	158.750	175.000	198.000	211.275	220.400	230.875							
	• Padi Hibrida	24.350	17.970	18.040	10.050	10.000	10.050							
	• Padi lahan Kering	20.000	27.100	45.125	27.700	28.050	28.375							
	- <i>SL-PTT jagung</i>													
	• SL-PTT Jagung Hibrida	18.780	34.125	27.600	76.650	84.330	92.715							
Kegiatan Peningkatan Produksi & Produktivitas Tanaman Pangan	- Pengembangan Padi Non Hibrida (Ha)	2.500	6.653	15.000	16.000	17.000	18.000	1.511	3.652,5	3.896	4.139,5	4.383	APBD	DINPER-TAN TPH
	- Pengembangan Jagung Hibrida (Ha)	1.100	1.300	2.500	3.000	3.500	4.000	975.000	1.875	2.250	2.625	3.000	APBD	DINPER-TAN TPH
	- Pengembangan Jagung Komposit (Ha)	0	520	520	520	520	520	182	182	182	182	182	APBD	DINPER-TAN TPH

## PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Penda- naan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PROVINSI</b>														
<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Berkelanjutan</b>														
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>														
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman aneka kacang dan umbi	Luas areal pene- rapan budidaya kedelai													
	- SL-PTT Kedelai	38.200	45.000	51.000	55.300	57.080	58.900	580	609	639,145	671,422	704,994	APBN	DINPER- TAN TPH
Peningkatan Produksi & Produktivitas Tanaman Pangan	- PMI Kedelai	1600 Ha	1.700 Ha	1.800 Ha	1.900 Ha	2.000 Ha	2.100 Ha	300	320	340	360	380	APBD	DINPER- TAN TPH
	- PMI Kacang Tanah	150 Ha	150 Ha	150 Ha	150 Ha	150 Ha	150 Ha	780	780	780	780	780	APBD	DINPER- TAN TPH
	- PMI Kacang Hijau	480 Ha	500 Ha	520 Ha	540 Ha	560 Ha	580 Ha	172.500	179,4	186,3	193,2	200,1	APBD	DINPER- TAN TPH
	-Pengembangan Ubi Kayu	0 Ha	75 Ha	80 Ha	85 Ha	90 Ha	100 Ha	262,5	280	297,5	315	350	APBD	DINPER- TAN TPH

## PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Penda- naan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PROVINSI</b>														
<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan</b>														
<b>Program Pengembangan Agribisnis</b>														
Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah	a. Luas areal Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah (Ha)	215 Ha	288 Ha	388 Ha	498 Ha	618 Ha	748 Ha	2.059,75	2.100	2.200	2.300	2.400	APBN	DINPER-TAN TPH
Perbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman buah	b. Luas areal Perbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman buah	1.456 Ha	1.706 Ha	2.006 Ha	2.356 Ha	2.756 Ha	3.206 Ha	1.140	1.500	1.750	2.000	2.500	APBN	DINPER-TAN TPH
<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Obat Berkelanjutan</b>														
<b>Program Pengembangan Agribisnis</b>														
Kegiatan Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman sayuran dan tanaman obat	a. Luas areal Pengembangan kawasan Tanaman sayuran dan tanaman obat (Ha)							1.332	1.390	1.470	1.540	1.619	APBN	DINPER-TAN TPH
	- Sayuran	40	51	61	71	81	91							



## PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Penda- naan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
berkelanjutan	- Obat	30	43	53	63	73	83							
	b.Luas areal Pengembangan registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat (Ha)													
	- sayuran	40	51	61	71	81	91							
	- Obat	30	43	53	63	73	83							
<b>PROVINSI</b>														
<b>Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan</b>														
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>														
Kegiatan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim	a. Luas areal pengembangan produksi tebu (Ha)	55.652	63.138	64.400	67.000	70.000	71.000	5.081	6.000	6.250	6.250	6.250	APBD	DINBUN
	b. Jumlah Produksi Tebu (ribu ton)	3.710,25	4.630,61	4.881,64	5.025,00	5.097,83	5.170,65	17.596	81.000	81.000	20.000	20.000	APBN	DINBUN
	c. Jumlah Produksi gula Provinsi (ton)	281.705	344.374	365.865	400.000	405.797	411.594							

## PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Penda- naan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PROVINSI</b>														
<b>Program Pengembangan Agribisnis</b>														
Kegiatan Peningkatan produksiTer-nak dengan pendayaguna-an sumber daya lokal	a. Jumlah akseptorOpti malisasi IB dan INKA (akseptor)	347.000	360.000	370.000	385.000	390.000	405.000	5.000	4.000	6.000	5.000	7.000	APBD	DINNAK KESWAN
	b. Jumlah Produksi semen beku, melalui optimalisasi Balai Inseminasi Buatan (BIB) (straw) :							3.600	3.800	5.200	4.700	4.700	APBD	DINNAK KESWAN
	- Sapi	179.841	250.000	280.000	350.000	390.000	410.000							
	- Kambing	18.078	30.000	30.000	40.000	40.000	50.000							
<b>Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)</b>														
Kegiatan Pengembang-an agribisnis peternakan melalui LM3 dan SMD	Jumlah SMD (orang)	79 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	13.075	13.075	13.075	13.075	13.075	APBN	DINNAK KESWAN
	Jumlah LM3 (kelompok)	90 kelompok	57 kelompok	57 kelompok	57 kelompok	57 kelompok	57 kelompok	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	APBN	DINNAK KESWAN

## PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Penda- naan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kegiatan Pengembangan budidaya perunggasan	Jumlah kelompok Pengembangan budidaya perunggasan	9 kelompok	23 kelompok	25 kelompok	27 kelompok	29 kelompok	31 kelompok	4.230	4.500	5.000	5.500	6.000	APBN	DINNAK KESWAN
Kegiatan Pengembangan budidaya aneka ternak	Jumlah kelompok budidaya aneka ternak	2 kelompok	4 kelompok	5 kelompok	6 kelompok	7 kelompok	8 kelompok	280	300	350	400	450	APBN	DINNAK KESWAN
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>														
Kegiatan Pengembangan budidaya ternak Perah	Jumlah kelompok budidaya ternak Perah (kelompok)	4 kelompok	5 kelompok	7 kelompok	9 kelompok	11 kelompok	13 kelompok	1.722	2.500	3.000	3.500	4.000	APBN dan APBD	DINNAK KESWAN
Kegiatan Pengembangan Budidaya ternak sapi potong/ kerbau	Jumlah kelompok budidaya ternak sapi potong/ kerbau (kelompok)	15 kelompok	73 kelompok	75 kelompok	80 kelompok	85 kelompok	90 kelompok	30.807	33.000	36.000	40.000	45.000	APBN dan APBD	DINNAK KESWAN
Kegiatan Pengembangan Budidaya ternak kambing/domba	Jumlah kelompok ternak Pengembangan Budidaya ternak kambing/domba	29 kelompok	26 kelompok	30 kelompok	35 kelompok	35 kelompok	40 kelompok	3.720	4.000	4.100	4.200	4.300	APBN dan APBD	DINNAK KESWAN

## PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Penda- naan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>PROVINSI</b>														
<b>Program Penyediaan Beras Bersubsidi (Raskin) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS)</b>														
Kegiatan Penyediaan Beras Bersubsidi (Raskin) untuk RTS	Jumlah RTS penerima raskin	2.888.361	2.888.361	2.888.361	2.888.361	2.888.361	2.888.361	2.521.539	2.521.539	2.521.539	2.521.539	2.521.539	APBN	BULOG (*)
<b>PROVINSI</b>														
<b>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</b>														
Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap	a. Jumlah produksi perikanan laut tangkap (ton)	212.635	185.151	188.854	192.579	192.631	194.557	1.348	1.482	1.631	1.794	1.940	APBN	DINLUTKAN
	b. Jumlah produksi perikanan umum daratan tangkap (ton)	18.484	19.052	19.558	19.759	20.086	20.287							
<b>Program Pengembangan Perikanan Budidaya</b>														
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Volume produksi ( ton)	189.949	202.524	215.931	229.225	244.400	260.579	310	216	238	262	288	APBN	DINLUTKAN

## PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Penda- naan	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan</b>														
1. Kegiatan Peningkatan daya saing produk perikanan	Jumlah rata-rata konsumsi ikan per kapita provinsi ( kg)	12,93 kg/kap/th	13,24 kg/kap/th	13,55 kg/kap/th	13,87 kg/kap/th	14,20 kg/kap/th	14,54 kg/kap/th	203	84	93	102	112	APBN	DINLUTKAN
2. Kegiatan fasilitasi penguatan & pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan	Jumlah lokasi pelaksanaan GEMARIKAN	7 lokasi	8 lokasi	10 lokasi	12 lokasi	14 lokasi	16 lokasi	226	250	300	350	400	APBD dan APBN	DINLUTKAN

(\*)Tahun 2013-2015 angka sasaran dan pagu indikatif dicantumkan sama dengan tahun sebelumnya dikarenakan angka belum dapat dipastikan dan belum direncanakan (jumlah sasaran RTS-PM tergantung dari data jumlah masyarakat miskin menurut perhitungan BPS, sedangkan pagu indikatif menyesuaikan jumlah RTS-PM dan Kuntum beras/RTS yang akan diberikan).

### PILAR 3: MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>NASIONAL</b>														
Pengawasan obat dan makanan	Proporsi makanan yang memenuhi syarat		80	85	88	90	93						APBN	BADAN POM
<b>NASIONAL</b>														
Pengawasan produk dan bahan berbahaya	Persentase makanan yang mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang		20	15	12	10	8						APBN	BADAN POM
<b>PROVINSI</b>														
<b>Pengawasan produk dan bahan berbahaya</b>														
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>														
Kegiatan Optimalisasi Lab kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel makanan yang mengandung bahan berbahaya (uji AB, pestisida dan formalin)	10 % dari 3.750 sampel	10 % dari 4000	10 % dari 4400	10 % dari 5000	10 % dari 5500	10 % dari 6000	58	60	60	60	66	APBD	DINNAK KESWAN
<b>Program Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya</b>														
Kegiatan sampling & pengujian produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya	Persentase makanan yang mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang	15,74% (2010)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	103	125	150	182	218	APBN	BALAI BESAR POM

### PILAR 3: MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>														
Kegiatan Pengawasan Barang Beredar	1 Jumlah sa- rana distribusi yang diawasi	13 sarana	22 sarana	35 sarana	40 sarana	45 sarana	50 sarana	30	33	36	37	39	APBD	DINPERIN DAG
	2 Jumlah pasar tradisional/ pasar modern yang diawasi	15/ 15	22/ 22	36/ 30	40/ 55	55/ 65	70/ 75	64	84	86	88	90	APBD	DINPERIN DAG
Kegiatan sam- pling dan pengu- jian produk pa- ngan yang didu- ga mengandung bahan berbahaya	Persentase bahan tambahan pa- ngan yang mele- bihi batas mak- simum penggu- naan	12.7% Tahun 2010	9,09	9,09	8,80	8,40	8,00	207	249	301	364	437	APBN	BALAI BESAR POM
<b>NASIONAL</b>														
Inspeksi dan Sertifikasi makanan	1 Persentase sa- rana produksi makanan MD yang memenu- hi standar GMP yang terkini		55	60	65	70	75						APBN	BADAN POM
	2 Persentase sa- rana produksi makanan bayi dan anak yang memenuhi standar GMP yang terkini		25	40	60	80	85						APBN	BADAN POM

### PILAR 3: MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	3 Persentase sarana penjualan makanan yang memenuhi standar GRP/GDP		15	35	45	55	60						APBN	BADAN POM
<b>PROVINSI</b>														
<b>Inspeksi dan sertifikasi makanan</b>														
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>														
Kegiatan Optimalisasi Lab kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah produsen pangan asal hewan yang mempunyai ijin operasional	22 unit usaha	5	5	6	7	8	35	35	35	35	35	APBD	DINNAK KESWAN
<b>NASIONAL</b>														
Kegiatan peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga PKP dan DFI	Jumlah tenaga PKP dan DFI		600 tenaga PKP dan 600 tenaga DFI	1.350 tenaga PKP dan 1.350 tenaga DFI	1.350 tenaga PKP dan 1.350 tenaga DFI	1.350 tenaga PKP dan 1.350 tenaga DFI	1.350 tenaga PKP dan 1.350 tenaga DFI						APBN	BADAN POM
<b>PROVINSI</b>														
<b>Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga PKP dan DFI</b>														
<b>Program Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga PKP dan DFI</b>														



### PILAR 3: MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kegiatan peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga PKP dan DFI	1 Jumlah PKP dan DFI	PKP : 85	-	-	70 orang	70 orang	70 orang	0	0	210	227	245	APBD	
		DFI : 66	-	-	70 orang	70 orang	70 orang	0	0	210	227	245	APBD	
	2 Persentase Kab/Kota yang memiliki jumlah tenaga penyuluh dan pengawas keamanan pangan sesuai standar (1/40.000 penduduk)	Persentase	2,85 %	8,57%	14,28%	22,88%	34,28%							
		Kab./Kota	1	3	6	8	12							
<b>NASIONAL</b>														
Bimbingan Teknis pada IRTP	1 Jumlah penyusunan modul penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan pada proses produksi di IRTP berdasarkan jenis produknya		60 paket	140 paket	140 paket	140 paket	120 paket						APBN	BADAN POM

### PILAR 3: MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2 Jumlah IRTP . yang dilatih dan difasilitasi penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan pada proses produksi di IRTP berdasarkan jenis produknya		600 IRTP	1.725 IRTP	1.725 IRTP	1.725 IRTP	1.725 IRTP						APBN	BADAN POM
	3 Jumlah IRTP . yang dilatih dan difasilitasi desain dan implementasi CPPB pada industri Rumah Tangga		450 IRTP	3.000 IRTP	3.000 IRTP	3.000 IRTP	3.000 IRTP						APBN	BADAN POM
	4 Monitoring dan . verifikasi penerapan CPPB pada Industri Rumah Tangga		450 IRTP	3.000 IRTP	3.000 IRTP	3.000 IRTP	3.000 IRTP						APBN	BADAN POM
<b>PROVINSI</b>														
<b>Bimbingan Teknis pada IRTP</b>														
<b>Program Bimbingan Teknis pada IRTP</b>														

### PILAR 3: MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kegiatan penyuluhan keamanan pangan pada IRTP	1 Jumlah industri rumah tang-ga yang men-dapatkan penyuluhan	1.050 IRTP	240 IRTP	75 IRTP	75 IRTP	75 IRTP	75 IRTP	88	122	150	170	170	APBN	BALAI BESAR POM
	2 Jumlah IRTP yang dilatih dan difasilitasi desain dan implementasi CPPB pada Industri Rumah Tangga	350 IRTP	80 IRTP	75 IRTP	75 IRTP	75 IRTP	75 IRTP							
	3 Monitoring dan verifikasi penerapan CPPB pada Industri Rumah Tangga	350 IRTP	80 IRTP	75 IRTP	75 IRTP	75 IRTP	75 IRTP	17	11	15	17	20	APBN	BALAI BESAR POM
<b>NASIONAL</b>														
Bimbingan Teknis dan Nonitoring pada Kantin Sekolah	1 Jumlah kantin sekolah yang dilatih & difasilitasi penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan di kantin sekolah		600 SD	4.500 SD	4.500 SD	4.500 SD	4.500 SD						APBN	BADAN POM

### PILAR 3: MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2 Monitoring dan verifikasi pelaksanaan bimtek pada kantin sekolah		600 SD	4.500 SD	4.500 SD	4.500 SD	4.500 SD						APBN	BADAN POM
<b>PROVINSI</b>														
<b>Bimbingan Teknis dan Monitoring pada Kantin Sekolah</b>														
<b>Program Bimbingan Teknis dan Monitoring pada Kantin Sekolah</b>														
Kegiatan bimbingan teknis dan monitoring pada kantin sekolah	1 Jumlah kantin sekolah yang sudah mendapatkan pembinaan keamanan pangan		22 sekolah	11 sekolah	18 sekolah	20 sekolah	25 sekolah	18	22	68	90	113	APBN	BALAI BESAR POM
	2. Persentase kantin sekolah yang mendapatkan piagam bintang keamanan pangan	3 sekolah	0 sekolah	25%	25%	25%	25%							
<b>Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan</b>														

### PILAR 3: MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kegiatan Peningkatan Mutu untuk kantin sekolah	Jumlah kantin sekolah yang dilatih dan difasilitasi penerapan prinsip-prinsip keamanan pangan di kantin sekolah	6 SD/MI	10 SD/MI	15 SD/MI	30 SD/MI	50 SD/MI	60 SD/MI	99	163	250	350	425	APBD	BKP
<b>PROVINSI</b>														
<b>Peningkatan Keamanan, Mutu, Gizi Pangan Jajanan Anak Sekolah</b>														
<b>Program Peningkatan Keamanan, Mutu, Gizi Pangan Jajanan Anak Sekolah</b>														
Kegiatan KIE dengan operasional mobil keliling	Persentase PJAS yang tidak memenuhi syarat	19,02%	30%	30%	25%	25%	20%	100	100	140	150	165	APBN	BALAI BESAR POM
<b>Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan</b>														
Kegiatan Peningkatan Mutu	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan pembinaan PJAS	12 SD	20 SD	45 SD	90 SD	150 SD	180 SD	25	60	125	200	240	APBD	BKP
<b>Program Pendidikan Dasar</b>														
Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan	Jumlah SD/MI dan SMP/MTs yang mendapat bantuan kantin sehat	0 Sekolah	0 Sekolah	70 Sekolah	100 Sekolah	150 Sekolah	200 Sekolah	0	530	750	1.130	1.500	APBD	DINDIK

### PILAR 3: MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Penerapan GAP dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan olahan</b>														
<b>Program Pengembangan Agribisnis</b>														
Kegiatan Pengem- bangan Alsintan mendukung Keta- hanan Pangan dan Hortikultura	Jumlah agroin- dustri yang me- nerapkan GAP	0 Pengusaha /industri pertanian	0	0	2 Usaha/ industri	4 Usaha/ industri	6 Usaha/ industri	0	0	100	200	300	APBD	DINPER- TAN TPH
Kegiatan Pening- katan Mutu dan Sertifikasi Hasil Produksi Pertani- an	Jumlah Kelom- pok tani yang menerapkan GAP	0 Kelompok tani	0	4 kelompok	6 kelompok	8 kelompok	10 kelompok	0	200	300	400	500	APBD	DINPER- TAN TPH
<b>Penerapan GAP,GHP dan sistem jaminan mutu perikanan budidaya</b>														
<b>Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan</b>														
Kegiatan Pene- rapan GAP,GHP dan Sistem Jaminan Mutu Perikanan Bu- didaya	Tersertifikasinya usaha pembudi- daya ikan	40 kelompok	115 klpk	115 klpk	115 klpk	115 klpk	115 klpk	69	150	200	200	200	APBN	DINLUT- KAN
Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	1. Jumlah Pengolah Ikan skala kecil yang men-dapat ketram-pilan dalam rangka penga- nekaragaman	3 ragam olahan	6 ragam olahan	9 ragam olahan	12 ragam olahan	15 ragam olahan	18 ragam olahan	76	84	93	102	-	APBN	DINLUT- KAN

### PILAR 3: MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	produk olahan hasil perikanan													
	2. Jumlah UPI yang mem- punyai SKP	27 UPI	47 UPI	60 UPI	75 UPI	90 UPI	115 UPI	2.100	10.150	0	0	0	APBN	DINLUT- KAN
<b>Monitoring dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan</b>														
<b>Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya</b>														
Kegiatan Pengem- bangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidaya Ikan	Persentase pe- nurunan hama penyakit ikan dalam rangka menunjang pe- ningkatan pro- duksi perikanan budidaya	Parasit, Virus, Bakteri (Penurun- an 0%)	5%	10%	20%	30%	40%	68	400	1.050	1.750	1.750	APBD/ APBN	DINLUT- KAN

## PILAR 4 : PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>NASIONAL</b>														
Pembinaan PHBS Pangan dan Gizi	Persentase rumah tangga melaksanakan PHBS	48,47%	55%	60%	65%	70%	75%	183,8	185,8	204,9	220		APBN	KEMENKES, KEMENTAN, KEMENDIK-NAS, KEMENAG, KEMENDA-GRI
<b>PROVINSI</b>														
<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>														
Kegiatan Peningkatan Rumah Tangga Sehat	Persentase Kab/Kota yang mencapai Rumah Tangga sehat 70%	72,64%	77%	89%	100%	100%	100%	140	160	180	200	230	APBD	DINKES
Kegiatan Peningkatan mutu desa siaga	Persentase Kab/Kota yang mempunyai desa siaga aktif (Strata Purna-ma dan Mandiri) > 30%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	470	500	550	600	650	APBD	DINKES



#### PILAR 4 : PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase Kab /Kota yang telah mencapai posyandu mandiri 10%	51%	69%	83%	100%	100%	100%	220	250	270	300	350	APBD	DINKES
<b>Program Pendidikan Dasar</b>														
Kegiatan Bantuan Fasilitasi PMT-AS	Jumlah sekolah yang mendapat bantuan PMT-AS	-	5 Lembaga PKK Kecamatan	29 sklh di 29 Kab	28 sklh di 28 Kab	20 sklh di 20 Kab	15 sklh di 15 Kab	100	1.512	1.210	864	650	APBD	DINDIK
<b>Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan LH</b>														
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pedesaan dan warga sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah warga sekolah yang peduli terhadap budaya bersih dan sehat	5 Sekolah	5 Sekolah	7 Sekolah	10 Sekolah	8 Sekolah	5 Sekolah	250	350	550	450	300	APBD	BLH
Fasilitasi air bersih dan sanitasi	Jumlah Pokmas pengelola	60	60	105	105	105	105	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800	APBD	Bapermasdes

## PILAR 4 : PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
berbasis masyarakat	sarpras air bersih dan sanitasi													
<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>														
Fasilitasi peningkatan peranserta Kaum Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menunjang terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat	Jumlah peningkatan kinerja kaum perempuan dalam penanganan daur ulang sampah, pembuatan kompos dan pemanfaatan pekarangan	100 orang	250 orang	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	500	450	450	500	550	APBD	BLH
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>														
Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan Sekitar Industri rokok	Jumlah warga masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan penataan lingkungan permukiman	150 orang	200 orang	250 orang	300 orang	350 orang	400 orang	140	160	180	220	250	APBD	BLH

## PILAR 4 : PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat</b>														
Kegiatan Pem-berdayaan Masyarakat PMT-AS	Jumlah Anak SD/MI di Desa/Kel miskin/tertinggal yang mendapat bantuan pemberian makanan tambahan anak sekolah	-	1440 anak	1440 anak	7120 anak	2400 anak	3600 anak	240	240	1.300	432	648	APBD	BAPERMAS-DES
	Jumlah Pengelola PMTAS yang mendapat sosialisasi PMT-AS.	-	-	210 org (6 Kab/ Kota)	525 org (15 Kab/ Kota)	350 org (10 Kab/ Kota)	525 org (15 Kab/ Kota)	-	50	120	80	120	APBD	BAPERMAS-DES
	Jumlah Pengelola PMT-AS, TP PKK Kab/Kota dan TP PKK Kec yang mendapat pelatihan Pengolahan Kudapan PMT-AS.	-	-	180 org (6 Kab/ Kota)	450 org (15 Kab/ Kota)	300 org (10 Kab/ Kota)	450 org (15 Kab/ Kota)	-	93	234	156	234	APBD	BAPERMAS-DES

#### PILAR 4 : PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Penyediaan Makan dan Minum bagi Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial</b>														
Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum bagi Penerima Manfaat di Balai Rehabilitasi Sosial	Jumlah PM yang mendapatkan SOSH (25 Balai Rehabilitasi Sosial + 27 Unit Rehabilitasi Sosial	4.092 orang	4.092 orang	4.112 orang	4.132 orang	4.152 orang	4.172 orang	22.400	22.500	22.600	22.700	22.800	APBD	DINAS SOSIAL
<b>Program Penjaringan dan Pendampingan Sosial PGOT dan Kelompok Rentan lainnya (PGOT, Anjal, Psikotik, Waria/WTS)</b>														
Kegiatan Penjaringan dan Pendampingan Sosial PGOT dan Kelompok Rentan lainnya (PGOT, Anjal, Psikotik, Waria/WTS)	Jumlah Penjaringan melalui TRC pada PMKS	326 orang	430 orang	460 orang	480 orang	450 orang	400 orang	46	155	168	170	174	APBD	DINAS SOSIAL

## PILAR 5: KELEMBAGAAN PANGAN DAN GIZI

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana	
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>NASIONAL</b>															
Peningkatan Kelembagaan Pangan dan Gizi di Daerah	1. Jumlah provinsi dan kabupaten dan kota yang mempunyai kelembagaan pangan dan gizi di daerah	33 Prov., 429 Kab/ Kota	33 Prov. Jml Kab dan Kota meningkat	33 Prov., Jml Kab dan Kota meningkat	33 Prov., Jml Kab dan Kota meningkat	33 Prov., Jml Kab dan Kota meningkat	33 Prov., Jml Kab dan Kota meningkat							APBN, PHLN, dan swasta	BAPPENAS, KEMENKES, KEMENTAN
	2. Jumlah tenaga kesehatan gizi di puskesmas		< 1 tenaga gizi/ Puskesmas	< 1 tenaga gizi/ Puskesmas	< 1 tenaga gizi/ Puskesmas	< 1 tenaga gizi/ Puskesmas	< 1 tenaga gizi/ Puskesmas							APBN, PHLN, dan swasta	BAPPENAS KEMENKES
<b>PROVINSI</b>															
<b>Program Sumber Daya Kesehatan</b>															
Kegiatan Pemerataan Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan gizi di Puskesmas Penempatan Tenaga Gizi (POLTEKES Gizi)	814 org/ 864 Puskesmas	839 org/ 864 Puskesmas	864 org/ 864 Puskesmas	889 org/ 864 Puskesmas	914 org/ 864 Puskesmas	939 org/ 864 Puskesmas	100	200	300	400	500	APBN	DINKES	

## PILAR 5: KELEMBAGAAN PANGAN DAN GIZI

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</b>														
Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM, penyuluh PNS, swasta dan swadaya	Jumlah Kecamatan yang mempunyai tenaga PPL Pertanian yang mengikuti pelatihan pangan dan gizi	0	0	3 Kec. (90 PPL)	3 Kec. (90 PPL)	3 Kec. (90 PPL)	3 Kec. (90 PPL)	0	75	75	75	75	APBD	SET BAKORLUH
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>														
Kegiatan Perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan	Optimalisasi Peran TKPKD dalam mendukung pangan dan gizi	Provinsi dan 35 Kab./Kota	Provinsi dan 35 Kab./Kota	Provinsi dan 35 Kab./Kota	Provinsi dan 35 Kab./Kota	Provinsi dan 35 Kab./Kota	Provinsi dan 35 Kab./Kota	645	800	1000	1200	1400	APBD	BAPPEDA
<b>Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat</b>														
Kegiatan Pengembangan ekonomi masyarakat	Peningkatan peran BUMDES dalam rangka peningkatan pangan dan gizi masyarakat	56 BUMDES di 28 Kabupaten	56 BUMDES di 28 Kabupaten	58 BUMDES di 29 Kabupaten	58 BUMDES di 29 Kabupaten	58 BUMDES di 29 Kabupaten	58 BUMDES di 29 Kabupaten	25	25	25	30	30	APBD	BAPERMADES

## PILAR 5: KELEMBAGAAN PANGAN DAN GIZI

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Pendidikan formal dan informal</b>														
Kegiatan Pendidikan kemasyarakatan	Jumlah Kecamatan yang mempunyai SDM pertanian mengikuti pelatihan pangan dan gizi:												APBD	DINPERTAN TPH
	SL PTT Hortikultura	-	4 Kec.	4 Kec.	4 Kec.	5 Kec.	5 Kec.	116	128	140	152	163		
	Magang Budidaya Holtikultura	-	5 Kec.	5 Kec.	5 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	145	157	168	180	192		
	Pelatihan GAP/SOP	-	14 Kec.	14 Kec.	14 Kec.	14 Kec.	14 Kec.	107	119	131	142	154		
	Magang pascapanen & Pengolahan hasil	-	2 Kec.	2 Kec.	2 Kec.	3 Kec.	3 Kec.	83	94	106	118	129		
	Magang Budidaya holtikultura	-	2 Kec.	2 Kec.	2 Kec.	3 Kec.	3 Kec.	64	76	87	99	111		

## PILAR 5: KELEMBAGAAN PANGAN DAN GIZI

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>														
Kegiatan Pelatihan dan pemberdayaan kelompok wanita tani	Jumlah kelompok wanita tani yang mendapat pelatihan pengembangan usaha peternakan	9 kelompok	4 kelompok	4 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	6 kelompok	140	200	250	280	300	APBD	DINNAK KESWAN
<b>Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan</b>														
Kegiatan intervensi pengenalan konsumsi pangan B2SA pada SD/MI dan Ponpes	Kab/Kota yang di intervensi Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA pada SD/MI dan Ponpes	4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	10 Kab/Kota	11 Kab/Kota	12 Kab/Kota	13 Kab/Kota	200	400	425	450	475	APBD	BKP
	Kab/Kota yang memiliki organisasi wanita dan rumah tangga yang mengikuti pelatihan pola konsumsi pangan	35 Kab / Kota PKK & KWT	35 Kab / Kota PKK & KWT	35 Kab / Kota PKK, KWT, Dharma Wanita	35 Kab / Kota PKK, KWT, Dharma wanita, BKOW	35 Kab / Kota PKK, KWT, Dharma Wanita, BKOW, Persit	35 Kab / Kota PKK, KWT, Dharma Wanita, BKOW, Persit, Keagamaan	175	70	75	80	85	APBD	BKP



## PILAR 5: KELEMBAGAAN PANGAN DAN GIZI

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Fasilitasi Perguruan Tinggi</b>														
Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial pendidikan tinggi	Jumlah Kabupaten dan kota yang memasukkan agenda penelitian pangan dan gizi	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota							
	1. jumlah Penelitian Murni	40 penelitian	40 penelitian	40 penelitian	40 penelitian	45 penelitian	45 penelitian	800	800	800	900	1.125.	APBD	DINDIK
	2. Penelitian Terapan	35 penelitian	35 penelitian	45 penelitian	45 penelitian	45 penelitian	50 penelitian	87	112	135	135	200	APBD	DINDIK
<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>														
Kegiatan percepatan perbaikan gizi	Jumlah penelitian mengenai zat gizi mikro pada tingkat Provinsi	0	0	1 penelitian	1 penelitian	1 penelitian	1 penelitian	0,0	0,0	200	200	200	APBN	DINKES
<b>Program Perencanaan Pembangunan</b>														
Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Kabupaten/kota yang sudah memasukkan program pangan dan gizi pada RPJMD	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	APBD	BAPPEDA

## PILAR 5: KELEMBAGAAN PANGAN DAN GIZI

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>														
Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi mutu dan keamanan pangan serta jejaring keamanan	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai data tingkat konsumsi energi	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota						APBD Kab./Kota	35 Kab./Kota
	Jumlah Kab/Kota yang melakukan Penyusunan PPH	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	35 Kab./Kota	178	264	300	350	400	APBD	BKP
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans pangan dan gizi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	997,32	962,5	1.050	1.137,5	1.225	APBD	DINKES
Kegiatan Pengembangan kesmavet dan Kesrawan	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans pangan dan gizi/ SKPG	50%	70%	80%	90%	100%	100%	175	175	175	175	175	APBN	BKP

## PILAR 5: KELEMBAGAAN PANGAN DAN GIZI

Program/ Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat ini (2010)	Target Pencapaian					Rencana Kebutuhan Anggaran (Rp. Juta)					Sumber Pendana- an	Pelaksana
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah aparat yang telah memiliki sertifikat NKV/ auditor keamanan pangan asal ternak	4 orang	0	2 orang	4 orang	4 orang	4 orang	0	20	40	50	50	APBN	DINNAK KESWAN
Kegiatan Koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan	Optimalisasi Peran DKP dalam mendukung pangan dan gizi	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	60	65	70	75	80	APBD	BKP